



INDEKS GOOD GOVERNANCE

KABUPATEN JOMBANG

2024

**KANTOR PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG**



ABSTRAK

Kajian Indeks Good Governance (IGG) Kabupaten Jombang 2024 bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan delapan prinsip utama: taat hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui survei terhadap responden internal (OPD, kecamatan, BUMD) dan eksternal (ormas, swasta, masyarakat sipil), serta analisis data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan signifikan skor IGG dari tahun 2021 hingga 2024. Pada 2021, indeks mencatatkan nilai sebesar 72,71 meningkat menjadi 75,30 pada 2022. Pada tahun selanjutnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 82,89 pada 2023, dan pada tahun selanjutnys tren tersebut nilai indeks mencapai 83,26 pada 2024. Dimensi transparansi terus menjadi indikator tertinggi, diikuti oleh akuntabilitas dan daya tanggap. Kajian ini menyoroti keberhasilan implementasi prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal pengelolaan anggaran yang lebih proporsional serta peningkatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Rekomendasi kajian ini mencakup peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, konsistensi dalam penerapan akuntabilitas, meningkatkan kualitas layanan publik dengan efektivitas dan efisiensi, memperkuat aspek kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan, pengembangan kapasitas ASN dan peningkatan profesionalisme untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Jombang.



KATA PENGANTAR

Pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung jalannya pembangunan. Kajian Indeks *Good Governance* (IGG) menjadi penting untuk dilakukan setiap tahun karena menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”.

Kami, Tim Peneliti, merasa bersyukur dapat menyelesaikan kajian mengenai Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jombang Tahun 2024. Kami merasakan adanya kolaborasi yang efektif dan semangat kuat dari internal Pemkab Jombang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik setiap tahunnya. Semangat dan harapan ini tampak jelas dalam diskusi yang kami lakukan bersama OPD terkait. Kami juga merasakan dukungan dari para *stakeholder* eksternal (sektor privat dan masyarakat sipil) yang turut mendukung dan berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan, serta dapat memberikan masukan melalui media ataupun diskusi langsung dengan perwakilan pemerintah.

Para responden, baik internal maupun eksternal, menilai bahwa tata kelola Pemkab Jombang mulai menunjukkan manfaat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar. Saran dan masukan yang telah kami himpun telah dituangkan dalam laporan ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappeda Kabupaten Jombang atas kerjasamanya. Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Jombang di masa yang akan datang.

Jombang, November 2024

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Perumusan Masalah	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Terminologi Praktis	7
2.3 Terminologi Teoritis.....	8
2.4 Penelitian Terdahulu.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN JOMBANG	15
3.1 Kondisi Geografis.....	15
3.2 Kondisi Demografis	17
3.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	18
3.4 Tingkat Kemiskinan	18
3.5 Struktur Pemerintahan	19
3.6 Gambaran Umum 8 Prinsip Indeks <i>Good Governance</i>	21
3.6.1 Taat Hukum.....	22
3.6.2 Partisipasi.....	26
3.6.3 Transparansi.....	28
3.6.4 Akuntabilitas	31
3.6.5 Daya Tanggap	33
3.6.6 Kesetaraan.....	35
3.6.7 Efektivitas dan Efisiensi	36
3.6.8 Visi Strategis.....	39
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	42
4.1 Penentuan Jenis Data Bagi Pengukuran Indikator Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	42



4.2	Model Pengukuran Pelaksanaan <i>Good Governance</i> di Pemerintah Daerah	44
4.3	Penetapan Alat Instrumen Pengukuran.....	45
4.4	Standar Penilaian Indeks <i>Good Governance</i>	54
4.5	Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Tindak Lanjut Penilaian ...	55
4.6	Penyusunan Pedoman Pengukuran	56
4.7	Rekomendasi Kegiatan Statistik.....	57
4.7.1	Studi Literatur	58
4.7.2	Wawancara Mendalam.....	58
4.7.3	Survei Internal dan External Pemkab Jombang	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
5.1	Karakteristik Responden	64
5.2	Penilaian Responden pada Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> di Kabupaten Jombang.....	67
5.3	Skor Dimensi/Prinsip Indeks <i>Good Governance</i>	68
5.3.1	Taat Hukum.....	68
5.3.2	Partisipasi.....	78
5.3.3	Transparansi.....	86
5.3.4	Akuntabilitas	92
5.3.5	Daya Tanggap	99
5.3.6	Kesetaraan.....	105
5.3.7	Efektivitas dan Efisiensi	112
5.3.8	Visi Strategis.....	118
5.4	Skor Indeks <i>Good Governance</i>	123
5.5	Perhitungan Proyeksi Indeks <i>Good Governance</i>	127
BAB VI PENUTUP		131
6.1	Kesimpulan	131
6.2	Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA		137
LAMPIRAN		139



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Per Kecamatan Tahun 2024 ..	17
Tabel 3. 2 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023.....	18
Tabel 3. 3 Jumlah ASN di Kabupaten Jombang Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 3. 4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jombang 2024-2029	21
Tabel 3. 5 Skor Delapan Prinsip Indeks <i>Good Governance</i> di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	22
Tabel 3. 6 Indikator Penegakan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang.....	23
Tabel 3. 7 Jumlah dan Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang	25
Tabel 3. 8 Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang.....	26
Tabel 3. 9 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019-2023 Kabupaten Jombang	29
Tabel 3. 10 Indikator Indeks SPBE dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Jombang tahun 2019-2023	30
Tabel 3. 11 Cakupan Penanganan pengaduan dan Reintegrasi Sosial untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang.....	34
Tabel 3. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), SPM bagi perempuan dan anak, dan jumlah organisasi perempuan yang dibina tahun 2019-2023 di Kabupaten Jombang.....	35
Tabel 3. 13 Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023	38
Tabel 4. 1 Instrumen (Kuesioner) Pengukuran Pelaksanaan IGG di Pemerintahan Daerah.....	45
Tabel 4. 2 Standar Penilaian Indeks <i>Good Governance</i>	55
Tabel 4. 3 Organisasi Target Sampel Survei Indeks <i>Good Governance</i> Kabupaten Jombang 2024	59
Tabel 4. 4 Tabel <i>Timeline</i> Indeks <i>Good Governance</i> Kabupaten Jombang 2024	61



Tabel 5. 1 Skor Indeks <i>Good Governance</i> Kabupaten Jombang 2024	67
Tabel 5. 2 Skor 8 Prinsip Indeks <i>Good Governance</i> berdasarkan jenis sampel	68
Tabel 5. 3 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Taat Hukum	69
Tabel 5. 4 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Partisipasi	78
Tabel 5. 5 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Transparansi	87
Tabel 5. 6 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Akuntabilitas	92
Tabel 5. 7 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Daya Tanggap.....	100
Tabel 5. 8 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Kesetaraan	106
Tabel 5. 9 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi.....	112
Tabel 5. 10 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Visi Strategis	118
Tabel 5. 11 Skor Delapan Prinsip Indeks <i>Good Governance</i> di Kabupaten Jombang	123
Tabel 5. 12 Nilai Indeks <i>Good Governance</i> Kabupaten Jombang 2021-2024	125
Tabel 5. 13 Hasil Proyeksi Indeks <i>Good Governance</i> 6 (enam) Tahun ke Depan ..	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai Indeks delapan prinsip <i>Good Governance</i> di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	2
Gambar 2. 1 Nilai Indeks IGG Kabupaten Jombang dalam 3 tahun terakhir	6
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang	16
Gambar 3. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023	19
Gambar 3. 3 Skor Prinsip Taat Hukum di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023	23
Gambar 3. 4 Penyuluhan Kesadaran Hukum di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	25
Gambar 3. 5 Skor Prinsip Partisipasi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023 ..	27
Gambar 3. 6 Musrenbang di Kecamatan Bareng	28
Gambar 3. 7 Skor Prinsip Transparansi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	29
Gambar 3. 8 Skor Prinsip Akuntabilitas di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	32
Gambar 3. 9 Skor Prinsip Daya Tanggap di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	33
Gambar 3. 10 Skor Prinsip Kesetaraan di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	35
Gambar 3. 11 Skor Prinsip Efektivitas dan Efisiensi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	37
Gambar 3. 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jombang	37
Gambar 3. 13 Skor Prinsip Visi Strategis di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023	39
Gambar 4. 1 Teori <i>Enable Sector</i>	42
Gambar 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Gambar 5. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur	65
Gambar 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	65
Gambar 5. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Gambar 5. 5 Hasil Skor Indikator Kecukupan Peraturan	71
Gambar 5. 6 Hasil Skor Indikator <i>Reward and Punishment</i>	71
Gambar 5. 7 Hasil Indikator Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan	72
Gambar 5. 8 Hasil Indikator Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah Ketertiban Umum	73



Gambar 5. 9 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	73
Gambar 5. 10 Hasil Indikator Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum	74
Gambar 5. 11 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait	75
Gambar 5. 12 Hasil Skor Indikator Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan	75
Gambar 5. 13 Hasil Skor Prinsip Taat Hukum	76
Gambar 5. 14 Hasil Skor Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah	80
Gambar 5. 15 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup	81
Gambar 5. 16 Hasil Skor Indikator Mengakomodir Keterlibatan Kelompok Dalam Perencanaan Program Pembangunan	82
Gambar 5. 17 Hasil Skor Indikator Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan	82
Gambar 5. 18 Hasil Skor Indikator Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat	83
Gambar 5. 19 Hasil Skor Indikator Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum	84
Gambar 5. 20 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat	84
Gambar 5. 21 Hasil Skor Prinsip Partisipasi	85
Gambar 5. 22 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Peraturan yang Menjamin Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi	88
Gambar 5. 23 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	88
Gambar 5. 24 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	89
Gambar 5. 25 Hasil Skor Indikator Informasi Pelayanan	90
Gambar 5. 26 Hasil Skor Prinsip Transparansi.....	90
Gambar 5. 27 Hasil Skor Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	94



Gambar 5. 28 Hasil Skor Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	94
Gambar 5. 29 Hasil Skor Indikator Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat	95
Gambar 5. 30 Hasil Skor Indikator Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	96
Gambar 5. 31 Hasil Skor Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran.....	96
Gambar 5. 32 Hasil Skor Indikator Kinerja Aparat Pemerintah.....	97
Gambar 5. 33 Hasil Skor Prinsip Akuntabilitas.....	98
Gambar 5. 34 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Informasi Pengaduan Masyarakat dari Pemda	101
Gambar 5. 35 Hasil Skor Indikator Kecepatan Pemda dalam Menghadapi Pengaduan dan Tindakan Terhadap Pengaduan.....	102
Gambar 5. 36 Hasil Skor Indikator Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari Pemda.....	103
Gambar 5. 37 Hasil Skor Indikator Penyediaan SDM, Sarana, dan Prasarana dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dari Pemda	103
Gambar 5. 38 Hasil Skor Prinsip Daya Tanggap	104
Gambar 5. 39 Hasil Skor Indikator Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan.....	107
Gambar 5. 40 Hasil Skor Indikator Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan.....	108
Gambar 5. 41 Hasil Skor Indikator Kualitas Pemberian Pelayanan Publik dari Pemda.....	109
Gambar 5. 42 Hasil Skor Indikator Peran Pemda dalam Menyediakan Sumber Daya Pelayanan Publik (SDM, Sarana, Prasarana, Anggaran) yang Memadai	109
Gambar 5. 43 Hasil Skor Prinsip Kesetaraan	110
Gambar 5. 44 Hasil Skor Indikator Mensinergikan Program dan Kegiatan Pembangunan Antar OPD	113
Gambar 5. 45 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Menggali Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	114
Gambar 5. 46 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Melakukan Kerja Sama dengan <i>Stakeholder</i>	114



Gambar 5. 47 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Menyediakan Sistem Pelayanan Publik Terpadu atau Satu Pintu.....	115
Gambar 5. 48 Hasil Skor Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi	116
Gambar 5. 49 Hasil Skor Indikator Kemampuan Arah Rencana Pembangunan Daerah.....	119
Gambar 5. 50 Hasil Skor Indikator Kesesuaian Kebijakan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan.....	120
Gambar 5. 51 Hasil Skor Indikator Langkah Strategis Pemda dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan.....	120
Gambar 5. 52 Hasil Skor Indikator Program dan Kegiatan Pemda Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan	121
Gambar 5. 53 Hasil Skor Prinsip Visi Strategis	122
Gambar 5. 54 Grafik Skor Delapan Prinsip Indeks <i>Good Governance</i> di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2024	124
Gambar 5. 55 Nilai Indeks <i>Good Governance</i> Kabupaten Jombang 2021-2024 ..	126



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

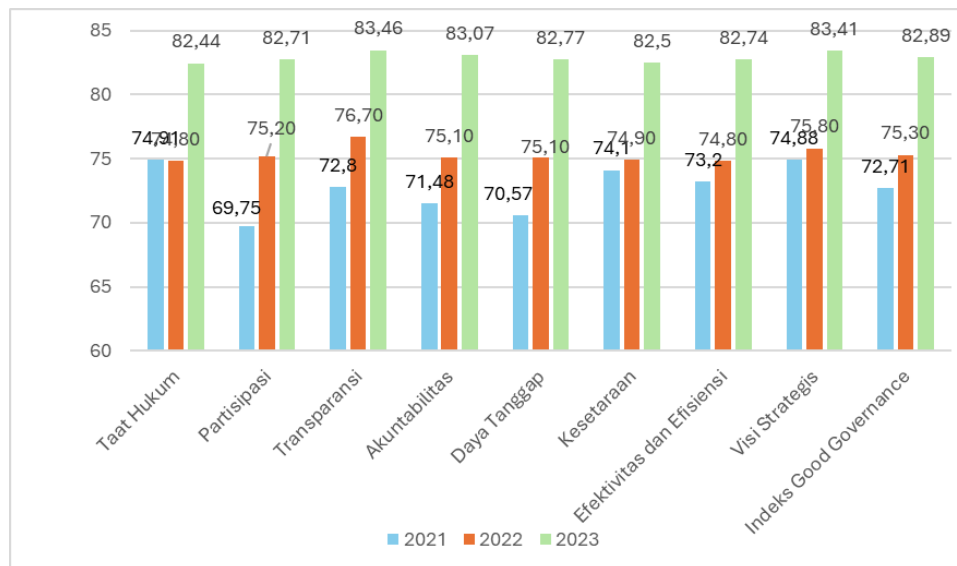
RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan lima tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, maka RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025. Pada tujuan pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”. Pada tujuan pertama terlihat dengan jelas bahwa Kabupaten Jombang berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, maka indeks *good governance* (IGG) menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam mewujudkan target dan indikator tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Maka dari itu mengukur keberhasilan IGG, diperlukan kajian penelitian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi akuntabilitas dan reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) terdapat 9 prinsip yakni taat hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada konsensus, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis (Sulfiani, 2021). Sedangkan berdasarkan BAPPENAS terdapat 14 prinsip yakni wawasan ke depan, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektif, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, serta komitmen pada pasar yang fair (Hasibuan, 2017). Namun sejak tahun 2021, dari Bappeda Kabupaten Jombang telah melakukan kajian indeks *good governance* (IGG) dengan 8 variabel yang digunakan agar keselerasan dengan beberapa tahun sebelumnya maka

dipilih delapan variabel tersebut, yaitu taat hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis.


Jika ditinjau dari metode yang digunakan pada tahun sebelumnya selalu berbeda. Perbedaan metode mulai dari skala penilaian dan sampling. Pada tahun 2021 menggunakan skala penilaian 1-9 dan penyebaran kuesioner dengan sampel ke masyarakat yang terbagi dalam masing-masing kecamatan. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan skala penilaian 0-100 dan penyebaran kuesioner dengan sampel terbagi dari pihak eksternal (masyarakat, dan swasta) dan internal (pemerintah).

Gambar 1.1 menunjukkan nilai indeks *good governance* di Kabupaten Jombang penelitian sebelumnya tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 82,89 dan terendah tahun 2021 dengan nilai 72,71. Nilai indeks *good governance* mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2021 hingga 2023. Jika dibandingkan hasil nilai masing-masing prinsip pada tahun 2021, nilainya selalu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, namun ada satu nilai prinsip yakni partisipasi tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2022 dengan selisih nilai 0,77.



Gambar 1. 1 Nilai Indeks delapan prinsip Good Governance di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Sebagai tindaklanjut atas kajian IGG 2023 sebelumnya, maka tujuan dan metode kajian IGG pada tahun 2024 sama yakni kajian berfokus pada



bagaimana pandangan masyarakat atas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jombang. Dengan kajian kualitatif diperdalam dengan menggali pandangan dari pihak eksternal masyarakat dan sektor privat di Kabupaten Jombang. Pandangan *stakeholder* eksternal akan melengkapi pandangan internal tentang tata kelola pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut:



1. Bagaimana nilai Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang pada tahun 2024?
2. Bagaimana evaluasi terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang yang berkontribusi terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?
3. Apa rekomendasi untuk peningkatan pembangunan yang relevan dengan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan

Tujuan dari IGG 2024 adalah melanjutkan kajian IGG 2023, yakni:

1. Mengetahui nilai Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang Tahun 2024
2. Mengevaluasi pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Menyusun rekomendasi untuk peningkatan pembangunan yang relevan dengan tata kelola pemerintahan yang baik

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah penilaian masyarakat atas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jombang dengan menggali persepsi dari sektor publik, masyarakat sipil dan sektor privat. Kajian ini menggunakan 8 variabel, sebagaimana kajian IGG Tahun 2023. Kedelapan variabel tersebut adalah taat hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis.



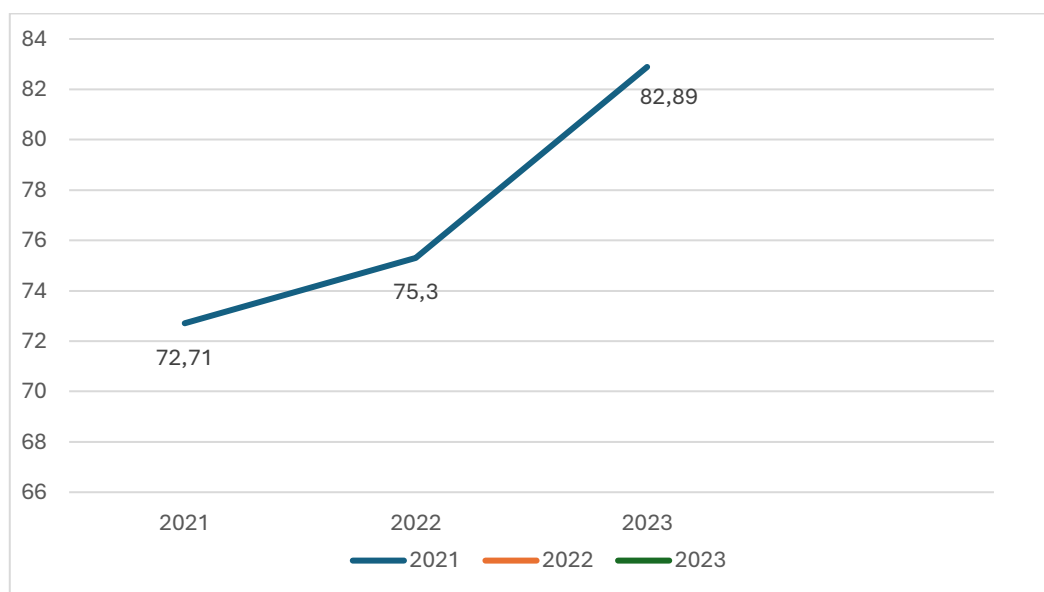
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori

Indeks *Good Governance* (IGG) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Indeks *good governance* melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal yang bisa diukur dengan mengidentifikasi dan mengurangi korupsi dalam birokrasi dapat menggunakan tiga elemen utama, yakni Monopoli (*Monopoly*), Peluang untuk Korupsi (*Opportunities for Corruption*), dan Kekurangan Akuntabilitas (*Lack of Accountability*) (Klitgaard, 1988). Semua pihak perlu menekankan pentingnya peran lembaga dan sistem dalam memastikan efisiensi dan keadilan dalam pemerintahan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial (Wolfensohn, 1999). IGG Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, bisa tergambarkan dalam gambar grafik berikut ini:



Gambar 2. 1 Nilai Indeks IGG Kabupaten Jombang dalam 3 tahun terakhir

Adapun penjelasan tabel diatas yakni dengan nilai capaian pemerintah Kabupaten Jombang mengalami kenaikan secara bertahap yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2021 sebesar 72,71%, naik kembali di tahun




2022 yakni sebesar 75,30%, dan mengalami peningkatan pula di tahun 2023 yakni sebesar 82,89%. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengkaji landasan teori terminologi praktis dan terminologi teoritis IGG Kabupaten Jombang.

2.2 Terminologi Praktis

Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kebutuhan untuk mereformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pada saat ini, birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, kompleksitas struktur organisasi, proses kerja yang rumit, kualitas pegawai yang rendah, dan pelayanan publik yang kurang memuaskan. Tujuan dari adanya reformasi birokrasi tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif.

Sejarah mengenai reformasi birokrasi dimulai sejak tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selama lebih dari satu dekade sejak *grand design* Reformasi Birokrasi dikeluarkan, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai inisiatif dan program untuk mewujudkan visi transformasi birokrasi yang lebih baik. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, reformasi birokrasi terus menjadi agenda krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih dari korupsi, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Visi dari adanya birokrasi adalah menciptakan birokrasi profesional, berintegritas, dan mampu melayani publik, sedangkan misinya yakni melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas. Untuk menunjang hal tersebut,




dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, agar bisa mengefisiensikan pengelolaan keuangan serta menguasai teknologi informasi yang terkini. Terakhir, juga memperkuat desentralisasi dan penguatan pemerintah daerah untuk mengakomodir desentralisasi yang semakin luas di Indonesia dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik di tingkat lokal.

Penting untuk dicatat bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui reformasi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara lebih baik.

2.3 Terminologi Teoritis

“*Good Governance*” dapat diartikan sebagai sebuah proses interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti pengambilan keputusan, penyediaan layanan publik, dan penegakan hukum. Dalam proses ini, pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan mengarahkan kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ada beberapa pengertian *good governance* dari berbagai sumber, yakni menurut Bank Dunia, bahwa model ini menekankan pada delapan pilar utama, yaitu suara dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, kontrol korupsi, orientasi ke arah hasil, keadilan dan inklusivitas, pemerintahan yang responsif, dan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil (World Bank, 1992).

Sedangkan pengertian *good governance* dari OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) adalah Model ini menekankan pada empat dimensi utama, yaitu proses politik, efektivitas pemerintahan, keadilan dan inklusi, dan akuntabilitas. Di samping itu, menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) *good governance* ialah model yang



menekankan pada delapan dimensi utama, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, partisipasi masyarakat sipil, efektivitas pemerintahan, keadilan dan inklusi, akuntabilitas, dan transparansi (Pasolong, 2019)


Pemerintah Indonesia melalui Bappenas menetapkan bahwa ada 14 variabel *good governance* yakni terdapat 14 prinsip yakni wawasan ke depan, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektif, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, serta komitmen pada pasar yang fair (Bappenas, 2007). Sedangkan dalam penelitian ini, yang digunakan hanya 8 variabel *good governance*, dikarenakan menyesuaikan dari kajian/penelitian sebelumnya di Kabupaten Jombang sejak 3 tahun terakhir agar bisa dibandingkan dan dikaji secara spesifik serta komprehensif. Prinsip yang dimaksud yaitu taat hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis.

Dari keseluruhan perbedaan variabel diatas, terdapat 3 (tiga) prinsip utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas pada prinsipnya menilai kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah dengan ukuran atau norma-norma yang dimiliki para *stakeholders* dan masyarakat. Ukuran tersebut meliputi akuntabilitas dalam keuangan, administrasi, kebijakan publik, kepastian hukum, stabilitas politik, dan sosial budaya.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai bentuk keterlibatan, yang dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:

1. Keterlibatan Satu Arah (*One-way Relationship*)

Pada tingkatan ini, pemerintah hanya menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai kebutuhan



mereka. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan yang paling sederhana dan kurang efektif.

2. Keterlibatan Dua Arah (*Two-way Relationship*)

Pemerintah tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menerima umpan balik (*feedback*) atas kebijakan yang telah diambil. Tingkatan ini menunjukkan adanya interaksi dan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.


3. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkatan ini, pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara bersama-sama dengan pemerintah. Kemitraan ini merupakan bentuk keterlibatan yang paling ideal dan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Evolusi keterlibatan dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan pergeseran dari komunikasi searah (monolog) menuju dialog dan kolaborasi yang lebih aktif. Pemerintah yang terbuka, transparan, dan aktif mendengarkan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tingkatan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan membawa manfaat bagi semua pihak.

2.4 Penelitian Terdahulu


Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait *good governance index*, diantaranya yaitu hasil kajian Bappenas mengenai pelaksanaan *good governance* dalam Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia memberikan wawasan penting. Kajian empiris menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah sebagai asas *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah di 514 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2015-2019. Akuntabilitas kinerja pemerintah berdampak pada pembangunan daerah secara nasional, baik di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI). Akuntabilitas keuangan pemerintah juga berpengaruh signifikan pada pembangunan daerah di sebagian besar wilayah, namun tidak signifikan di wilayah KTI.



Pelayanan publik menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah dan evaluasi birokrasi. Efisiensi pelayanan publik merupakan perhatian bersama dari pejabat pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Meskipun *good governance* sudah diperjuangkan, namun tantangannya masih kompleks. Transparansi saja tidak cukup, tetapi memerlukan transformasi menyeluruh di berbagai sektor. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah menjadi bagian penting dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, pemerintah pusat kemudian mengarahkan perhatiannya pada meningkatkan pertanggungjawaban kinerja pemerintah melalui inisiatif seperti program penghargaan WTP untuk evaluasi kinerja keuangan, SAKIP untuk mengevaluasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta evaluasi Reformasi Birokrasi. Seiring dengan arahan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengikuti tiga peningkatan akuntabilitas diatas dengan capaian yang baik. Hasil evaluasi keuangan menunjukkan WTP selama 10 tahun berturut-turut, nilai SAKIP mencapai BB, dan nilai Reformasi Birokrasi dengan nilai baik.

Hasil Indeks *good governance* (IGG) Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2023 mencapai angka 82,89% yang menunjukkan pencapaian tingkat "Sangat Baik" dengan prinsip transparansi memiliki persepsi tertinggi yaitu sebesar 83,46, sementara nilai terendah adalah variabel efisiensi dan efektivitas serta taat hukum, keduanya mendapat point 82,44. Kajian tersebut melibatkan 60% responden internal dan 40% eksternal Pemkab Jombang. Organisasi internal Pemkab Jombang termasuk OPD, kecamatan, BUMD serta puskesmas. Adapun responden eksternal termasuk ormas, media massa, swasta, universitas, koperasi, dan pesantren. Keterlibatan internal yang lebih banyak 20% dibanding responden eksternal nampaknya berpengaruh terhadap nilai tata kelola pemerintahan yang lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu 75,30 vs 82,89. Dibandingkan dengan IGG tahun 2022, keterlibatan responden internal dan eksternal masing-masing 50%. Hal tersebut menjadi catatan dan evaluasi apakah kajian tersebut *apple to apple* sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Jombang secara riil



pada saat ini, ataukah tidak dengan proporsi yang berbeda dengan tahun 2022, yakni yang tadinya 50:50 menjadi 60:40 pada tahun 2023 antara internal dan eksternal.

Seperti penelitian IGG sebelumnya pada tahun 2023, penelitian ini mengacu pada delapan prinsip tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada hasil penelitian Lembaga Administrasi Negara serta referensi relevan lainnya. Berikut adalah penjelasan untuk setiap prinsip tersebut:

- 1) **Visi Strategis** adalah gambaran tentang masa depan yang diharapkan suatu organisasi. Arah yang jelas ini diperlukan untuk mendukung perencanaan strategis dalam mengelola sumber daya, mengembangkan indikator kinerja, dan merumuskan alat *monitoring* serta evaluasi.
- 2) **Akuntabilitas** merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya (finansial, SDM, sarana, dan prasarana) dalam mencapai tujuan dan kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini berdasarkan pada kepatuhan kebijakan publik terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) **Partisipasi** adalah hak kebebasan setiap warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui kelompok yang mewakili kepentingan mereka.
- 4) **Transparansi** adalah keterbukaan informasi tentang tindakan pemerintah kepada masyarakat, dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan rahasia negara yakni informasi yang melibatkan kebijakan publik. Informasi yang dimunculkan kepada masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil dari kebijakan publik.
- 5) **Daya Tanggap** adalah kemampuan lembaga atau badan usaha untuk merespons kebutuhan dan aspirasi dari pemangku kepentingan, seperti keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat.



- 6) **Efektivitas dan efisiensi** berarti mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin, termasuk biaya, waktu, dan sumber daya manusia.
- 7) **Kesetaraan** menekankan bahwa semua warga negara, tanpa memandang gender, usia, disabilitas, atau minoritas, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 8) **Taat hukum** adalah ketersediaan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara yang mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan yang jelas, mematuhi prinsip kepatutan, dan merujuk pada keadilan masyarakat secara umum.



BAB III

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG



BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

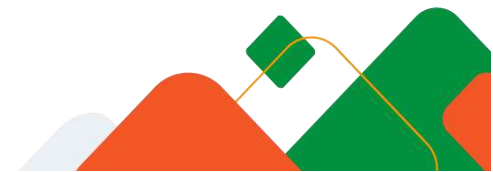
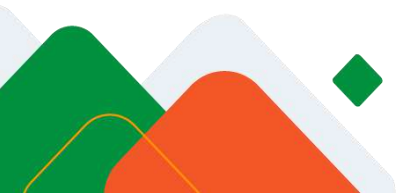
3.1 Kondisi Geografis

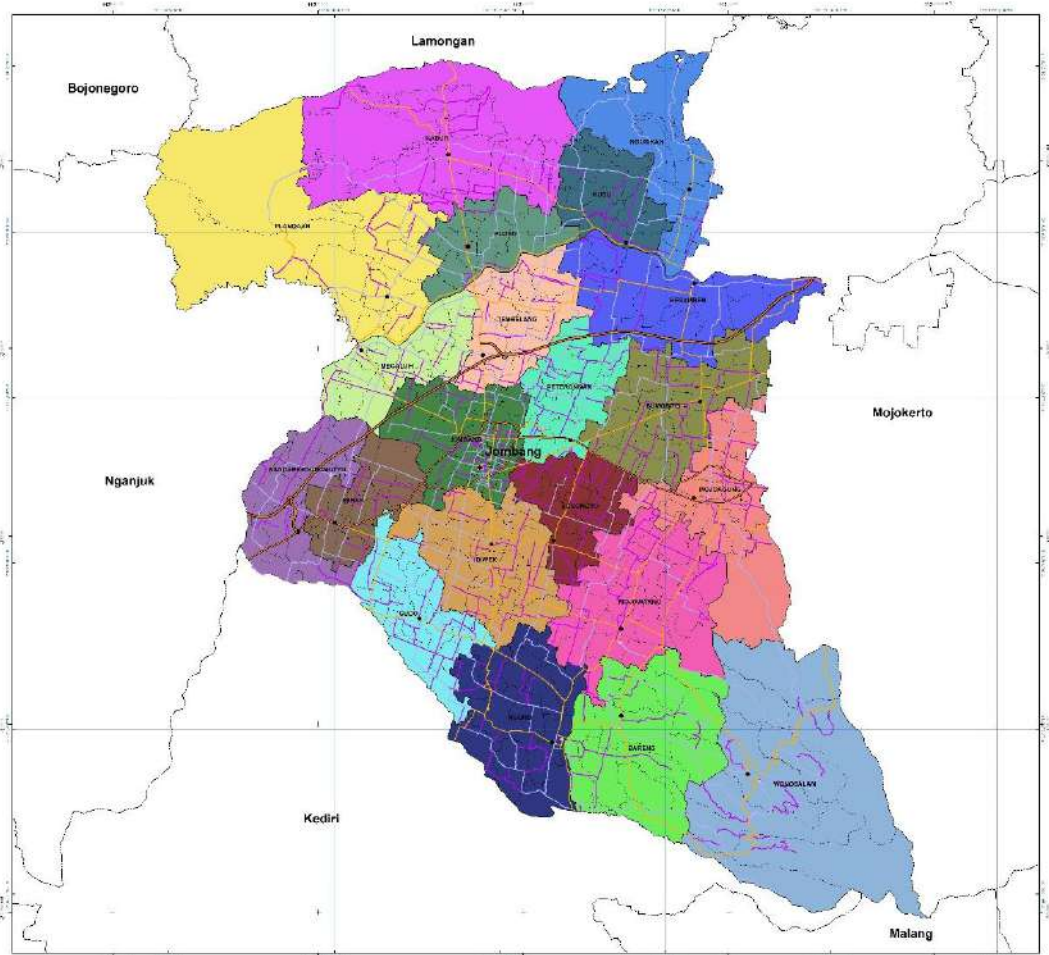
Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya-Jombang-Solo dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi jalan tol Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara 7°20'48,60"-7°46'41,26" Lintang Selatan serta antara 112°03'46,57"- 112°27'21,26" Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,63 km² (110.963 ha), atau menempati sekitar 2,32% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk





 PEREMPTAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR	KETERANGAN IBUKOTA PEMERINTAHAN • Ibu Kota Kabupaten • Ibu Kota Kecamatan PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN ○ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ○ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ○ Pusat Pelayanan Lingsungan (PPL)	NAMA KECAMATAN BANDARREDUNG MULOYO BARENG DIWIK CUCU JOGOROTO JOMBANG KABUH KESAMBEN KUDU NEGALIH MOJOGUNGUNG MOJOWARNO NGORO NGUSIKAN PERAK PETERONGAN PLANDAN PLOSOK SUMBUTO TEMBELANG WONDOSALAM	DIAGRAM LOKASI LOKASI YANG DIPETA KAN
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NO 16 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021-2041		
PETA BATAS ADMINISTRASI	 SKALA 1 : 100.000		Mengatahui, BUPATI JOMBANG MUNDJIDAH WAHAB

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2022

3.2 Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Jombang tahun 2024 berdasarkan BPS Kabupaten Jombang tahun 2024 sebanyak 1.370.510 jiwa, yang terdiri dari 690.361 laki-laki dan 680.149 perempuan. Mereka tinggal di 306 desa dan kelurahan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jombang sebanyak 143.301 jiwa dan yang paling sedikit di Kecamatan Ngusikan sebanyak 23.768 jiwa. Berikut merupakan tabel rincian jumlah penduduk Kabupaten Jombang per kecamatan.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bandar Kedung Mulyo	26.718	25.886	52.604
2	Perak	29.606	29.492	59.098
3	Gudo	29.466	29.356	58.822
4	Diwek	57.525	56.495	114.020
5	Ngoro	40.426	39.922	80.348
6	Mojowarno	50.687	48.764	99.451
7	Bareng	30.070	29.358	59.428
8	Wonosalam	17.657	17.402	35.059
9	Mojoagung	42.496	41.348	83.844
10	Sumobito	45.939	44.284	90.223
11	Jogoroto	37.691	36.391	74.082
12	Peterongan	35.627	34.875	70.502
13	Jombang	71.184	72.117	143.301
14	Megaluh	20.777	20.725	41.502
15	Tembelang	28.525	28.610	57.135
16	Kesamben	34.809	34.020	68.829
17	Kudu	16.411	16.457	32.868
18	Ngusikan	11.970	11.798	23.768
19	Ploso	21.828	21.602	43.430
20	Kabuh	21.577	21.799	43.376
21	Plandaan	19.372	19.448	38.820
Kabupaten Jombang		690.361	680.149	1.370.510

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas bahwa penduduk terbanyak di Kabupaten Jombang berjenis kelamin laki-laki sebesar 690.361 jiwa. Selisih jumlah antara penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki di Kabupaten Jombang sebesar 10.212 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jombang 143.301 jiwa yang juga sebagai pusat Kabupaten Jombang dan paling sedikit di Kecamatan Ngusikan sebanyak 23.768 jiwa.

3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan satu indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia (Rinaldi dkk., 2022). Indikator IPM berisi pengukuran keberhasilan upaya peningkatan keterampilan penduduk yang dikembangkan dengan melihat aspek hidup dengan layak, sehat dan panjang umur, serta kualitas pendidikan (Azfirmawarman dkk., 2023). Berdasarkan BPS IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kemampuan daya beli.

Tabel 3. 2 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Nilai IPM
1	2019	72,85
2	2020	73,63
3	2021	74,10
4	2022	74,66
5	2023	75,16

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2024

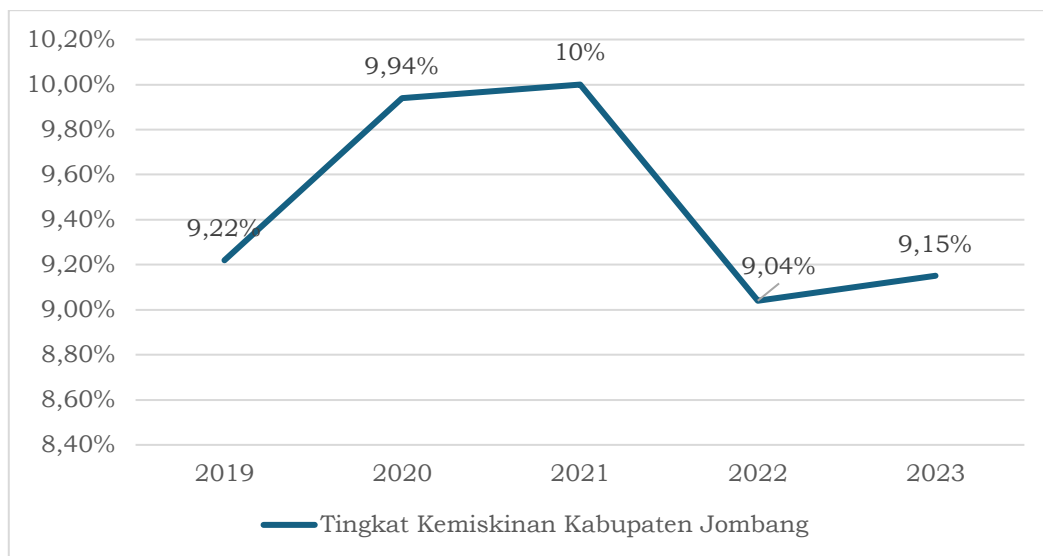
Berdasarkan Tabel 3.2 diatas bahwa perkembangan nilai IPM di tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami peningkatan.

3.4 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Damayanti & Ratnasari, 2013). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 3.2 merupakan tingkat Kemiskinan diatas angka kemiskinan di Kabupaten Jombang yang fluktuatif. Kenaikan angka kemiskinan salah satunya dipicu pandemi dan pascapandemi Covid-19. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen, yaitu dari 9,22 persen menjadi 9,94 persen pada tahun 2020 dan meningkat hingga tahun 2021. Persentase menurun drastis tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,96 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan kembali dari 9,04 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,15 persen pada tahun 2023.



Gambar 3. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2024

3.5 Struktur Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Jombang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dalam masa jabatan 5 tahun. Dalam bekerja, Kepala Daerah dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dalam mewujudkan visi dan misinya. ASN dan Non ASN ditempatkan di 6 Badan, 21 dinas dan 21 Kecamatan. Berikut Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 3 Jumlah ASN di Kabupaten Jombang Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Administrator	30	5	35
Pengawas	123	49	172
Jabatan Fungsional Guru	201	152	352
Jabatan Fungsional Medis	1.162	2.162	3.324
Jabatan Fungsional Teknis Fungsional Umum	266	927	1.193
	162	137	299
	1.107	1.065	2.172
Jumlah Total	3.051	4.497	7.548

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2024

Kinerja Kepala Daerah secara teknis dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan secara pemikiran strategis dibantu oleh Staf Ahli. Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 telah diatur bahwa Kinerja Sekda secara teknis dibantu oleh 3 (tiga) Asisten. Asisten 1, urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai rentang koordinasi pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum. Asisten 2, urusan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rentang koordinasi pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Asisten 3, urusan Administrasi Umum memiliki rentang koordinasi pada Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Adapun rentang koordinasi Asisten pada OPD adalah Asisten 1 bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat, urusan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, kepemudaan dan olah raga, pelayanan administrasi DPRD, serta fungsi pengawasan dan fungsi kecamatan.

Asisten 2 bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, perindustrian, perdagangan, sumber daya alam, tenaga kerja, pariwisata, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perhubungan,

lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, penunjang perencanaan, penunjang penelitian dan pengembangan serta badan usaha milik negara.

Asisten 3 bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, penunjang kepegawaian, penunjang pendidikan dan pelatihan, dan penunjang keuangan.

Jumlah OPD di Jombang terdiri dari 6 badan, 21 dinas, 4 BUMD, 21 Kecamatan, 10 bagian Sekretariat daerah, inspektorat, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kinerja pemerintah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saat ini jumlah anggota DPRD di Kabupaten Jombang 2024-2029 sebanyak 50 orang yang tersebar ke dalam 8 partai politik sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jombang 2024-2029

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah/Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PKB	9	3	12
2	PDI-P	9	1	10
3	Partai Gerindra	6	2	8
4	Partai Demokrat	4	2	6
5	Partai Golkar	4	1	5
6	PPP	3	1	4
7	PKS	3	0	3
8	Partai Nasdem	2	0	2
Kabupaten Jombang		40	10	50

Sumber: jombangkab.go.id, 2024

Berdasarkan tabel 4 Anggota DPRD tersebut merupakan hasil Pilkada yang diselenggarakan tahun 2024 dengan partai politik dengan kursi anggota DPRD terbanyak adalah dari Partai PKB sebanyak 12 orang dan terendah dari partai Nasdem sebanyak 2 orang. Anggota DPRD Kabupaten Jombang 2024-2029 didominasi oleh laki-laki yakni 40 orang dengan partai PKB dan PDI-P terbanyak jumlah laki-laki yaitu 9 orang. Sedangkan perempuan terbanyak ada pada partai PKB yakni 3 orang.

3.6 Gambaran Umum 8 Prinsip Indeks Good Governance

Berikut merupakan hasil skor dari 8 Prinsip Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Tabel 3. 5 Skor Delapan Prinsip Indeks *Good Governance* di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

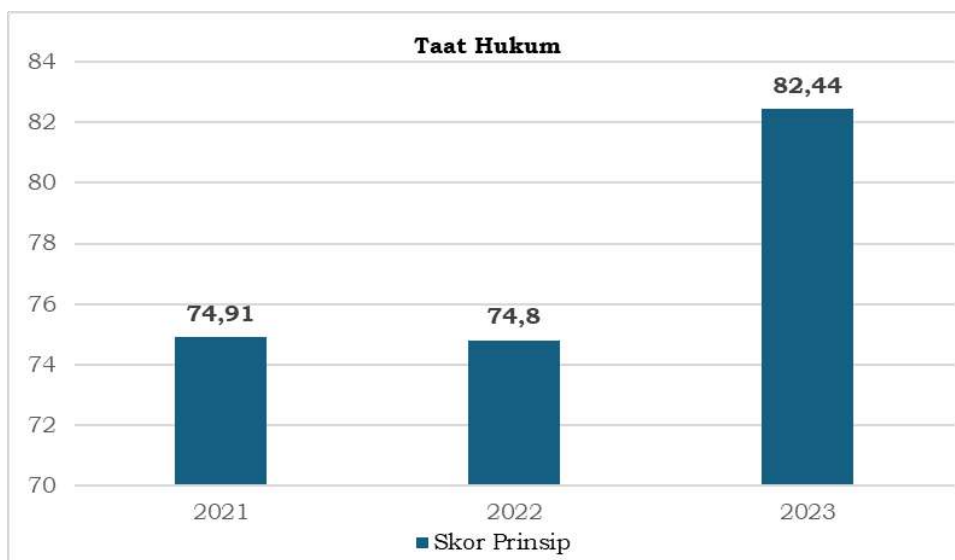
No	Prinsip	Skor Prinsip 2021	Skor Prinsip 2022	Skor Prinsip 2023
1	Taat Hukum	74,91	74,80	82,44
2	Partisipasi	69,75	75,20	82,71
3	Transparansi	72,8	76,70	83,46
4	Akuntabilitas	71,48	75,10	83,07
5	Daya Tanggap	70,57	75,10	82,77
6	Kesetaraan	74,1	74,90	82,5
7	Efektivitas dan Efisiensi	73,2	74,80	82,74
8	Visi Strategis	74,88	75,80	83,41

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat peningkatan skor dari setiap prinsip tata kelola pemerintahan Kabupaten Jombang dari tahun 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, mencerminkan tren positif dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Jombang, dengan peningkatan skor yang konsisten pada setiap prinsip selama periode tiga tahun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola yang baik. Masing-masing prinsip akan dijelaskan pada sub sub bab berikut.

3.6.1 Taat Hukum

Prinsip taat hukum menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan, sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat; kinerja dalam mencegah terjadinya masalah ketertiban umum; kinerja pemda dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah; serta kinerja pemda terhadap pelaku pelanggaran melalui beberapa tindakan. Berikut skor prinsip Taat Hukum di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023.



Gambar 3. 3 Skor Prinsip Taat Hukum di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023

Prinsip Taat Hukum mengalami kenaikan signifikan dari 74,91 pada tahun 2021 menjadi 82,44 pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya peningkatan dalam penegakan peraturan, penguatan sistem hukum, serta upaya edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat. Kenaikan ini juga menunjukkan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan hukum, serta kampanye edukasi publik yang menysasar berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, data ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kolaborasi lintas sektor antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Berikut data berkaitan hukum penegakkan hukum atas beberapa kasus di Kabupaten Jombang.

Tabel 3. 6 Indikator Penegakan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	(%)	100	100	100	80	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	100	100	100	100	100



yang mendapatkan layanan bantuan hukum						
Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas	(%)	94	95,45	93,20	80	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas data memberikan gambaran menarik mengenai perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2019-2023. Secara umum, data menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam penegakan hukum serta pemberian layanan bantuan hukum kepada korban. Secara keseluruhan, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti hingga ke tahap putusan pengadilan cukup tinggi, bahkan mencapai 100% di beberapa tahun. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dari aparat penegak hukum untuk memproses setiap kasus yang dilaporkan atau konsistensi penegakan hukum. Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun secara umum persentasenya cukup tinggi, namun penurunan pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian.

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Jombang dimasing-masing kecamatan kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumber daya hukum rakyat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.



Gambar 3. 4 Penyuluhan Kesadaran Hukum di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Sumber: jdih.jombangkab.go.id, 2024

Tabel 3. 7 Jumlah dan Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	10	11	7	7	6
Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	43,48	61,11	38,89	50	31,58

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, 2024

Dari tabel diatas memberikan gambaran mengenai tren penyelesaian kasus melalui perjanjian bersama (PB) dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023. Penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama sebagai hasil dari perundingan Bipartit atau mediasi merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan (Yuliasuti & Syarif, 2021). Data menunjukkan fluktuasi jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui PB. Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Persentase

tertinggi terjadi pada tahun 2020, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa popularitas penyelesaian melalui PB cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Tabel 3. 8 Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	Kasus	145	142	103	4	21
Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak	Kasus	145	142	103	137	133
Rasio KDRT	Kasus	1.840	73	250	2	1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA Kabupaten Jombang, 2024

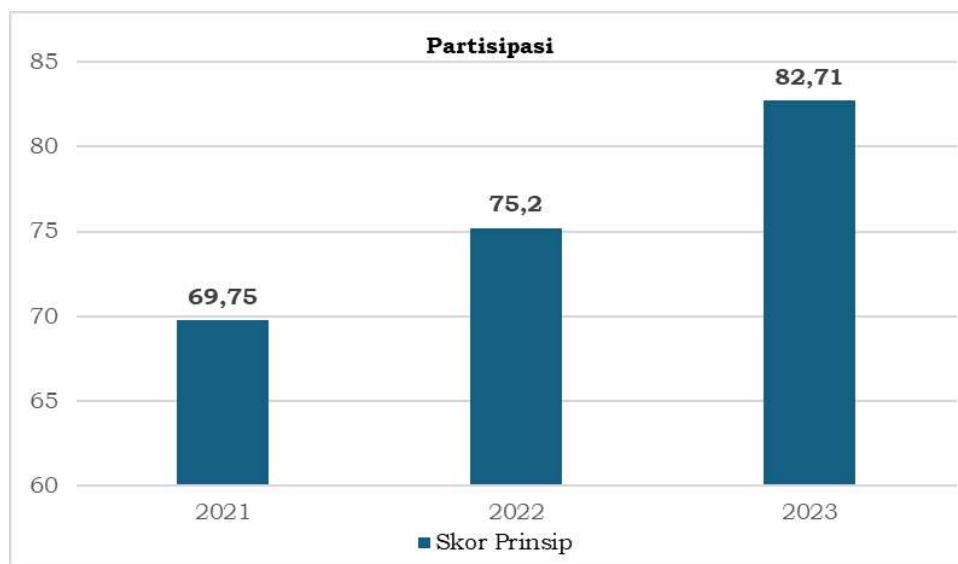
Berdasarkan data tabel diatas memberikan gambaran mengenai tren kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2019-2023. Terdapat penurunan yang sangat signifikan pada jumlah kasus KDRT dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan dan penanganan kasus KDRT.

Secara umum, jumlah kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak cenderung stabil, dengan sedikit penurunan pada tahun 2021, diikuti peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Rasio KDRT menunjukkan fluktuasi yang sangat besar dari tahun ke tahun. Angka rasio yang tinggi pada tahun 2019 dan 2021 mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan dalam metode perhitungan atau definisi KDRT pada tahun-tahun tersebut. Dalam *Women's Crisis Centre (WCC)* Jombang mencatat, ada 45 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan usia korban diatas 18 tahun ada 12 kasus. Sebanyak 33 korban anak-anak (Kusuma, 2024).

3.6.2 Partisipasi

Partisipasi adalah hak kebebasan setiap warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam partisipasi terkait ketersediaan peraturan yang mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan daerah dan perencanaan program pembangunan,

pemanfaatan forum konsultasi perencanaan program pembangunan seperti Musrenbangkab, Musrenbancab, dan Musrenbangdes. Musrenbang adalah proses musyawarah tentang pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di setiap daerah yang akan dilaksanakan pembangunan. Dalam Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka mengenai proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan dan apa yang seharusnya masyarakat lakukan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan (Fadhillah & Tauran, 2016). Berikut skor prinsip partisipasi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023.



Gambar 3. 5 Skor Prinsip Partisipasi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Prinsip Partisipasi juga menunjukkan perkembangan yang baik, dari 69,75 pada tahun 2021 menjadi 82,71 pada tahun 2023, mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbang di Kabupaten Jombang. Pada Maret 2024 Bappeda Kabupaten Jombang mengadakan Musrenbang Kabupaten terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 hingga 2045 di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada bulan Januari 2024 dilaksanakan Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang 2025 di Kecamatan Bareng dihadiri oleh Pj Bupati Jombang, OPD, pemerintah daerah Kecamatan Bareng, dan masyarakat.



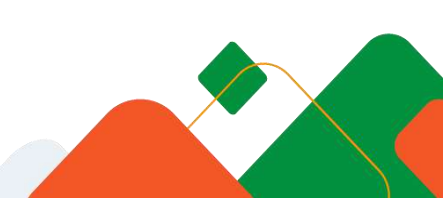
Gambar 3. 6 Musrenbang di Kecamatan Bareng

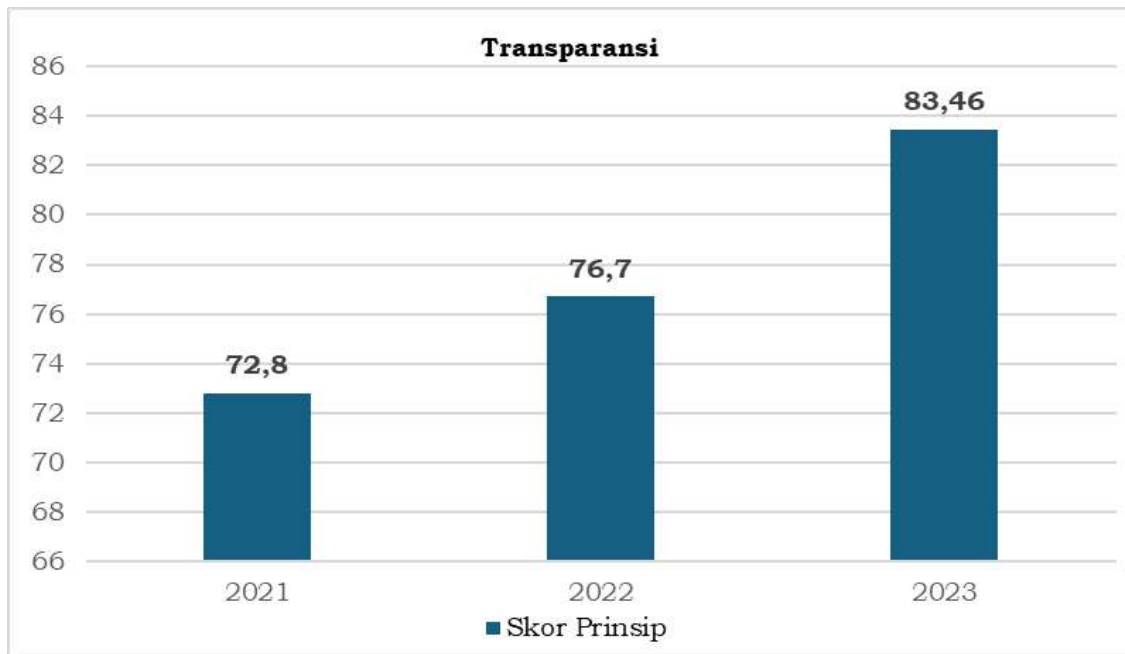
Sumber: dinkopum.jombangkab.go.id, 2024

Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam Musrenbang dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Bareng. Forum musrenbang masyarakat dapat menghasilkan usulan maupun saran-saran untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik.

3.6.3 Transparansi

Keterbukaan informasi tentang tindakan pemerintah kepada masyarakat, yakni informasi yang melibatkan kebijakan publik. Informasi yang dimunculkan kepada masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil dari kebijakan publik.





Gambar 3. 7 Skor Prinsip Transparansi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Prinsip Transparansi mencatat skor tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 83,46, yang menunjukkan peningkatan akses informasi publik. Dilihat dari *website* milik pemerintah daerah pada masing-masing dinas di Kabupaten Jombang yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan kebutuhan pelayanannya. Terdapat pengukuran terkait informasi dan komunikasi publik di pemerintah daerah.

Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik digunakan sebagai pengukuran dan evaluasi sistematis terhadap kebijakan, praktik, dan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam mengelola informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Indeks kematangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan tingkat kehandalan dalam penerapan mekanisme tata kelola tik dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah (Pramesti Cahyani dkk., 2019). Berikut data Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel 3. 9 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019-2023 Kabupaten Jombang



Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)	Rentang (Range)	n/a	n/a	n/a	65,51	66,50
Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK)	Rentang (Range)	n/a	n/a	2,17	3,06	3,22

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan data tabel diatas bahwa kajian IP-IKP dan IK-TIK baru dilakukan tahun 2022 dan 2023. Terdapat peningkatan nilai IP-IKP dari tahun 2022 ke tahun 2023, mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Peningkatan nilai IP-IKP menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengelola informasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat tren peningkatan nilai IK-TIK dari tahun 2021 ke tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Peningkatan nilai IK-TIK mengindikasikan adanya kemajuan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan pembangunan masyarakat digital.

Nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.


Tabel 3. 10 Indikator Indeks SPBE dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Jombang tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Rentang (Range)	1,60	1,60	2,51	2,96	3,49
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jiwa	n/a	419,513	456,32	702,37	692,214

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Jombang selama 2019-2023. Indeks SPBE terus meningkat mengindikasikan



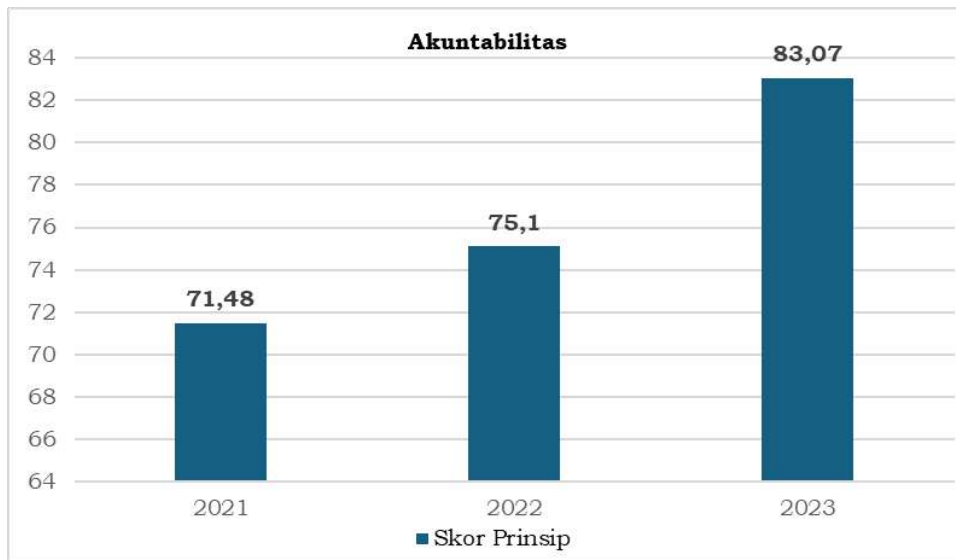


adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat peningkatan yang konsisten pada nilai indeks SPBE dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, laju peningkatan mulai melambat pada tahun 2023.

Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah jiwa yang terlayani dengan informasi rawan bencana dari tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan jumlah jiwa yang terlayani menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi rawan bencana dalam upaya mitigasi risiko. Peningkatan layanan informasi menandakan adanya upaya untuk memperkuat sistem informasi bencana, baik melalui pengembangan *platform* digital maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penurunan sedikit pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan.

3.6.4 Akuntabilitas

Dalam kaitan prinsip akuntabilitas sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya finansial, SDM, sarana, dan prasarana dalam mencapai tujuan dan kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 8 Skor Prinsip Akuntabilitas di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

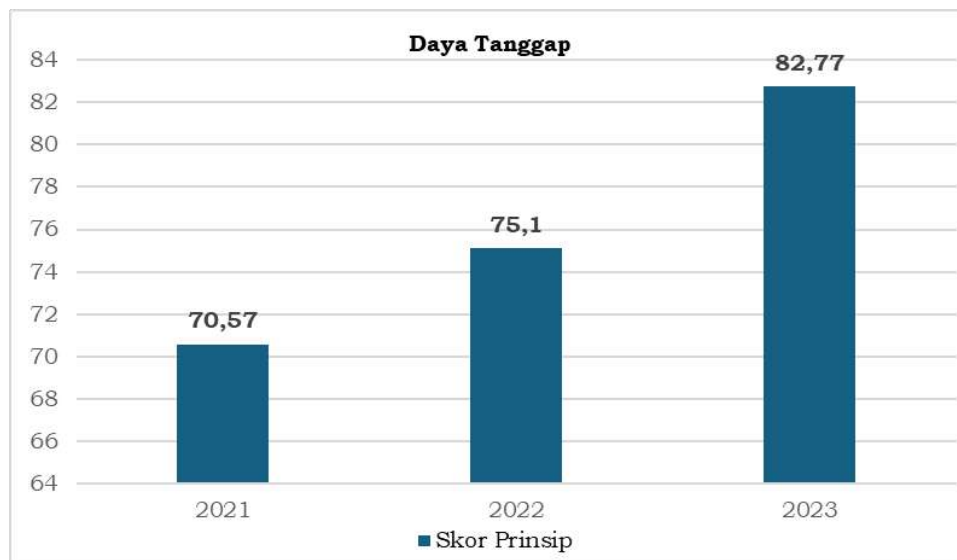
Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan skor prinsip akuntabilitas dari 71,48 pada tahun 2021, menjadi 75,1 pada tahun 2022, dan mencapai 83,07 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat transparansi, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta menerapkan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi. Peningkatan skor yang signifikan pada tahun 2023 menandakan perbaikan sistem pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dan partisipasi masyarakat yang semakin aktif dalam pengawasan kebijakan. Secara keseluruhan, mencerminkan transformasi yang meingkat dalam penerapan prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Dengan mempertahankan tren positif ini, pemerintah memiliki peluang besar untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

Hal tersebut tercermin bahwa Pemkab Jombang pada tahun 2023 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, yang merupakan hasil dari penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 (Hafidz, 2024). Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Jombang, mencerminkan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dukungan yang kuat dari

DPRD terhadap program Kepala Daerah serta keterbukaan Kepala Daerah dalam memberikan ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan-masukan strategis menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini. Dengan raihan WTP, Pemkab Jombang termotivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pengelolaan keuangan sebagai alat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3.6.5 Daya Tanggap

Daya tanggap adalah lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholder*, terutama tanggap terhadap aspirasi seperti keluhan, kritik dan saran *stakeholder* dan masyarakat. Prinsip daya tanggap terkait ketersediaan informasi mengenai mekanisme pengaduan masyarakat, kecepatan Pemda dalam merespon dan menyelesaikan pengaduan, serta kemampuan Pemda dalam menyediakan SDM, sarana dan prasarana guna menindaklanjuti pengaduan.



Gambar 3. 9 Skor Prinsip Daya Tanggap di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan skor prinsip daya tanggap di Kabupaten Jombang dari tahun 2021 hingga 2023, yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, skor daya tanggap berada pada angka 70,57, mencerminkan dasar yang cukup baik

dalam merespons kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kecepatan dan efektivitas pelayanan. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan skor menjadi 75,1, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian keluhan masyarakat. Kemudian, pada tahun 2023, skor melonjak tajam mencapai 82,77, menandakan keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat mekanisme respons yang lebih cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini dapat diasosiasikan dengan penguatan kebijakan berbasis pelayanan prima, penggunaan teknologi untuk mempercepat respons, serta peningkatan kesadaran aparatur pemerintah akan pentingnya mendengarkan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Berikut menjadi data pendukung pengaduan dari pemerintah Kabupaten Jombang.

Tabel 3. 11 Cakupan Penanganan pengaduan dan Reintegrasi Sosial untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019-2023 Kabupaten Jombang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	(%)	100	100	100	100	100
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	100	100	94	11	100

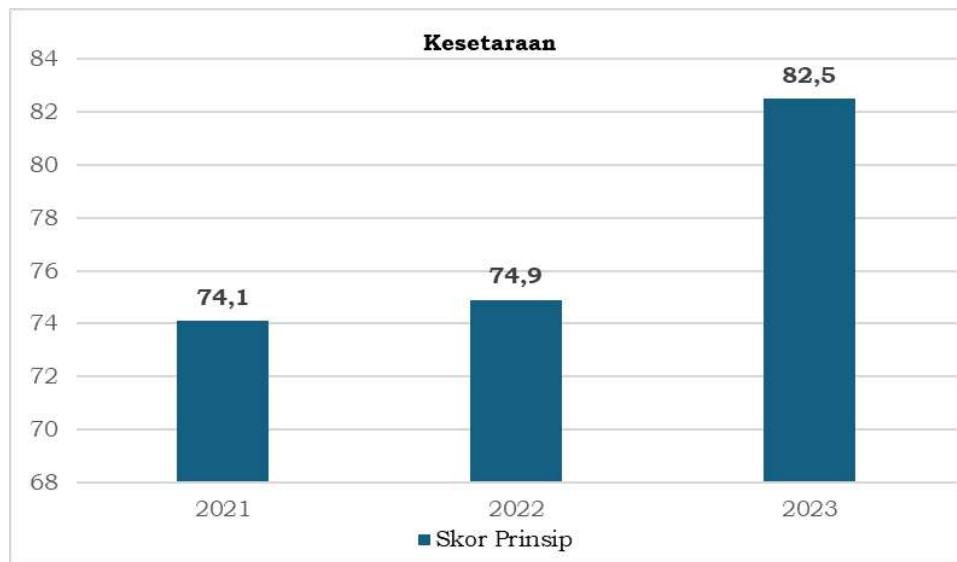
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan tabel mengkaji perkembangan cakupan penanganan pengaduan dan layanan reintegrasi sosial yang diberikan di Kabupaten Jombang. Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mencapai 100%. Angka 100% ini mengindikasikan bahwa semua kasus kekerasan yang dilaporkan telah ditangani oleh petugas yang kompeten. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam memberikan respon cepat

dan tepat terhadap kasus kekerasan. Data menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada cakupan layanan reintegrasi sosial, dengan penurunan yang cukup drastis pada tahun 2022, peningkatan pada tahun 2021, namun diikuti penurunan yang tajam pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memberikan layanan reintegrasi sosial secara konsisten.

3.6.6 Kesetaraan

Kesetaraan adalah semua warga negara, baik laki-laki, perempuan, pemuda, lansia, kelompok difabel, serta kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan hidup. Dalam prinsip kesetaraan berkaitan dengan kebijakan dan implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan, kualitas pelayanan publik, serta penyediaan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai.



Gambar 3. 10 Skor Prinsip Kesetaraan di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Prinsip Kesetaraan mencatat peningkatan dari 74,1 pada tahun 2021 menjadi 82,5 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan layanan yang inklusif untuk seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Berikut data pendukung prinsip berkenaan kesetaraan di Kabupaten Jombang.

Tabel 3. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), SPM bagi perempuan dan anak, dan jumlah organisasi perempuan yang dibina tahun 2019-2023 di Kabupaten Jombang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

Indeks Pembangunan Gender	Poin	9,037	9,015	9,023	9,051	n/a
Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak	Layanan	5	5	5	6	6
Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Organisasi	46	28	33	32	50

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan tabel diatas mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak, serta jumlah organisasi perempuan yang dibina tahun 2019-2023 di Kabupaten Jombang. Nilai IPG mengalami fluktuasi yang relatif kecil, walaupun terdapat tren peningkatan pada tahun 2022. Fluktuasi yang kecil menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pembangunan gender secara keseluruhan relatif stabil. Peningkatan pada tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan dalam beberapa aspek pembangunan gender.

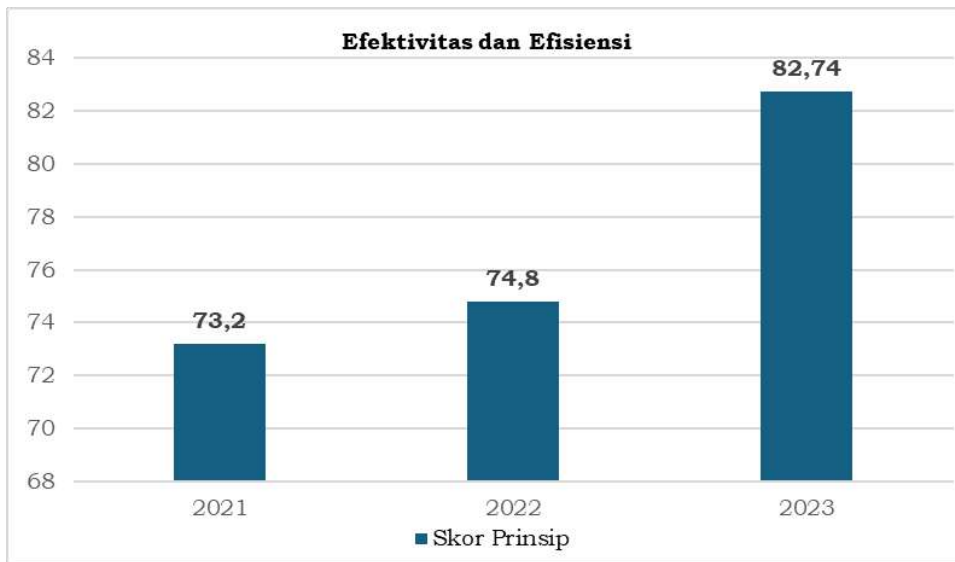
Pada jumlah standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak terjadi peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak. Jumlah organisasi perempuan yang dibina mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023, menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat peran organisasi perempuan dalam advokasi dan pemberdayaan di Kabupaten Jombang.

3.6.7 Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi adalah tercapainya tujuan jangka pendek dan jangka yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, seperti penggunaan biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Prinsip efektivitas dan efisiensi menilai kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan antar OPD, menggali sumber-sumber penerimaan daerah, serta melihat kemampuan pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu sebagai pelayanan terpadu



bagi masyarakat. Berikut skor Prinsip Efektivitas dan Efisiensi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023.



Gambar 3. 11 Skor Prinsip Efektivitas dan Efisiensi di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Prinsip Efektivitas dan Efisiensi masing-masing meningkat menjadi 82,74 pada tahun 2023. Hal mencerminkan tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan efisien dalam pengelolaan pelayanan. Salah satunya dengan adanya ruang Mal Pelayanan Publik (MPP) Jombang.



Gambar 3. 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jombang

Sumber: menpan.go.id, 2024

MPP Jombang terletak di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang dengan terdapat 52 jenis layanan dari 11 instansi. Dengan adanya MPP dapat mengintegrasikan

berbagai jenis pelayanan yang memudahkan masyarakat di Kabupaten Jombang.

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi cerminan dari sudut pandang pengguna layanan terhadap kepuasan dan harapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sedangkan, Indeks Pelayanan Publik memberikan gambaran komitmen penyelenggara pelayanan dalam menerapkan sesuai standar pelayanan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang berada pada tingkat kualitas yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 54 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. IKPP sebagai nilai yang mencerminkan persepsi yang seragam terhadap capaian kualitas pelayanan dan acuan untuk penilaian kualitas pelayanan di seluruh unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Penggunaan IKPP juga direncanakan untuk menjadi dasar pemeringkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penilaian yang diperoleh akan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan kualitas dan efektivitas layanan publik di Pemerintah Kabupaten Jombang. Terlebih lagi kajian penilaian ini telah ditetapkan untuk dikaji setahun sekali dengan hasil indeks sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	7,55	7,13	7,83
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,16	83,17	84,47	86,71	88,38
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,52	3,37	3,33	3,63	3,39

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Jombang, 2024

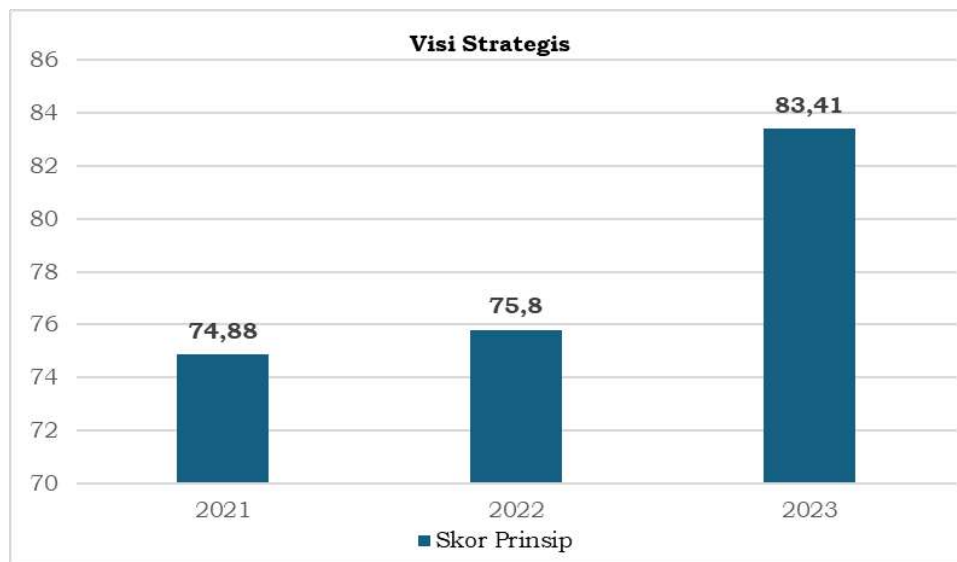
Berdasarkan tabel diatas perkembangan kualitas pelayanan publik dalam 2019-2023. Data indeks kualitas pelayanan publik baru tersedia mulai tahun 2021. Nilai indeks mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan

adanya upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang terus dilakukan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Tren peningkatan yang konsisten pada indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat.

Pada indeks pelayanan publik terjadi trend peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 setelah mencapai puncak pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan publik, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,24.

3.6.8 Visi Strategis

Visi strategis menjadi gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan suatu daerah. Berikut skor Prinsip Visi Strategis di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023.



Gambar 3. 13 Skor Prinsip Visi Strategis di Kabupaten Jombang tahun 2021-2023

Prinsip Visi Strategis mencapai 83,41 pada tahun 2023, mencerminkan perbaikan dalam penyusunan dan penyampaian visi pembangunan jangka panjang pemerintah dalam rentan tahun. Di Kabupaten Jombang terdapat RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) tahun 2024-2026 sebagai arahan visi strategisnya. RPD tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Pejabat Sementara (Pj.) Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jombang. Muatan dari RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pada BAB V adalah Tujuan Pembangunan



Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 4 poin, sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik
- **Tujuan 2:** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing
- **Tujuan 3:** Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
- **Tujuan 4:** Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya

Upaya mendukung Tujuan pertama “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik” ukuran kinerja dilakukan dengan “*Index Good Governance*” (IGG). Sasaran sebagai pendukung ICG ini adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”. Selanjutnya sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran daerah sebagai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Penentuan Jenis Data Bagi Pengukuran Indikator Pelaksanaan *Good Governance*

Pihak-pihak yang diukur berasal dari internal organisasi atau eksternal, seperti yang disebutkan dalam terminologi UNDP sebagai *internal perception* dan *external perception*. Landasan untuk menentukan pihak secara spesifik untuk digali sumber datanya melalui narasumber dan responden yang akan ditentukan menggunakan Teori “*Enable Sector*”.



Gambar 4. 1 Teori *Enable Sector*

Dari gambar diatas, dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu memperhatikan tiga aspek, yakni (*Civil Society*, *Private Sector*, dan *Public Sector*). Teori ini melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pembangunan internasional untuk pembangunan di suatu negara. Hal ini menciptakan peluang besar bagi semua pihak yang terlibat untuk melangkah lebih jauh dari sekadar tanggung jawab sosial perusahaan dan menganalisis bagaimana masing-masing pihak dapat terlibat dalam dinamika penilaian birokrasi dan sistem pemerintahan secara lebih komprehensif, *up to date*, dan berbasis data (Wetter, 2019).



Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel yang akan diteliti, karena rumus ini efektif dalam mengukur ukuran sampel yang diperlukan. Berikut adalah ukuran sampel yang akan diteliti:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Nilai kritis (batas kesalahan) yang diinginkan adalah 5%

Dari rumus tersebut, diperoleh angka sebagai berikut:

$$n = \frac{1.370.510}{1 + 1.370.510 \cdot (0,05)^2}$$

$$n = \frac{1.370.510}{1 + 1.370.510 \cdot 0,0025}$$

$$n = \frac{1.370.510}{1 + 342.627,5}$$

$$n = \frac{1.370.510}{343.628,5}$$

$$n = 399,988$$

Jumlah sampel yang digunakan, setelah dibulatkan, adalah sebanyak 400 responden. Teknik operasional untuk pengambilan sampel dilakukan dengan memilih beberapa responden setiap hari selama tiga minggu, sesuai dengan kesepakatan antara enumerator dengan para responden yang telah terpilih. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *Stratified Random Sampling*. *Stratified Random Sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan. Dari setiap strata, sampel diambil secara acak. Metode ini memastikan bahwa setiap strata terwakili dalam sampel, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan untuk analisis.

Data yang digunakan dalam kajian Indeks *Good Governance* adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan antara lain:



1. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang dibagi menjadi tiga sektor, yakni dari **Internal**, yang terdiri dari **Sektor Publik** (Kecamatan, Badan, Dinas, BUMD, RSUD dan Fasilitas Kesehatan lainnya) sejumlah 200 orang. Sedangkan untuk sumber data **Eksternal**, terdiri dari **Sektor Privat** (Bank, Koperasi, Rumah Sakit Swasta, Universitas, serta pengusaha) sejumlah 100 orang, dan **Sektor Masyarakat Sipil** (Organisasi masyarakat, Media, Komunitas, dan Pondok Pesantren) sejumlah 100 orang, sehingga total responden dan narasumber yang akan dikumpulkan dan diolah datanya berjumlah 400 orang.
2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, pendidikan, kelompok umur, dan pekerjaan.
3. Karakteristik Responden yang terdiri atas data domisili, jenis pekerjaan, usia, pendidikan, agama, dan status pernikahan.

4.2 Model Pengukuran Pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintah Daerah

Pengukuran implementasi *good governance* di Pemerintah Daerah dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan secara maksimal apabila aspek-aspek terkait pengukuran tersebut mendukung dengan optimal juga. Ketidaktepatan dalam salah satu aspek bisa menyebabkan bias atau penyimpangan dari kondisi sesungguhnya di lapangan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dianggap berperan penting dalam menjamin kualitas hasil pengukuran perlu diperhatikan dan dirumuskan dengan seksama.

Sebagai model pengukuran, beberapa aspek harus dirancang dan dirumuskan secara hati-hati untuk memastikan kualitas pengukuran yang dijamin. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Aspek Kerangka Hukum
2. Aspek Perancangan Sistem Pengukuran:
 - a. Penetapan Alat/Instrumen Pengukuran
 - b. Pengembangan standar penilaian
 - c. Pengembangan instrumen pengendalian dan tindak lanjut penilaian

3. Aspek Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengukuran:

- a. Tahapan persiapan
- b. Pelaksanaan pengukuran
- c. Evaluasi dan Pelaporan

4.3 Penetapan Alat Instrumen Pengukuran

Alat pengukuran adalah rincian dari indikator-indikator yang akan diukur. Sesuai dengan yang telah disepakati dalam Bab 3, model pengukuran ini mencakup 8 dimensi atau prinsip yang diukur melalui 16 indikator. Untuk mengoperasikan indikator-indikator tersebut ke dalam pengukuran, dibuatlah instrumen pengukuran berupa Kuesioner Survei Pengukuran Pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pernyataan yang menggunakan skala penilaian dari 1 hingga 6 atau biasa disebut dengan istilah skala likert. Skala Likert adalah alat yang sering digunakan dalam survei untuk mengukur sikap atau opini. Skala 6-titik seringkali memberikan hasil yang lebih jelas dan terstruktur, yang menunjukkan validitas yang lebih baik dalam mencerminkan dimensi yang diukur (Chang, 1994).

Skala ini dipilih karena diyakini dapat mencerminkan variasi dalam pandangan responden. Skala Likert 6 poin cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dalam hal struktur faktor, diskriminasi, dan reliabilitas dibandingkan dengan skala 5 poin (Chomeya, 2010). Angka 1 menunjukkan penilaian terendah, sementara angka 6 menunjukkan penilaian tertinggi. Penafsiran skala ini adalah sebagai berikut:

- Skala 1: Pelaksanaan *good governance* dalam dimensi prinsip dan indikator sangat tidak memadai.
- Skala 6: Pelaksanaan *good governance* dalam dimensi prinsip dan indikator sangat memadai.

Instrumen pengukuran pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah dirancang dalam bentuk kuesioner sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Instrumen (Kuesioner) Pengukuran Pelaksanaan IGG di Pemerintahan Daerah

PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai						
			1	2	3	4	5	6	
	1. Kecukupan Peraturan	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan							



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
Taat Hukum (Rule of Law)		peraturan untuk mengatur 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	2. <i>Reward and Punishment</i>	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>Reward and Punishment</i> (Penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	3. Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui 4 wadah berikut: a. Media Cetak b. Media Elektronik c. Pertemuan Formal d. Pertemuan Kultural						
	4. Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah ketertiban umum?						
	5. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui wadah sebagai berikut: a. Media Cetak b. Media Elektronik c. Pertemuan Formal d. Pertemuan Kultural						
	6. Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan tindakan						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
	Pelanggaran Hukum	terhadap pelaku pelanggaran hukum dibawah ini: a. Tindakan persuasif b. Tindakan melalui pemberian surat peringatan c. Tindakan melalui proses pengadilan d. Tindakan melalui eksekusi hasil keputusan pengadilan						
	7. Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	8. Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan	Berapa nilai yang anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada 4 kelompok berikut: a. Kelompok Perempuan b. Kelompok Anak c. Kelompok Disabilitas d. Kelompok Minoritas						
	9. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek taat hukum (<i>Rule of Law</i>)?						
Partisipasi	1. Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?						
	2. Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok tertentu dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup dalam 4 bidang berikut: a. Kelompok Agama b. Kelompok Usia c. Jenis Kelamin d. Golongan						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
	3. Mengakomodir Keterlibatan Kelompok Dalam Perencanaan Program Pembangunan	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok tertentu dalam Perencanaan Program Pembangunan pada 4 kelompok berikut: a. Kelompok Agama b. Kelompok Usia c. Jenis Kelamin d. Golongan						
	4. Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi dalam penyusunan kebijakan dalam 4 hal berikut: a. Musrenbangkab b. Musrenbangcam c. Musrenbangdes d. KonsultasiFormal/informal						
	5. Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat	Berapa nilai yang Anda berikan atas keberadaan media sebagai penyalur aspirasi masyarakat? a. Media massa lokal b. Media massa nasional						
	6. Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Media? a. Media Cetak dan Elektronik b. Media Sosial c. Call Center d. Posko pengaduan di wilayah masing-masing						
	7. Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui media? a. Media Cetak b. Media Elektronik c. Sosialisasi Formal						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai						
			1	2	3	4	5	6	
	8. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek partisipasi?							
Transparansi	Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada level: a. Peraturan Nasional b. Peraturan Daerah/Bupati							
	2. Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses masyarakat melalui 4 media berikut: a. Fasilitas <i>Website</i> b. Media Sosial (FB, Instagram, TikTok) c. <i>Call Center</i> d. Posko pengaduan di wilayah masing-masing							
	3. Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui 4 berikut: a. Media <i>Website/Videotron</i> b. Radio c. Sosial Media d. Pusat Layanan Informasi							
	4. Informasi Pelayanan	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan 4 hal tersebut: a. Catatan Kependudukan (KTP, KK dan Akte)? b. Bantuan Sosial c. Perizinan d. Layanan pengaduan masyarakat							
	5. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek transparansi?							
Akuntabilitas	1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan							



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
		<p>masyarakat di 4 bidang berikut:</p> <p>a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>b. Bidang Infrastruktur</p> <p>c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum</p> <p>d. Bidang Ekonomi</p>						
	2. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	<p>Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di 4 bidang sebagai berikut:</p> <p>a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>b. Bidang Infrastruktur</p> <p>c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum</p> <p>d. Bidang Ekonomi</p>						
	3. Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat	<p>Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam 4 bidang berikut:</p> <p>a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>b. Bidang Infrastruktur</p> <p>c. Bidang Sosial, Politik dan Hukum</p> <p>d. Bidang Ekonomi</p>						
	4. Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	<p>Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah dalam 4 bidang berikut:</p> <p>a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>b. Bidang Infrastruktur</p> <p>c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum</p> <p>d. Bidang Ekonomi</p>						
	5. Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran	<p>Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?</p>						
	6. Kinerja Aparat Pemerintah	<p>Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja</p>						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
		aparat pemerintah dalam 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	7. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek akuntabilitas?						
Daya tanggap	1. Ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui 3 media berikut: a. Telepon/Sms/WhatsApp b. Website c. Media Sosial						
	2. Kecepatan pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	3. Penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemda	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam 4 bidang berikut a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	4. Penyediaan SDM, sarana, dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana, dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
		c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	5. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek daya tanggap?						
Kesetaraan	1. Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	2. Implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan pada 4 bidang berikut: a. Bidang pendidikan dan kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	3. Kualitas pemberian pelayanan publik dari pemda	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	4. Peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, dan anggaran) yang memadai	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, dan anggaran) yang memadai pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai						
			1	2	3	4	5	6	
		b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi							
	5. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek kesetaraan?							
Efektivitas dan Efisiensi	1. Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi							
	2. Kemampuan pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah?							
	3. Kemampuan pemda dalam melakukan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> untuk efisiensi pembangunan pada 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi							
	4. Kemampuan pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu							
	5. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek efektivitas dan efisiensi?							
	Visi strategis	1. Kemampuan arah rencana	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam						



PRINSIP	INDIKATOR	PERTANYAAN	Tabel Nilai					
			1	2	3	4	5	6
	pembangunan daerah	merumuskan ke-empat tujuan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Jombang?						
	2. Langkah strategis pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	3. Program dan kegiatan pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	4. Program dan kegiatan pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di 4 bidang berikut: a. Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Bidang Infrastruktur c. Bidang Sosial, Politik, dan Hukum d. Bidang Ekonomi						
	5. <i>Open question</i>	Apa saran dan masukan anda terkait aspek Visi strategis?						

4.4 Standar Penilaian Indeks *Good Governance*

Tujuan utama dari penetapan standar adalah untuk menyediakan dasar yang jelas dalam menetapkan nilai hasil pengukuran. Standar ini digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah hasil pengukuran sudah memenuhi standar yang diharapkan atau tidak. Penetapan standar



sebaiknya mengacu pada nilai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, jika tidak ada standar yang tersedia, penetapan standar sebaiknya dilakukan melalui proses kesepakatan bersama. Jika kedua pendekatan sebelumnya tidak memungkinkan, ada pendekatan lain yang sering digunakan dalam penelitian perilaku yaitu dengan mengonversi capaian nilai ke dalam skala persentase maksimum (ideal) 100%. Skala penilaian yang digunakan adalah skala semantik, mulai dari sangat tidak memadai hingga sangat memadai (skor 1 hingga 6).

Angka-angka ini memberikan informasi yang relatif dan dibandingkan dengan standar nilai. Hal ini memungkinkan untuk perbandingan baik dalam jangka waktu tertentu (longitudinal) maupun antara nilai indeks *good governance* pada tahun yang sama (antar Pemerintah Daerah atau *cross-sectional*). Untuk memberikan interpretasi kualitatif terhadap nilai indeks *good governance* ini, diperlukan penafsiran terhadap pengukuran pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah (IGG). Adapun standar pengembangan penilaian pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah dalam model ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Standar Penilaian Indeks Good Governance

Rentang Nilai IGG	Keterangan
$0 \leq \text{IGG} \leq 1,9$	Pelaksanaan GG "Sangat kurang"
$2 \leq \text{IGG} \leq 2,9$	Pelaksanaan GG "kurang"
$3 \leq \text{IGG} \leq 3,9$	Pelaksanaan GG "Sedang"
$4 \leq \text{IGG} \leq 4,9$	Pelaksanaan GG "Baik"
$5 \leq \text{IGG} \leq 6$	Pelaksanaan GG "Sangat baik"

Skala diatas nantinya akan dikonversi menjadi nilai 1-100 sesuai dengan standar nilai penilaian "Indeks *Good Governance*" pada tahun-tahun sebelumnya. Standar 1-6 akan memudahkan bagi para responden untuk menentukan preferensi jawabannya sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

4.5 Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Tindak Lanjut Penilaian

Instrumen pengendalian dan tindak lanjut penilaian merupakan komponen yang harus dibangun dalam model pengukuran pelaksanaan prinsip *good governance* di Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari instrumen



ini adalah untuk memperkuat dan, jika perlu, mengubah perilaku dalam pelaksanaan prinsip *good governance*. Instrumen pengendalian berfungsi sebagai penguat ketika pelaksanaan prinsip *good governance* di Pemerintah Daerah sudah baik. Pentingnya penghargaan harus diberikan kepada pencapaian yang optimal atau memadai, sementara teguran sesuai ketika hasilnya belum mencapai standar yang diharapkan. Dengan instrumen yang dikembangkan ini, diharapkan hasil pengukuran pelaksanaan prinsip *good governance* di Pemerintah Daerah dapat terhubung dengan upaya untuk memperkuat dan/atau mengubah perilaku yang diperlukan.

4.6 Penyusunan Pedoman Pengukuran

Pedoman pengukuran ini merujuk pada prosedur yang harus diikuti ketika menerapkan sistem pengukuran di lapangan. Penyusunan pedoman pengukuran bertujuan untuk membimbing implementasi model pengukuran tersebut. Oleh karena itu, pedoman pengukuran akan mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengukur pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah.


Secara umum, pedoman pengukuran menguraikan tiga tahapan yang harus dilalui dalam melakukan survei pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah:

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, langkah-langkah yang diperlukan meliputi:

1. Identifikasi daerah-daerah yang akan menjadi objek pengukuran.
2. Persiapan bahan, seperti kuesioner Survei Pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintah Daerah.
3. Penetapan responden.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diperlukan penetapan populasi dan sampel penelitian. Populasi merujuk pada wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Jika populasi sangat besar dan tidak memungkinkan untuk mempelajari semua anggota populasi karena



keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel yang representatif dari populasi tersebut. Hasil penelitian dari sampel ini kemudian diberlakukan untuk populasi secara umum.

B. Tahap Pelaksanaan Pengukuran

Dalam tahap pelaksanaan pengukuran, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data: Pada tahap ini, ditentukan strategi untuk mendistribusikan dan mengumpulkan kembali instrumen survei. Pendistribusian instrumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui link survei Google atau kunjungan langsung (*door to door*).
- 2) Pengisian kuesioner: Responden dapat mengisi kuesioner secara mandiri atau dibantu oleh tim pelaksana pengukuran atau enumerator.
- 3) Pengolahan data: Tahapan ini melibatkan pengolahan instrumen atau kuesioner yang telah diisi oleh responden.

C. Tahap Evaluasi dan Laporan

Tahapan akhir dalam Survey Pengukuran Pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah meliputi evaluasi dan pelaporan. Dalam tahap evaluasi, tim yang bertanggung jawab mengevaluasi seluruh proses pengukuran mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan. Di sisi lain, dalam tahap pelaporan, tim peneliti menyusun laporan hasil survei mengenai pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah. Jika survei dilakukan secara berkala, laporan juga dapat disusun secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4.7 Rekomendasi Kegiatan Statistik

Kajian mengenai Indeks *good governance* ini termasuk ke dalam kegiatan statistik karena melibatkan analisis data statistik dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data melalui survei dengan menyebarkan kuesioner di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi dari pihak yang berwenang, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. Data dalam studi ini dikumpulkan melalui 3 metode yaitu:



4.7.1 Studi Literatur

Tujuan dari studi literatur adalah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan konsep IGG yang relevan dengan situasi di Pemerintah Kabupaten Jombang. Literatur ini berasal dari dokumen-dokumen internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Jombang. Dokumen internal tersebut mencakup:

- 1) RPD Kabupaten Jombang Jombang 2024-2026
- 2) Hasil Kajian IGG Kabupaten Jombang 2021, 2022, dan 2023
- 3) Peraturan Bupati Tentang Program Jombang “Berkadang” 2019
- 4) Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2023
- 5) WTP/Laporan Keuangan Pemkab Jombang 2023
- 6) Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023

Dokumen-dokumen ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen studi, analisis, dan penyusunan rekomendasi.

4.7.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan melalui diskusi informal dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai situasi serta konteks tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jombang. Semua responden merupakan pihak dari internal dan eksternal yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dari sana, dibagi menjadi 3 sektor, yakni publik (4 narasumber), privat (4 narasumber), dan *civil society* (3 narasumber) sehingga total narasumber yang diwawancarai berjumlah 10 orang. Tujuannya adalah untuk menggali pandangan dari para aktor kunci dalam pelaksanaan IGG yang tidak bisa terkuantifikasi/hal-hal yang tidak cukup hanya dijelaskan dengan angka-angka saja.

Dalam wawancara mendalam ini, informan diminta untuk menjawab tiga pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan sebagai berikut:

1. Se jauh mana implementasi 8 variabel Indeks *good governance* di Kabupaten Jombang?
2. Apa saja kemudahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi Bapak/Ibu dalam mendukung dan turut berpartisipasi aktif

di Kabupaten Jombang dalam pencapaian *good governance* (8 variabel)?

3. Apa saja pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang?

Informan diharapkan memberikan jawaban yang sesuai dengan realitas lapangan. Pewawancara akan mengeksplorasi lebih dalam dan melakukan triangulasi ketika terdapat jawaban yang berbeda atau unik, tetapi tetap mengacu pada hasil survei.

4.7.3 Survei Internal dan External Pemkab Jombang

Populasi dan sampel survei IGG mencakup organisasi pemerintah (*Public Sector*), masyarakat sipil, dan sektor swasta/pelaku ekonomi (*Private Sector*) yang beroperasi di Kabupaten Jombang. Penggunaan organisasi sebagai populasi ini dipilih untuk konsistensi dengan penilaian tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Bappenas. Survei akan dilakukan secara *online* melalui *platform* “Google Form” yang disediakan.

Tabel 4. 3 Organisasi Target Sampel Survei Indeks Good Governance Kabupaten Jombang 2024

No	Organisasi	Jumlah di Kabupaten Jombang	Sumber	Penjelasan
1	Kecamatan	21	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Dari 21 kecamatan yang ada, 40 orang menjadi responden
2	Badan	6	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Dari 6 Badan yang ada, 40 orang menjadi responden
3	Dinas	21	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Dari 21 dinas yang ada, 40 orang menjadi responden
4	BUMD	4	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Dari 4 BUMD yang ada, 40 orang menjadi responden
5	RSUD dan Fasilitas Kesehatan	35	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024 RSUD: 2 Puskesmas:33 Data ini diperoleh dari DINKES (Dinas Kesehatan) Kabupaten Jombang 2024	Dari 35 RSUD dan Puskesmas yang ada, 25 orang menjadi responden. Sementara Poliklinik dan Rumah sakit bersalin, dan rumah sakit swasta tidak menjadi responden.
6	Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya	275	https://sambang.jombangkab.go.id/front/data/572-ormas-dan-lsm	Dari 275 ormas yang ada, 20 orang menjadi responden



No	Organisasi	Jumlah di Kabupaten Jombang	Sumber	Penjelasan
	Masyarakat (LSM)			
7	Media	21		Dari 21 media yang ada, 25 orang menjadi responden
8	Komunitas	N/A	N/A	25 menjadi responden
9	Pondok Pesantren	216	Pondok pesantren di Kabupaten Jombang berizin Kemenag berdasarkan https://kemenagkabjombang.my.id/data-pondok/	25 menjadi responden
10	Bank	70	Kabupaten Jombang terdiri dari 70 kantor bank terdiri dari 8 KC dan 62 KCP berdasarkan Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Dari beberapa dipilih 10 Bank baik KC dan KCP. 20 orang menjadi responden.
11	Koperasi	877	877 koperasi dalam binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam https://jombangkab.go.id/opd/dinkopum/pages/data-koperasi-tahun-2024	Dari 877 koperasi dipilih 10 koperasi. 20 menjadi responden.
12	Rumah Sakit Swasta dan Klinik	34	Klinik: 21 Rumah sakit swasta: 13 Data diperoleh dari https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/dashboard_rs	Dari 13 rumah sakit swasta dipilih 10 dan dari 12 klinik 2 klinik. 20 menjadi responden.
13	Perguruan Tinggi	22	Data perguruan tinggi didapatkan dari referensi kemendikbud https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikti/	Dari 22 dipilih 10 perguruan tinggi di Jombang. 20 diantaranya menjadi responden.
14	Pengusaha	19.885	Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024	Responden dipilih 20 pengusaha terbagi dalam pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
Total sampel target		1.621.885		400 responden

Setiap organisasi ditargetkan untuk mengisi sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan dengan cara diberikan tautan daring untuk mengisi kuesioner melalui *platform* tautan Google Form berikut <https://bit.ly/Survei-IGG-Jombang-2024> atau dengan cara wawancara mendalam secara langsung. Survey *online* dan wawancara yang mendalam ini bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin organisasi target meskipun dengan keterbatasan sumber daya seperti biaya, tenaga kerja, dan waktu. Bappeda

bertanggung jawab dalam mengirimkan surat pemberitahuan dan undangan survei kepada organisasi target untuk meningkatkan tingkat respon. Sementara itu, dinas terkait membantu dalam memotivasi dan mengingatkan pengisian survei kepada organisasi yang relevan. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan mendorong survei ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Bakesbangpol memfasilitasi survei ke organisasi kemasyarakatan, dan Dinas Koperasi mengarahkan survei ke koperasi.

Para peneliti juga melakukan kunjungan ke beberapa responden untuk memastikan kelancaran proses survei. Kunjungan yang dilakukan secara langsung akan menggunakan metode *deep interview* untuk menggali data-data kualitatif dari para narasumber secara mendalam untuk melengkapi dari data kuantitatif yang telah disebarluaskan melalui Google Form. Tujuannya supaya hasil kajian lebih komprehensif dan menyeluruh. Dalam survei secara *online*, responden memberikan tanggapan dan menilai komponen tata kelola pemerintahan berdasarkan diskusi, persepsi, dan pengalaman mereka di organisasi masing-masing. Sedangkan pada pertanyaan *deep interview* secara lebih intens akan melengkapi dari narasumber yang tidak bisa di kuantifikasi dengan angka.

Dengan demikian, setiap respons dianggap merepresentasikan pandangan dalam lingkungan organisasi tersebut. Nilai yang dapat diberikan oleh responden berkisar antara 1-6 untuk survei *online* yakni 1 untuk sangat kurang, dan poin 6 bermakna sangat baik. Di akhir penilaian atas setiap prinsip *good governance* yang dievaluasi, responden memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian yang mereka berikan.

Timeline pengerjaan kegiatan Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang 2024:

Tabel 4. 4 Tabel *Timeline* Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang 2024

	Agustus				September				Oktober				November			
	Pekan				Pekan				Pekan				Pekan			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Perencanaan/Persiapan																



	Agustus				September				Oktober				November			
	Pekan				Pekan				Pekan				Pekan			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penyusunan Laporan Pendahuluan																
Pemaparan Laporan Pendahuluan																
Survei Lapangan																
Analisis Data																
Penyusunan Laporan Akhir																
Pemaparan Laporan Akhir																
Penyerahan Laporan Akhir																



BAB V

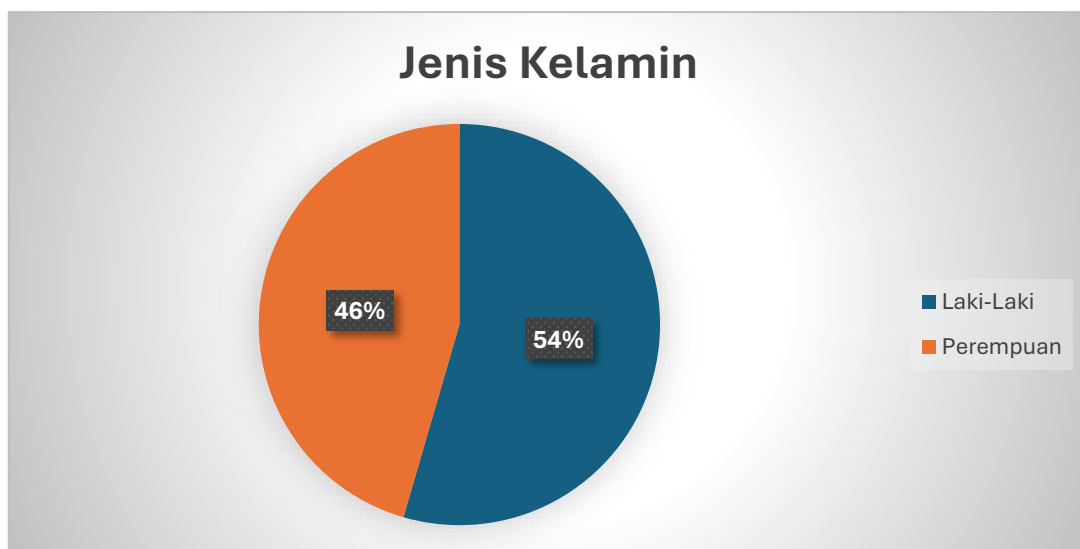
HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

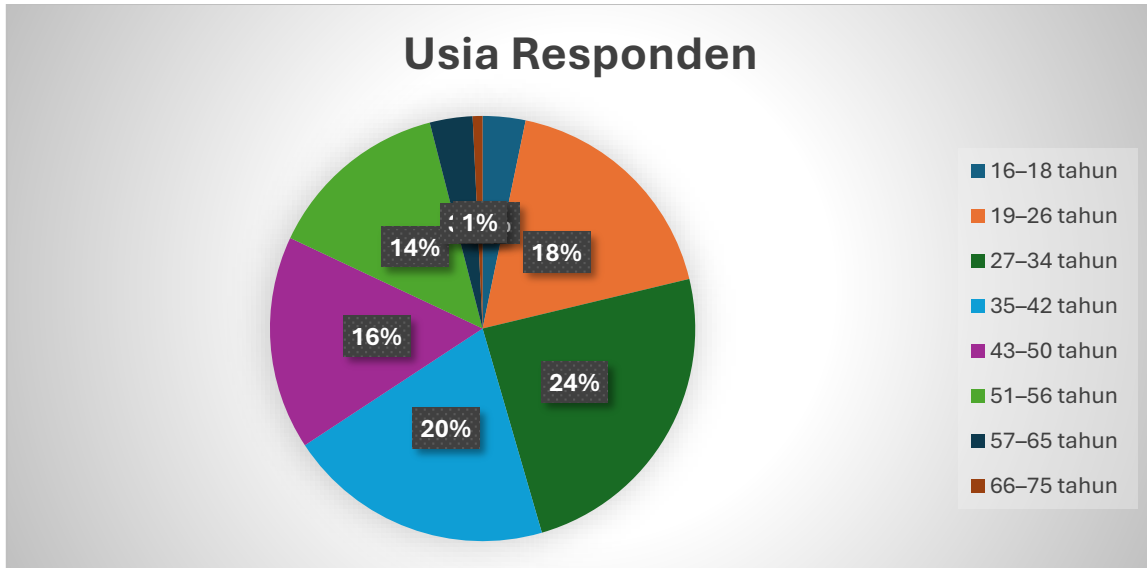
5.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh masyarakat Kabupaten Jombang sebanyak 400 jiwa yang berusia 15-64 tahun dan tersebar di seluruh kecamatan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui *Google Form* yang dibagikan melalui link <https://bit.ly/Survei-IGG-Jombang-2024>. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 218 laki-laki dan 182 perempuan, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

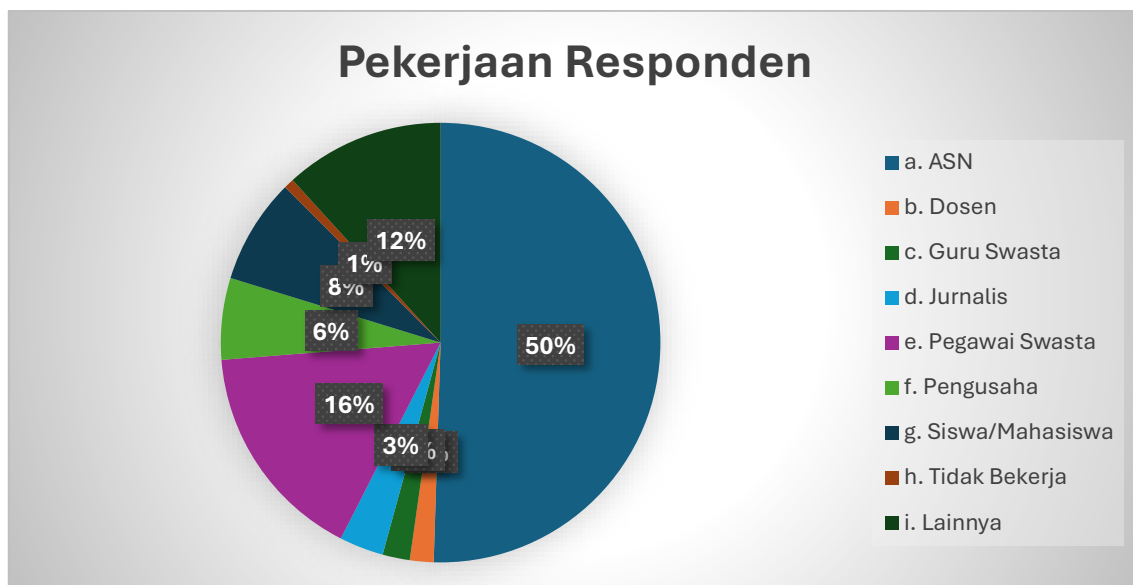
Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 218 laki-laki dan 182 perempuan, seperti ditampilkan pada gambar diatas. Berikut karakteristik responden berdasarkan kelompok umur.



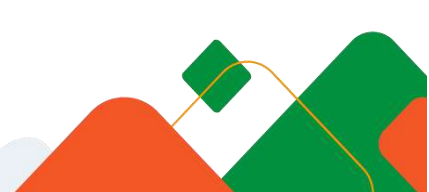
Gambar 5. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan kelompok umur terbagi menjadi:

- a. 16-18 tahun, sebanyak 13 orang
- b. 19-26 tahun, sebanyak 72 orang
- c. 27-34 tahun, sebanyak 97 orang
- d. 35-42 tahun, sebanyak 81 orang
- e. 43-50 tahun, sebanyak 65 orang
- f. 51-56 tahun, sebanyak 56 orang
- g. 57-65 tahun, sebanyak 13 orang
- h. 66-75 tahun, sebanyak 3 orang

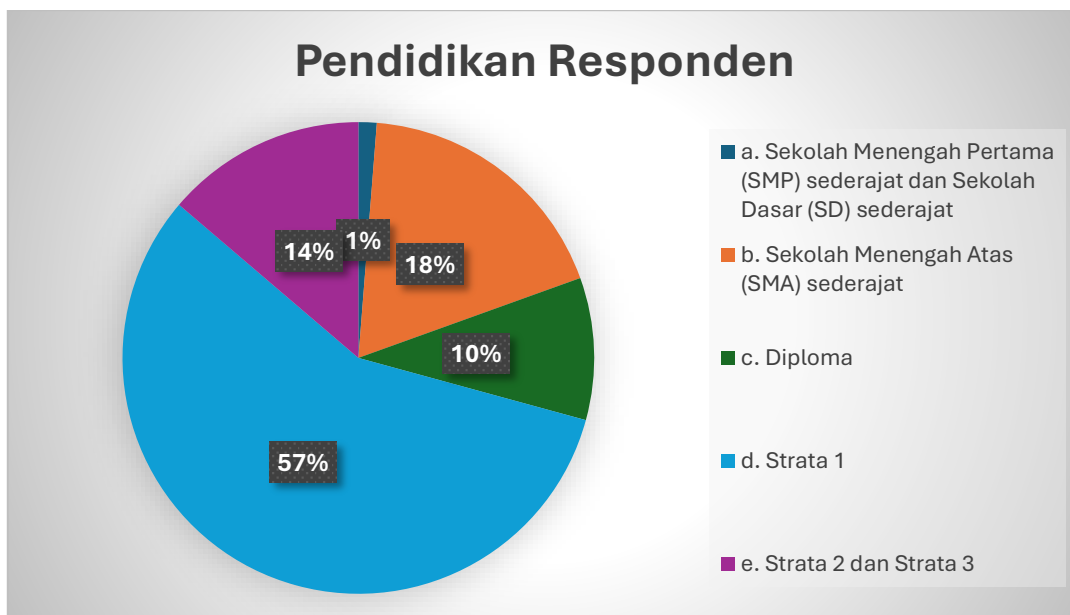


Gambar 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Pada kuesioner yang diberikan, responden juga diminta untuk mencantumkan jenis pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, karakteristik pekerjaan responden adalah sebagai berikut:

- a. ASN: 200 orang
- b. Dosen: 7 orang
- c. Guru Swasta 8 orang
- d. Jurnalis: 13 orang
- e. Pegawai Swasta: 65 orang
- f. Pengusaha: 24 orang
- g. Siswa/Mahasiswa: 31 orang
- h. Tidak Bekerja: 3 orang
- i. Lainnya: 49 orang



Gambar 5. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Jika dilihat dari sisi Pendidikan karakteristik responden dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan Sekolah Dasar (SD) sederajat, sejumlah 5 orang
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, sejumlah 73 orang
- c. Diploma, sejumlah 39 orang
- d. Strata 1, sejumlah 228 orang
- e. Strata 2 dan Strata 3, sejumlah 55 orang

5.2 Penilaian Responden pada Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Kabupaten Jombang

Pengukuran pelaksanaan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Kabupaten Jombang mendasar pada penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan asas umum penyelenggaraan negara dan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sejumlah delapan prinsip yang menjadi acuan dalam menentukan Indeks *Good Governance*. Kedelapan dimensi tersebut memiliki 41 indikator yang digunakan dalam penelitian. Pada setiap indikator merupakan pertanyaan penilaian dengan rentang nilai satu sampai dengan enam untuk jawaban yang dianggap paling sesuai terhadap pelaksanaan di Kabupaten Jombang.

Setelah dilakukan penilaian dan pengolahan data, didapatkan hasil bahwa nilai Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang sebesar 83,26. Nilai ini merupakan rata-rata dari skor delapan prinsip. Pada masing-masing dimensi diperoleh skor asli hitung yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan yang mendukung prinsip/dimensi tersebut. Kemudian skor asli hitung dibagi dengan skor ideal yaitu 6 dikali dengan 100 persen, sehingga didapatkan Indeks masing-masing prinsip.

Tabel 5. 1 Skor Indeks Good Governance Kabupaten Jombang 2024

No	Prinsip/ Dimensi	Skor Asli Hitung (Skala 6)	Indeks Dimensi (Skala 100)
1	Taat Hukum	4,95	82,43
2	Partisipasi	5,03	83,89
3	Transparansi	5,08	84,60
4	Akuntabilitas	4,95	82,45
5	Daya Tanggap	4,97	82,87
6	Kesetaraan	5,02	83,70
7	Efektivitas dan Efisiensi	5,03	83,81
8	Visi Strategis	4,94	82,30
Rata-rata		4,995	83,26

Sumber: Hasil Penelitian IGG, 2024

Berdasarkan tabel nilai indeks skor masing-masing prinsip diperoleh nilai indeks 83,26 atau kategori baik. Prinsip dengan skor tertinggi adalah prinsip transparansi dengan nilai 84,60 (5,08), sedangkan skor paling rendah

adalah prinsip visi strategis dengan skor 82,30 (4,94). Berikut hasil skor 8 prinsip berdasarkan sampel.

Tabel 5. 2 Skor 8 Prinsip Indeks Good Governance berdasarkan jenis sampel

No	Prinsip	Skor Internal	Skor Eksternal
1	Taat Hukum	91,32	73,54
2	Partisipasi	91,93	75,84
3	Transparansi	93,56	75,65
4	Akuntabilitas	91,54	73,36
5	Daya Tanggap	92,02	73,73
6	Kesetaraan	91,92	75,48
7	Efektivitas dan Efisiensi	91,81	75,81
8	Visi Strategis	92,34	72,25

Sumber: Hasil penelitian IGG, 2024

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan perbandingan skor internal (pemerintah) dan eksternal (sektor privat dan masyarakat sipil) pada berbagai prinsip tata kelola pemerintahan. Secara umum, skor internal lebih tinggi di semua prinsip, seperti transparansi (93,56), visi strategis (92,34), dan daya tanggap (92,02). Namun, skor eksternal, seperti transparansi (75,65) dan visi strategis (72,25), menunjukkan bahwa persepsi sektor privat dan masyarakat sipil terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut masih perlu ditingkatkan. Kesetaraan (75,48) dan efektivitas (75,81) juga menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif.

5.3 Skor Dimensi/Prinsip Indeks Good Governance

5.3.1 Taat Hukum

Pada prinsip taat hukum memiliki delapan indikator, yaitu : (1) Kecukupan Peraturan; (2) *Reward and Punishment*; (3) Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan; (4) Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah; (5) Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah; (6) Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum; (7) Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait; dan (8) Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan.



Pada indikator pertama sampai indikator ketiga terdiri dari 4 pertanyaan, indikator keempat terdiri dari 1 pertanyaan, pada indikator kelima sampai kedelapan terdiri dari 4 pertanyaan sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 29 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

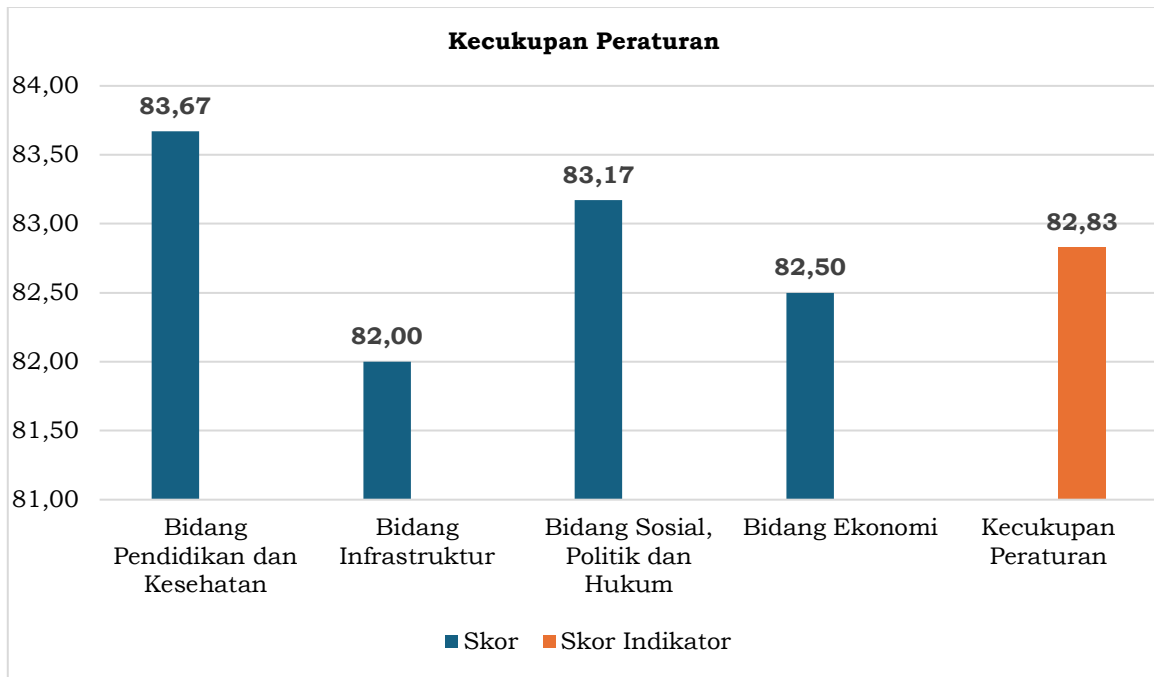
Tabel 5. 3 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Taat Hukum

Indikator	No	Pertanyaan
Kecukupan Peraturan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Ekonomi?
Reward and Punishment	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Ekonomi?
Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui media cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Pertemuan Formal?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Pertemuan Kultural?
Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah ketertiban umum?
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan



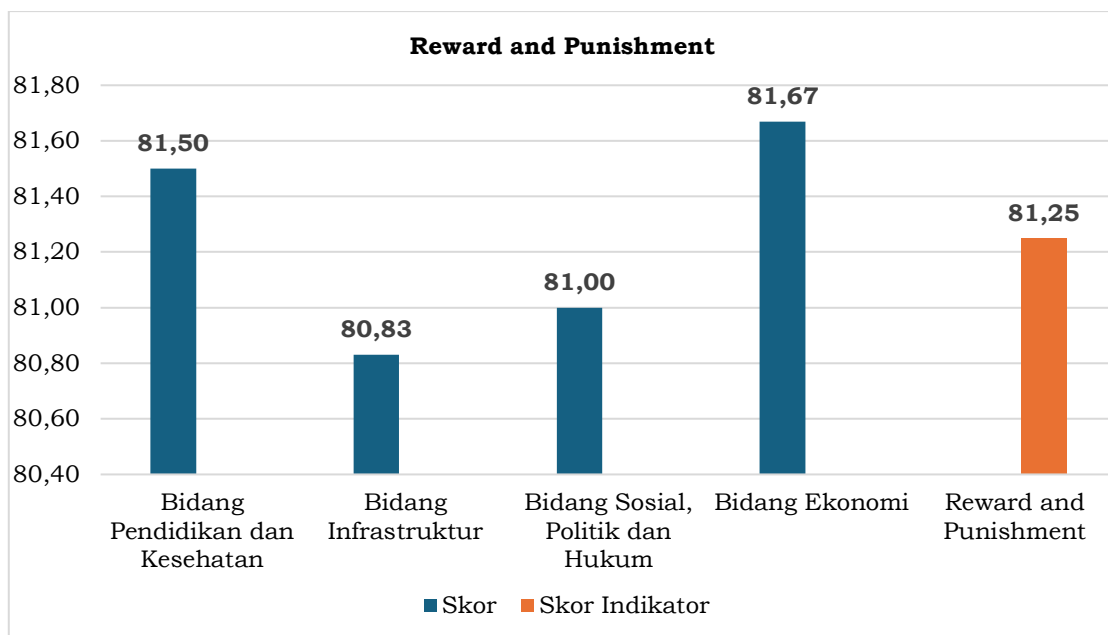
Indikator	No	Pertanyaan
Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah		rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Media Cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Pertemuan Formal?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Pertemuan Kultural?
Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan tindakan persuasif terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan tindakan melalui pemberian surat peringatan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan Tindakan melalui proses pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan Tindakan melalui eksekusi hasil keputusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Sosial, Politik dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Ekonomi?
Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada Kelompok Anak
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada Kelompok Disabilitas
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada Kelompok Minoritas

Untuk prinsip taat hukum memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



Gambar 5. 5 Hasil Skor Indikator Kecukupan Peraturan

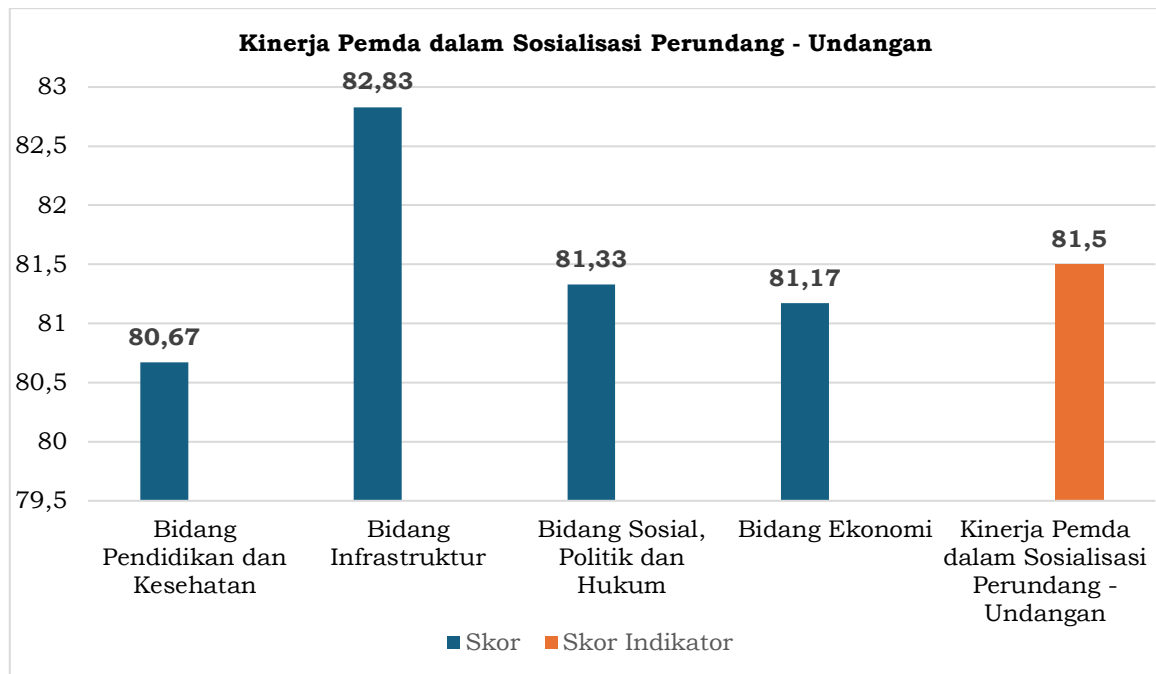
Hasil indikator pertama yaitu kecukupan peraturan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,83 pada skala 100 atau (4,97 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kecukupan peraturan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 6 Hasil Skor Indikator Reward and Punishment

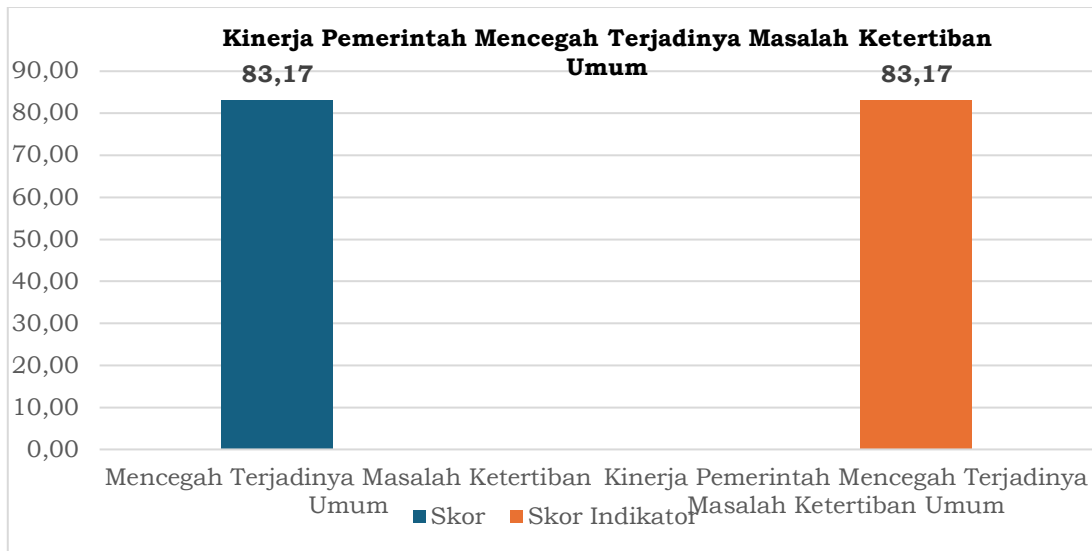


Hasil indikator kedua yaitu *reward and punishment* secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 81,25 pada skala 100 atau (4,88 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa *reward and punishment* telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



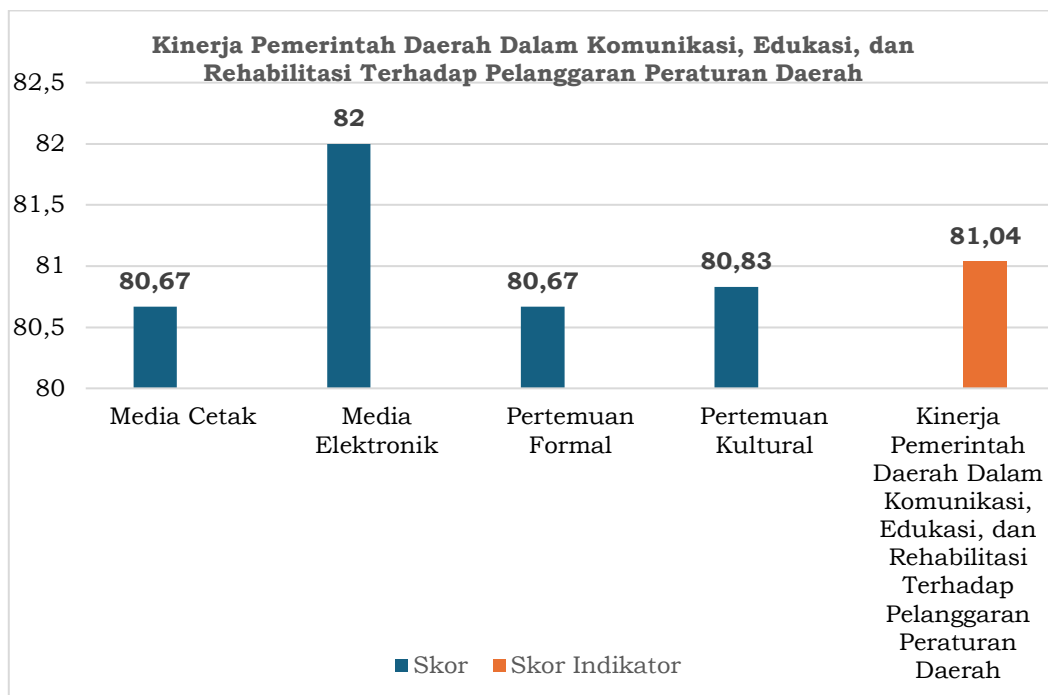
Gambar 5. 7 Hasil Indikator Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan

Hasil indikator ketiga yaitu kinerja pemda dalam sosialisasi perundang-undangan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 81,50 pada skala 100 atau (4,89 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemda dalam sosialisasi perundang – undangan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 8 Hasil Indikator Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah Ketertiban Umum

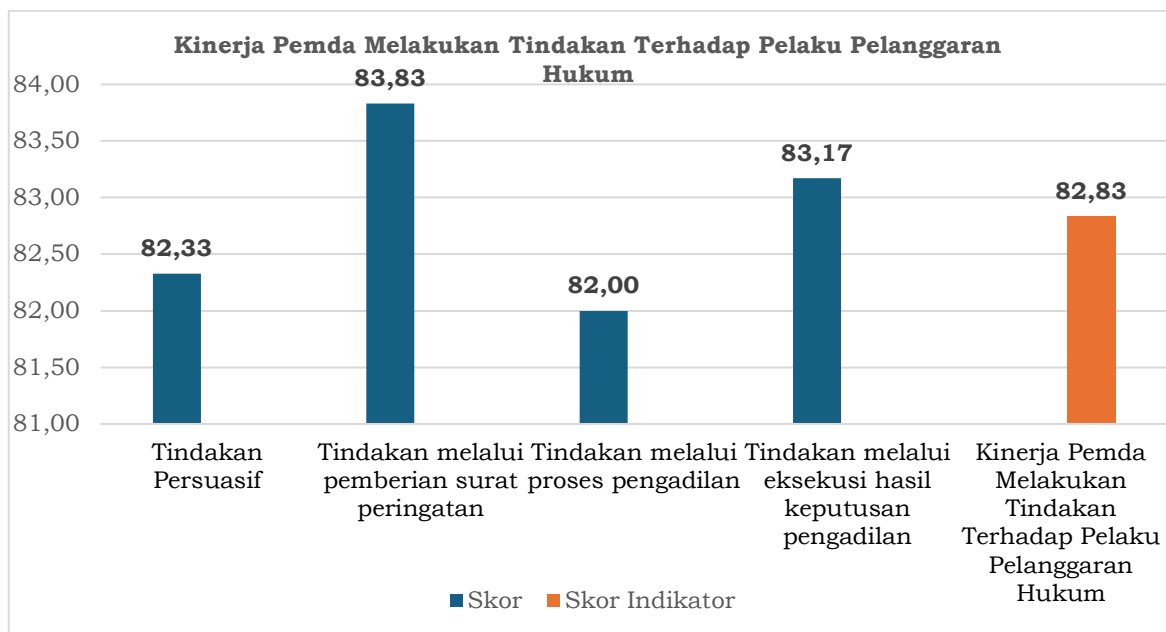
Hasil indikator keempat yaitu kinerja pemerintah mencegah terjadinya masalah ketertiban umum dari satu pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,17 pada skala 100 atau (4,99 pada skala 6) dimana satu pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemda dalam kinerja pemerintah mencegah terjadinya masalah ketertiban umum telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 9 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

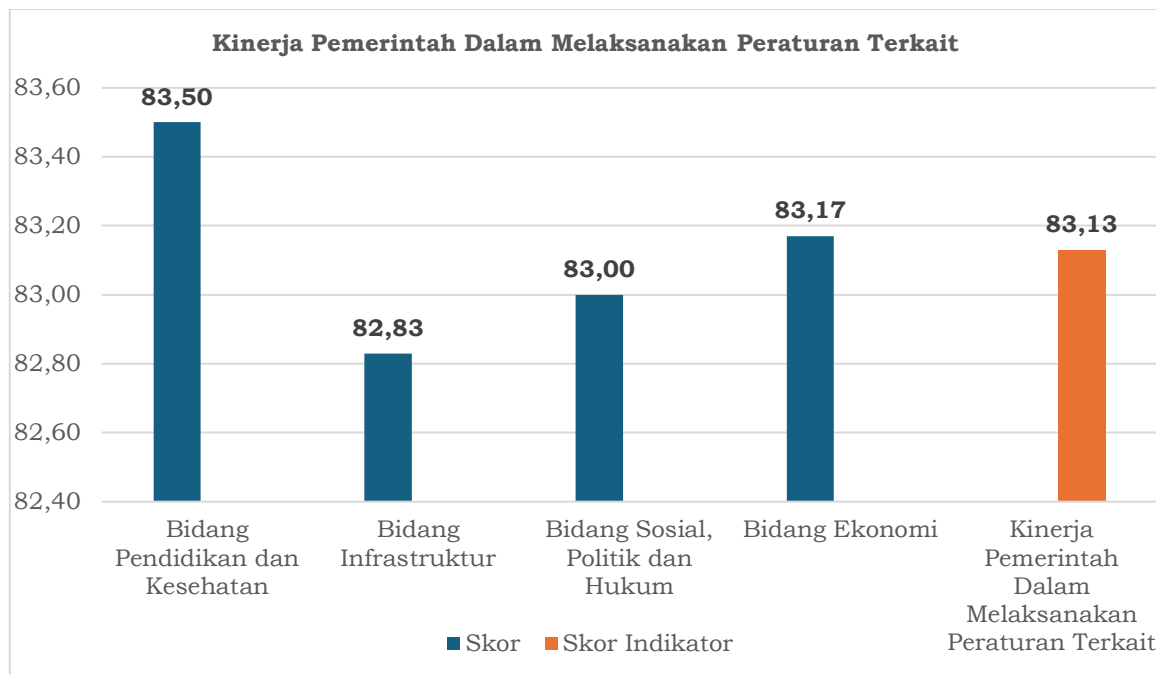


Hasil indikator kelima yaitu kinerja pemerintah daerah dalam komunikasi, edukasi, dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 81,04 pada skala 100 atau (4,86 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemerintah daerah dalam komunikasi, edukasi, dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



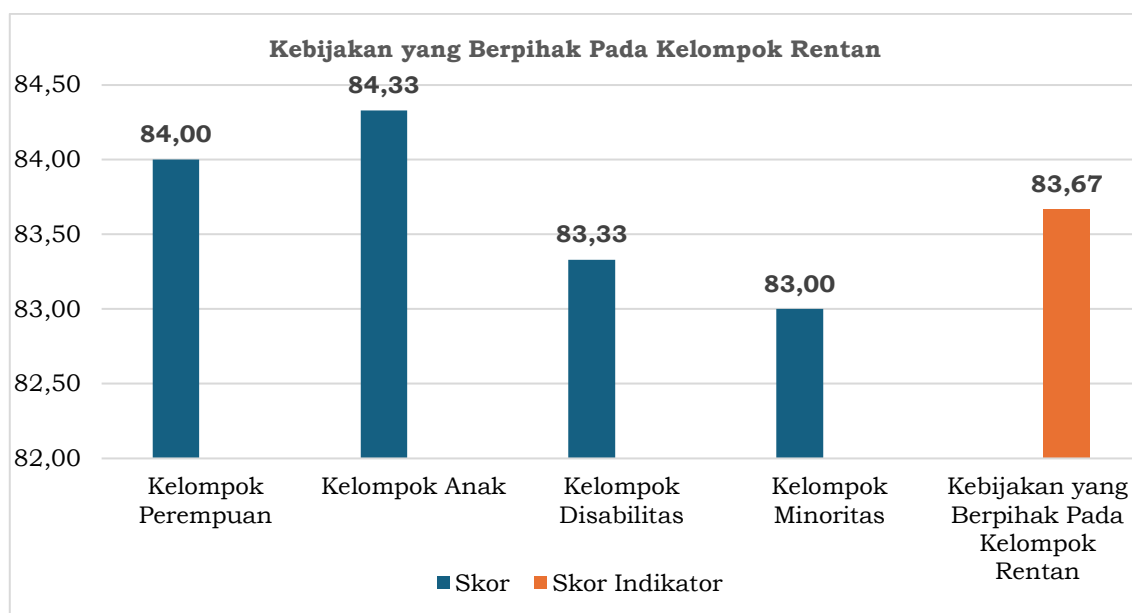
Gambar 5. 10 Hasil Indikator Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum

Hasil indikator keenam yaitu kinerja pemda melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,83 pada skala 100 atau (4,97 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemda melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



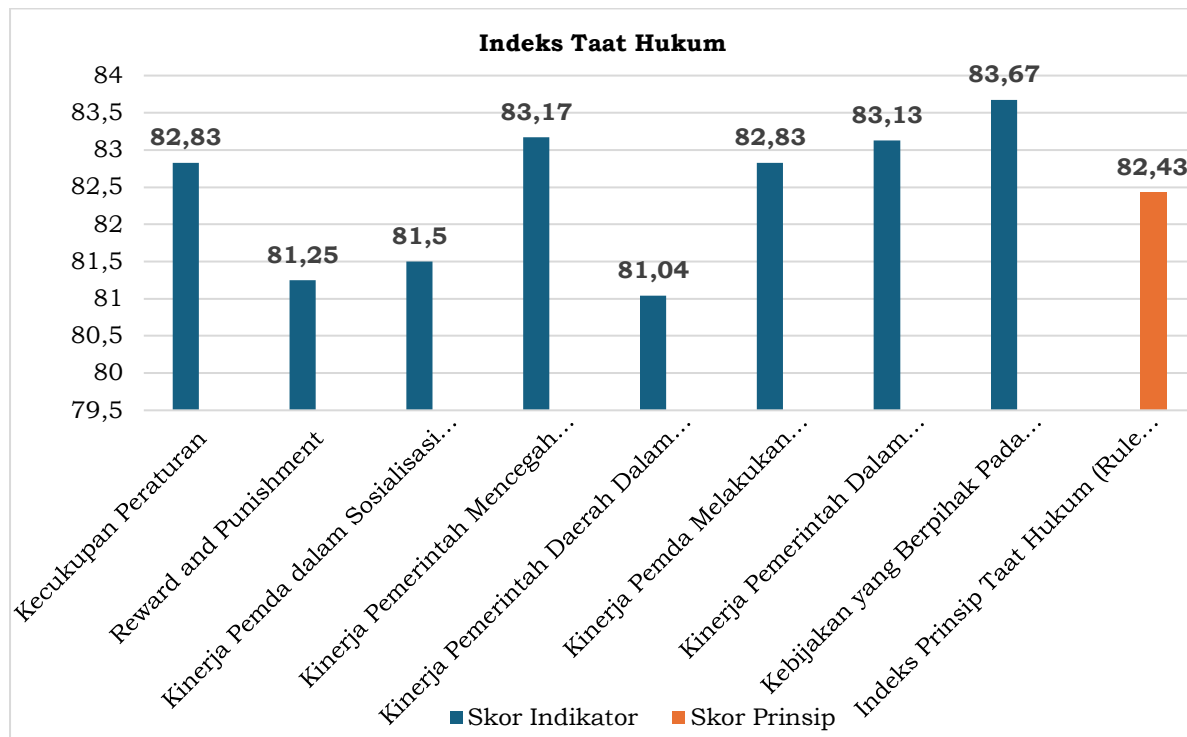
Gambar 5. 11 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait

Hasil indikator ketujuh yaitu kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,13 pada skala 100 atau (4,99 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait telah berjalan dengan “Sangat Baik”.




Gambar 5. 12 Hasil Skor Indikator Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan

Hasil indikator kedelapan yaitu kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,67 pada skala 100 atau (5,02 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 13 Hasil Skor Prinsip Taat Hukum

Hasil keseluruhan rata-rata kedelapan indikator membentuk nilai prinsip taat hukum dengan skor rata-rata yaitu 82,43 (4,95) dengan kategori “Sangat Baik”. Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu diapresiasi atas upayanya dalam menjaga tegaknya aturan hukum secara formal, seperti pelaksanaan aturan perundang-undangan yang mulai diperhatikan. Indikator yang paling tinggi adalah poin “Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan” yang mendapatkan skor 83,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Jombang telah berhasil dalam membuat kebijakan serta menyediakan fasilitas yang setara terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, dan minoritas).



Namun demikian, beberapa masalah penting masih menjadi perhatian. Nilai indikator yang paling rendah adalah poin “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah” yang mendapatkan nilai 80,04. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi Pemkab Jombang yang masih minim, kegiatan edukasi yang belum masif, serta penekanan rehabilitasi terhadap pelaku pelanggaran peraturan juga belum optimal dalam meningkatkan ketaatan hukum di Kabupaten Jombang. Penegakan hukum di daerah ini sering kali tidak konsisten, di mana ada pengaruh faktor politik dan pihak tertentu yang membuat beberapa aturan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kasus-kasus besar, seperti dugaan pelanggaran oleh pejabat atau kasus sengketa aset, sering kali terhambat akibat adanya intervensi dari pihak berpengaruh. Selain itu, ketimpangan sosial tetap terasa, terutama di daerah yang berbatasan dengan wilayah lain, seperti Jombang Utara, yang mendapatkan perhatian lebih sedikit dibandingkan pusat kabupaten. Sosialisasi aturan, perda, dan mekanisme pelaporan juga masih minim, membuat masyarakat kesulitan dalam memahami saluran yang tersedia untuk menyampaikan keluhan.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah disarankan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum tanpa memandang posisi atau status sosial pelaku. Dalam hal edukasi, Pemkab Jombang dapat membuat iklan layanan masyarakat dalam mensosialisasikan perda yang baru melalui media sosial, ataupun media cetak, serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjalankan aturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya dengan penegakan peraturan daerah serta merehabilitasi pelaku pelanggar hukum dengan tegas dan dapat membuat efek jera. Kemudian memberikan apresiasi berupa *reward* bagi masyarakat yang telah melaporkan tindak pelanggaran hukum di Kabupaten Jombang. Sosialisasi perundang-undangan mengenai kebijakan perlu ditingkatkan melalui media sosial, grup *WhatsApp* RT/RW, atau program kunjungan langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengaduan masyarakat dengan membangun *platform* yang lebih responsif dan transparan, sehingga

masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan dan memantau tindak lanjutnya.

5.3.2 Partisipasi

Pada prinsip partisipasi memiliki tujuh indikator, yaitu : (1) Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran; (2) Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup; (3) Mengakomodir Keterlibatan Kelompok Dalam Perencanaan Program Pembangunan; (4) Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan; (5) Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat; (6) Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum; dan (7) Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat. Pada indikator pertama terdiri dari 4 pertanyaan, indikator keempat terdiri dari 1 pertanyaan, pada indikator kedua sampai keempat terdiri dari 4 pertanyaan, pada indikator kelima ada 2 pertanyaan, pada indikator keenam dan ketujuh terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 23 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

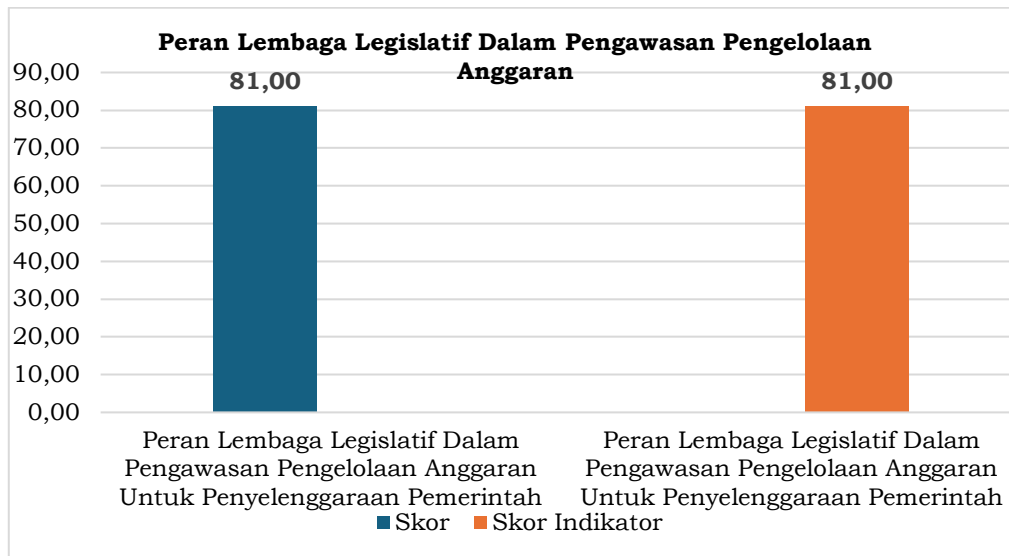
Tabel 5. 4 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Partisipasi

Indikator	No	Pertanyaan
Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?
Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok Agama dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Usia dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Jenis Kelamin dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Golongan dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
Mengakomodir Keterlibatan Kelompok	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok Agama dalam Perencanaan Program Pembangunan?



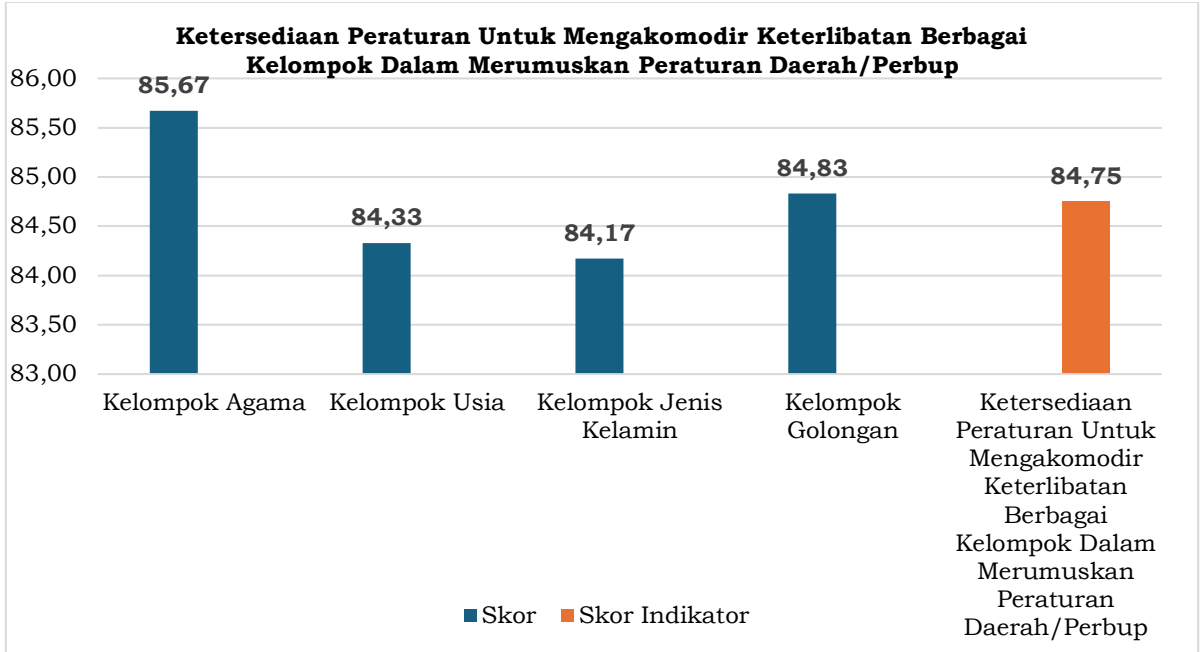
Indikator	No	Pertanyaan
Dalam Perencanaan Program Pembangunan	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Usia dalam Perencanaan Program Pembangunan?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Jenis Kelamin dalam Perencanaan Program Pembangunan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Golongan dalam Perencanaan Program Pembangunan?
Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangkab dalam penyusunan kebijakan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangcam dalam penyusunan kebijakan?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangdes dalam penyusunan kebijakan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Konsultasi Formal/Informal dalam penyusunan kebijakan?
Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas keberadaan media massa lokal sebagai penyalur aspirasi masyarakat?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas keberadaan media massa nasional sebagai penyalur aspirasi masyarakat?
Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Media Cetak dan Elektronik?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Media Sosial?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui <i>Call Center</i> ?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Posko pengaduan di wilayah masing-masing?
Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Media Cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Sosialisasi Formal?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Sosialisasi Kultural?

Untuk prinsip partisipasi memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



Gambar 5. 14 Hasil Skor Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah

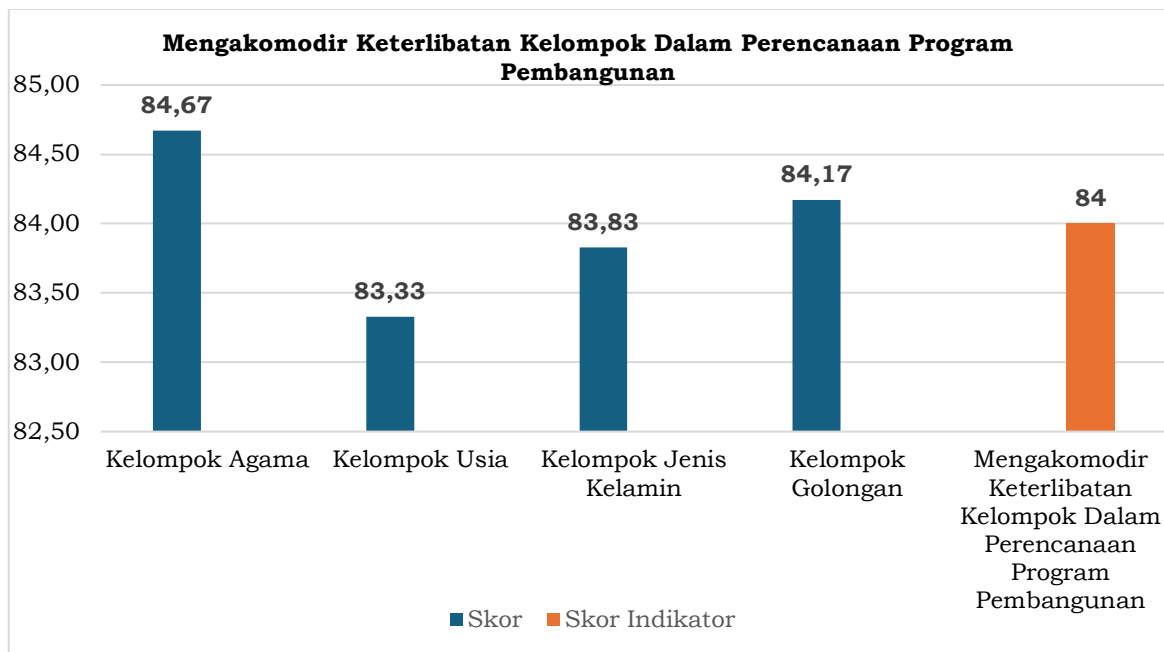
Hasil indikator pertama yaitu peran lembaga legislatif dalam pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah dari satu pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 81,00 pada skala 100 atau (4,86 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa peran lembaga legislatif dalam pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah telah berjalan dengan "Sangat Baik".



Gambar 5. 15 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup

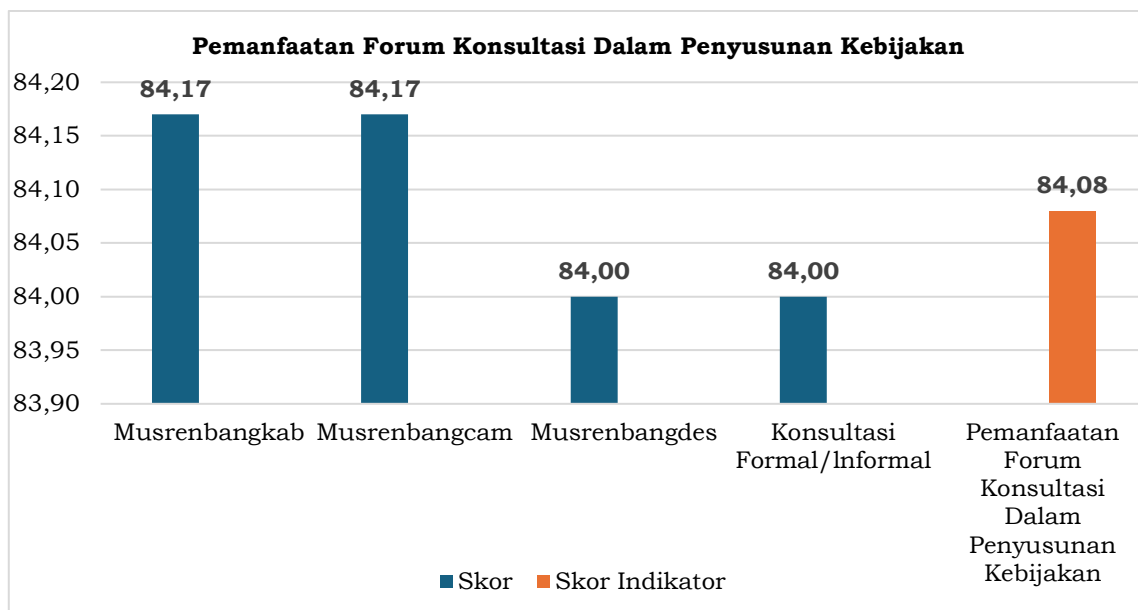
Hasil indikator kedua yaitu ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan berbagai kelompok dalam merumuskan peraturan daerah/perbup secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,75 pada skala 100 atau (5,09 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan berbagai kelompok dalam merumuskan peraturan daerah/perbup telah berjalan dengan “Sangat Baik”.





Gambar 5. 16 Hasil Skor Indikator Mengakomodir Keterlibatan Kelompok Dalam Perencanaan Program Pembangunan

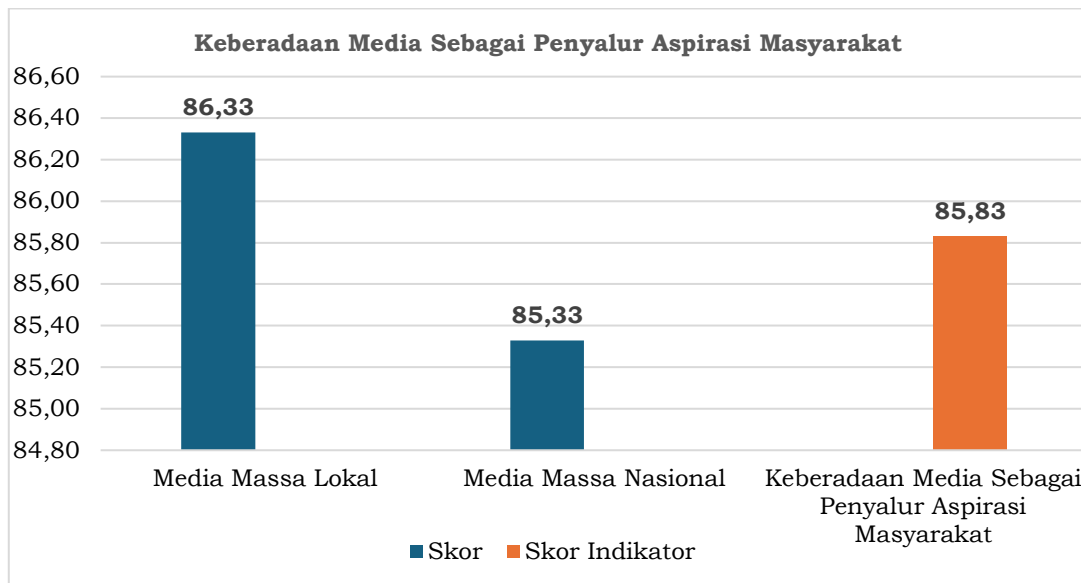
Hasil indikator ketiga yaitu mengakomodir keterlibatan kelompok dalam perencanaan program pembangunan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,00 pada skala 100 atau (5,04 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa mengakomodir keterlibatan kelompok dalam perencanaan program pembangunan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 17 Hasil Skor Indikator Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan

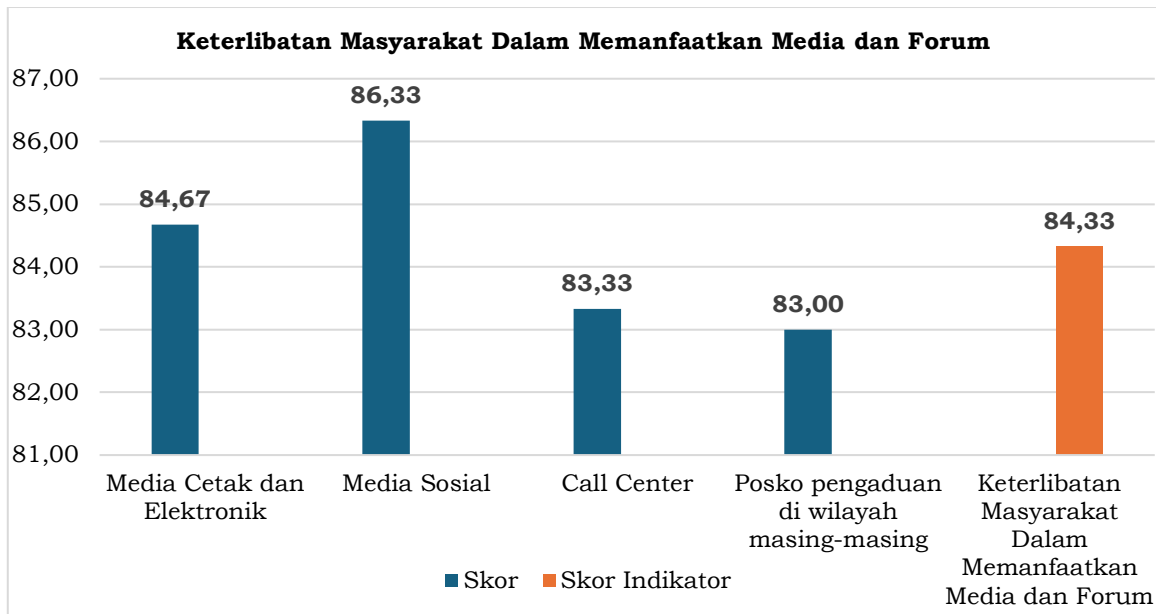


Hasil indikator keempat yaitu pemanfaatan forum konsultasi dalam penyusunan kebijakan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,08 pada skala 100 atau (5,05 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa pemanfaatan forum konsultasi dalam penyusunan kebijakan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



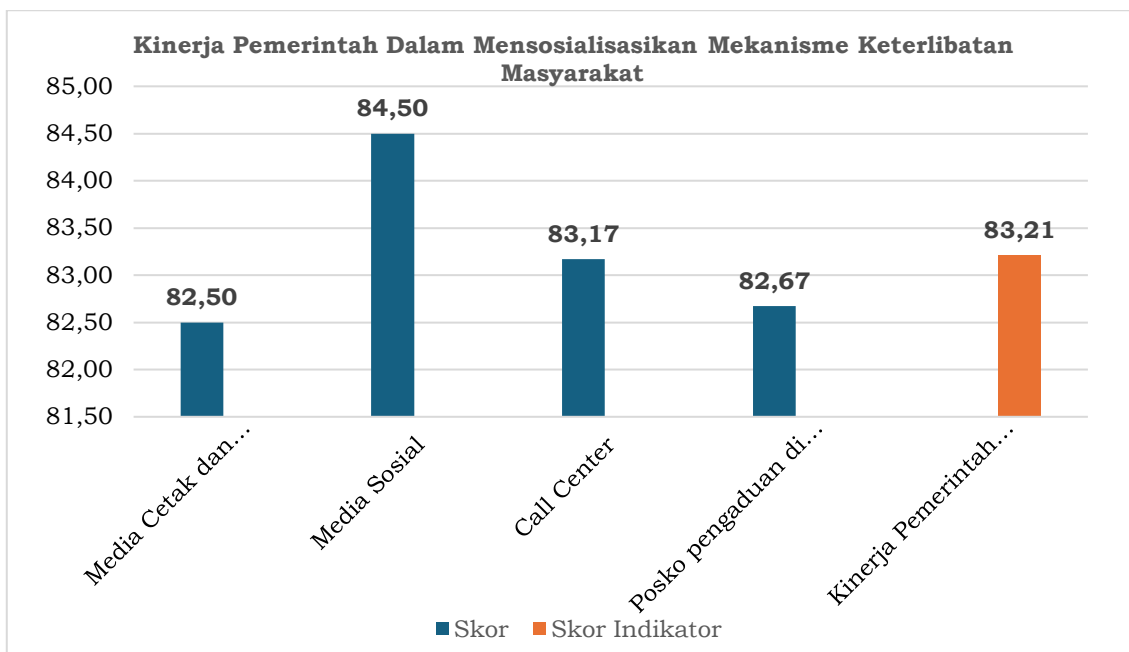
Gambar 5. 18 Hasil Skor Indikator Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat

Hasil indikator kelima yaitu keberadaan media sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara rata-rata dari dua pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 85,83 pada skala 100 atau (5,15 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa pemanfaatan keberadaan media sebagai penyalur aspirasi masyarakat telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 19 Hasil Skor Indikator Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum

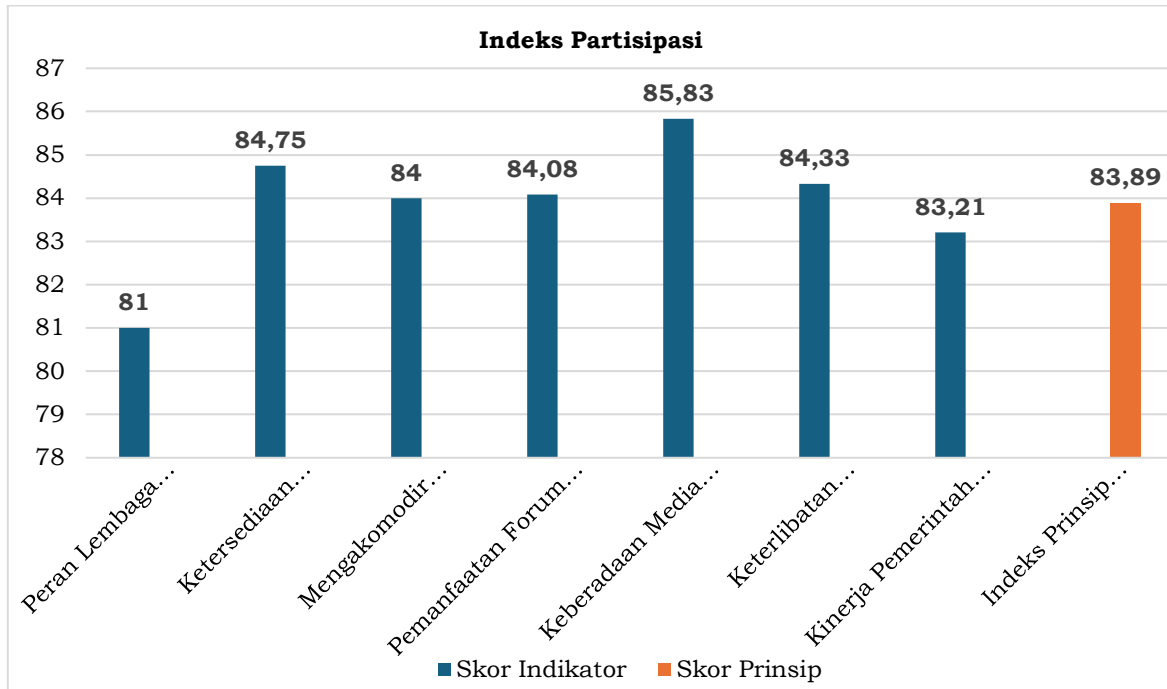
Hasil indikator keenam yaitu keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum secara rata-rata dari dua pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,33 pada skala 100 atau (5,06 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 20 Hasil Skor Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat




Hasil indikator ketujuh yaitu kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,21 pada skala 100 atau (4,99 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 21 Hasil Skor Prinsip Partisipasi

Hasil keseluruhan rata-rata ketujuh indikator membentuk nilai prinsip partisipasi dengan skor rata-rata yaitu 83,89 (5,03) dengan kategori “Sangat Baik”. Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang patut diapresiasi atas langkah-langkah positif yang telah dilakukan, seperti Komunitas “Santri Jogo Kali” dari Dinas Lingkungan Hidup yang berhasil melibatkan masyarakat dan para santri dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan bersih sungai. Selain itu, terdapat kegiatan seperti “Jombang Fest” yang mengundang para pelaku UMKM di Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mendukung promosi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai potensi lokal. Beberapa program lain, seperti layanan aduan masyarakat dan rapat desa untuk aspirasi, juga menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan



Musrenban yang dilakukan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun dengan adanya apresiasi diatas, masih ada beberapa permasalahan penting yang membutuhkan perhatian. Salah satunya yang membutuhkan perhatian adalah nilai indikator yang paling rendah, yakni poin “Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah” dengan nilai 81. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif di Kabupaten Jombang kurang berperan aktif dalam mengawal pengelolaan anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah masih dirasa kurang melibatkan masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang sulit mengakses media digital. Respons terhadap pengaduan masyarakat melalui aplikasi atau kanal digital sering kali tidak maksimal, sehingga banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan secara menyeluruh. Selain itu, ketimpangan dalam perhatian terhadap isu sosial-agama serta kurangnya forum aspirasi masyarakat juga menjadi kritik utama. Masih terdapat keluhan bahwa beberapa program pemerintah hanya berhenti pada rapat tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah disarankan untuk memperbanyak diskusi dan penyerapan aspirasi secara berkala, baik formal ataupun secara nonformal yakni melalui kegiatan antar RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Selain itu, membentuk forum aspirasi yang inklusif dan rutin diadakan dapat membantu pemerintah mendengar langsung kebutuhan masyarakat dari berbagai golongan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap kebijakan dan program-program yang dijalankan.

5.3.3 Transparansi

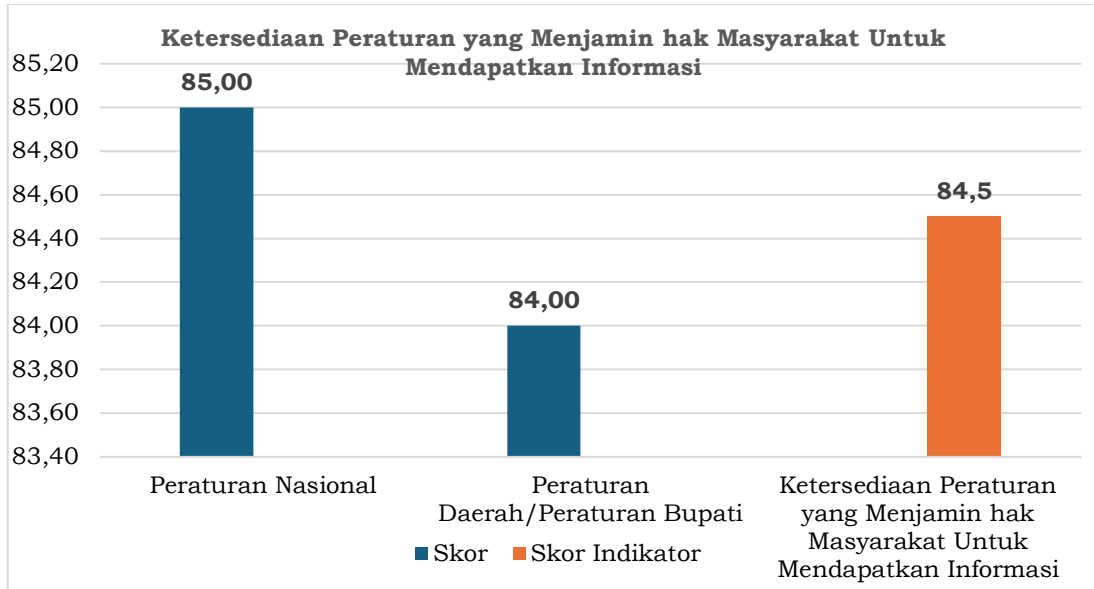
Pada prinsip transparansi memiliki empat indikator, yaitu: (1) Ketersediaan Peraturan yang Menjamin hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi; (2) Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan; (3) Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan; dan (4) Informasi Pelayanan. Pada indikator pertama terdiri dari 2 pertanyaan, indikator kedua sampai keempat terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 14 pertanyaan. Pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Transparansi

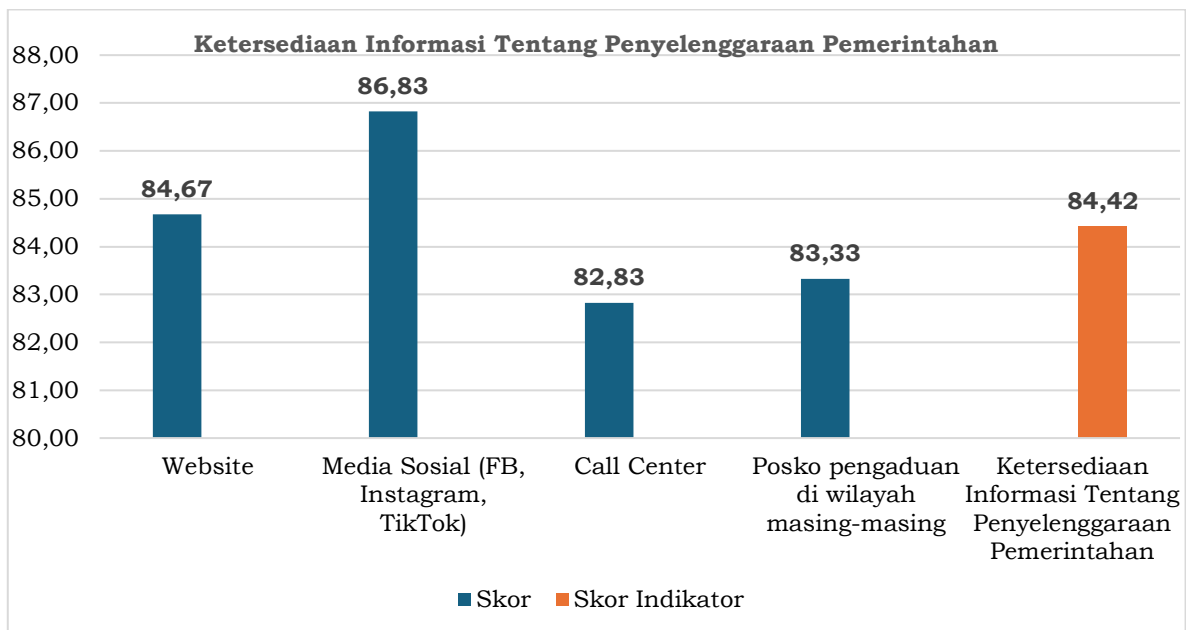
Indikator	No	Pertanyaan
Ketersediaan Peraturan yang Menjamin hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada level Peraturan Nasional?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada level Peraturan Daerah/Peraturan Bupati?
Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas <i>Website</i> ?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas Media Sosial (FB, Instagram, TikTok)?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas <i>Call Center</i> ?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas Posko pengaduan di wilayah masing-masing?
Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media <i>Website/Videotron</i> ?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media Radio?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui Media Sosial?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media Pusat Layanan informasi?
Informasi Pelayanan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Catatan Kependudukan (KTP, KK dan Akta)?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Bantuan Sosial?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Perizinan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Layanan Pengaduan Masyarakat?

Untuk prinsip transparansi memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



Gambar 5. 22 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Peraturan yang Menjamin Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi

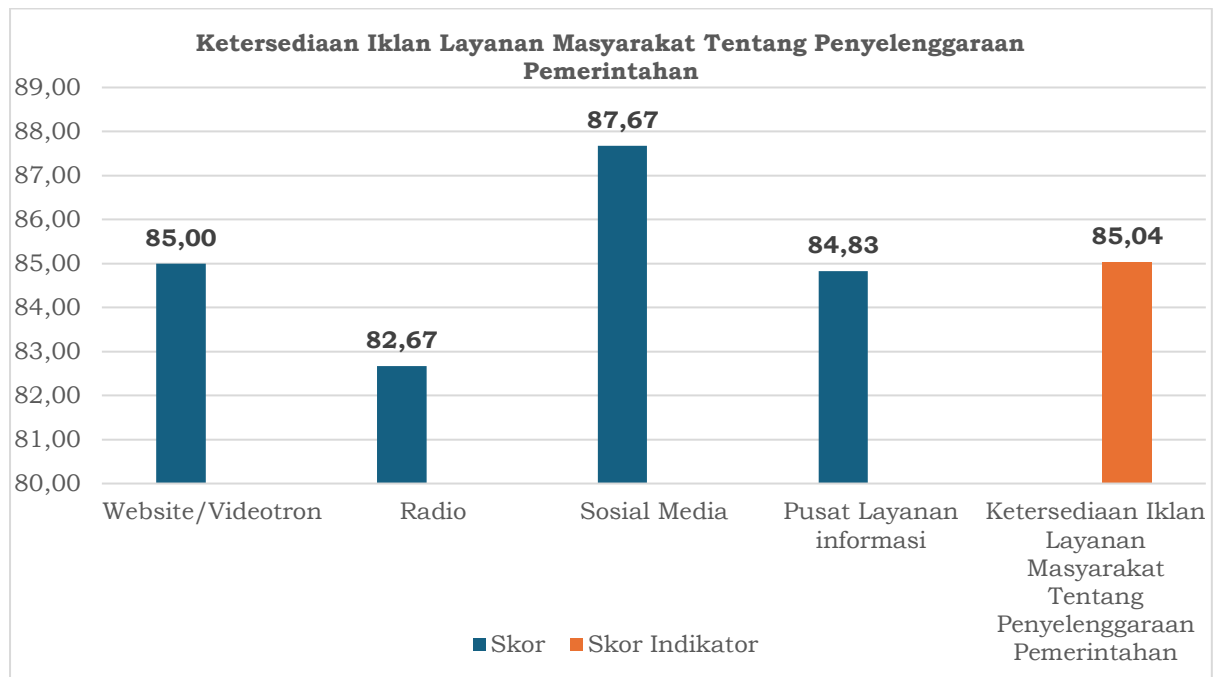
Hasil indikator pertama yaitu ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,50 pada skala 100 atau (5,07 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 23 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan



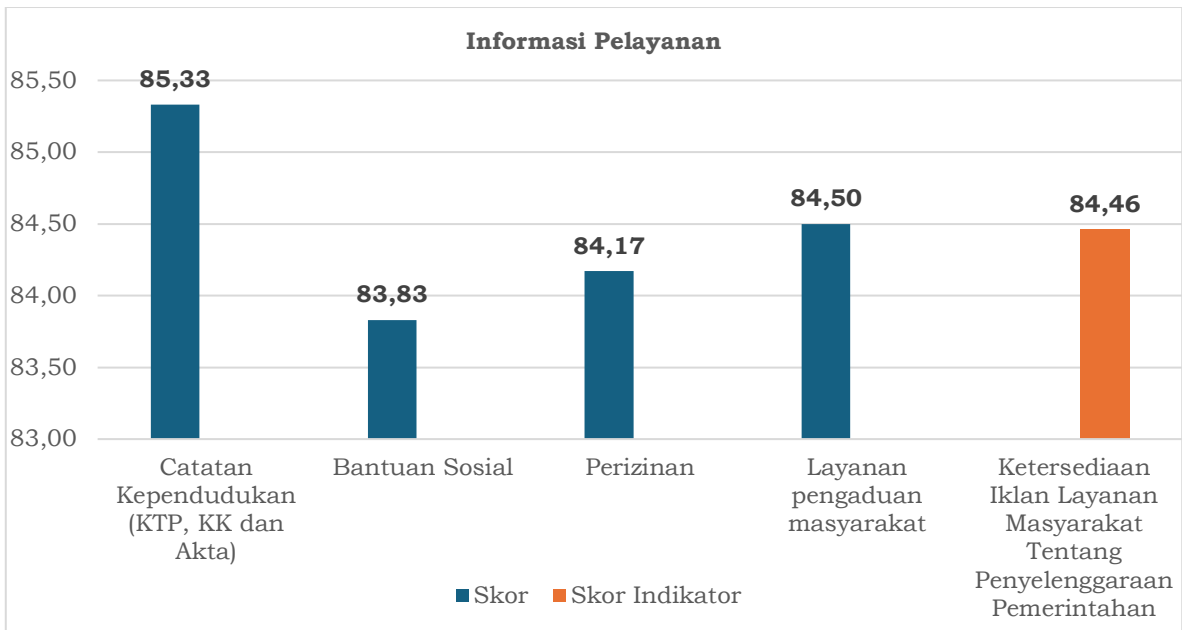
Hasil indikator kedua yaitu ketersediaan informasi tentang Penyelenggaraan pemerintahan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,42 pada skala 100 atau (5,07 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 24 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

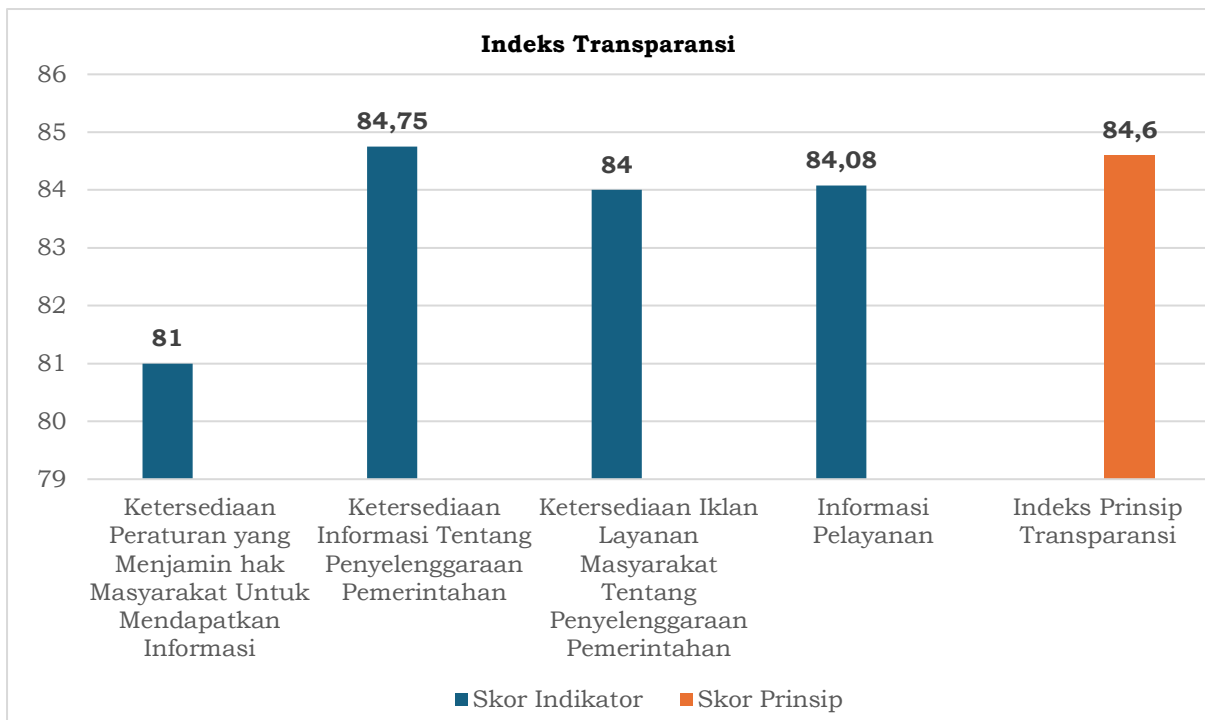
Hasil indikator ketiga yaitu ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 85,04 pada skala 100 atau (5,10 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.





Gambar 5. 25 Hasil Skor Indikator Informasi Pelayanan

Hasil indikator keempat yaitu informasi pelayanan secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 84,46 pada skala 100 atau (5,07 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa informasi pelayanan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 26 Hasil Skor Prinsip Transparansi



Hasil keseluruhan rata-rata keempat indikator membentuk nilai prinsip transparansi dengan skor rata-rata yaitu 84,60 (5,08) dengan kategori “Sangat Baik”. Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang layak diapresiasi atas upayanya dalam meningkatkan transparansi melalui penggunaan media sosial dan platform digital, seperti aplikasi “SAMBANG” (Satu Data Jombang) yang memungkinkan masyarakat memantau serapan anggaran triwulan secara langsung. Selain itu, beberapa dinas, seperti Dinas Kesehatan, telah memanfaatkan media sosial dengan baik untuk menyebarkan informasi layanan masyarakat, yang bisa dijadikan contoh bagi dinas-dinas lainnya dalam meningkatkan komunikasi publik.

Namun, transparansi terhadap anggaran dan pelaksanaannya masih menjadi perhatian. Nilai poin indikator yang terendah “Ketersediaan Peraturan yang Menjamin Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi” dengan nilai rata-rata 81. Aturan yang berlaku di Kabupaten Jombang adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 68 Tahun 2022 tentang “Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Jombang Dengan Media Massa”. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan informasi secara lengkap, luas, dan komprehensif melalui tiga media (cetak, siber, dan elektronik). Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan tersebut belum terimplementasikan dengan optimal, khususnya mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara transparan melalui media cetak maupun media digital. Realisasi anggaran di beberapa dinas sering kali terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, akses informasi terkait pembangunan atau program pemerintah masih terbatas, di mana masyarakat sering kali harus mendatangi kantor atau melihat papan pengumuman untuk mendapatkan data yang seharusnya dapat diakses secara *online*. Data yang ada di *website* pemerintah juga dinilai kurang transparan dan tidak mencakup informasi yang lengkap, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan memanfaatkan lebih banyak *platform* digital,

seperti media sosial dan *website* resmi, dengan menyajikan data yang lebih komprehensif dan mudah dipahami. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan dengan publikasi rutin yang menjelaskan detail alokasi dan realisasinya kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat memperluas cakupan sosialisasi melalui media fisik seperti videotron, banner, atau papan informasi di tempat strategis agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Langkah-langkah ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik.

5.3.4 Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas memiliki enam indikator, yaitu: (1) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran; (2) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat; (3) Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat; (4) Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah; (5) Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran; dan (6) Kinerja Aparat Pemerintah. Pada indikator pertama sampai keempat terdiri dari 4 pertanyaan, indikator kelima terdiri dari 1 pertanyaan, indikator keenam terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 21 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

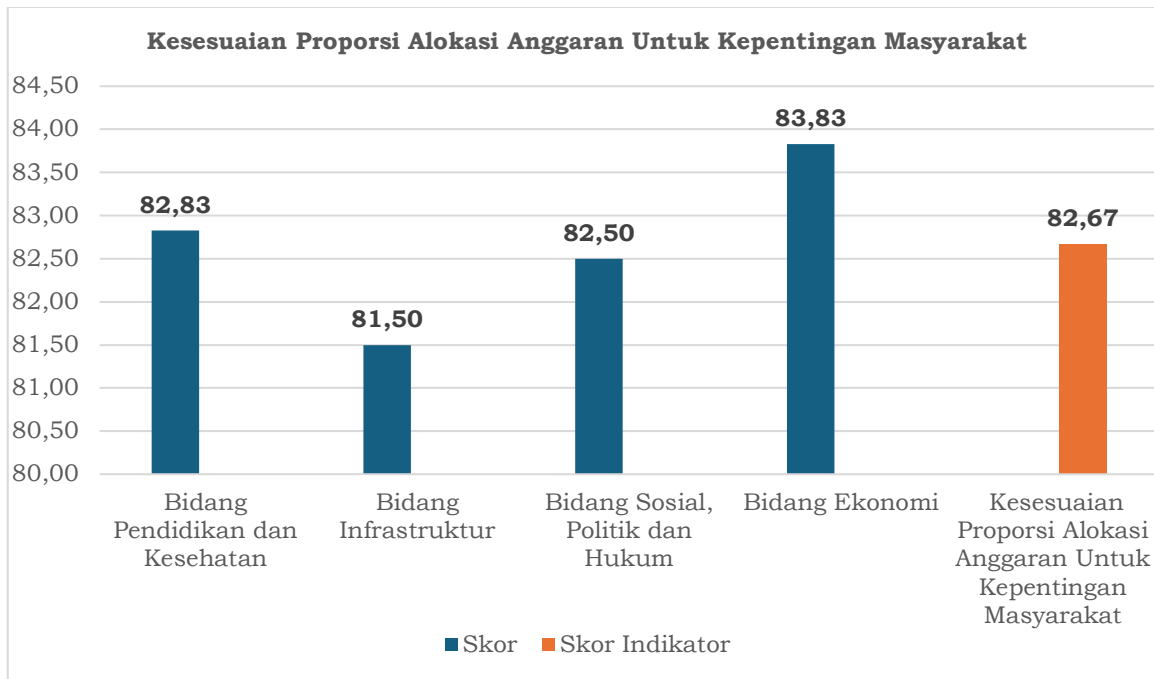
Tabel 5. 6 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Akuntabilitas

Indikator	No	Pertanyaan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Ekonomi?
	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan



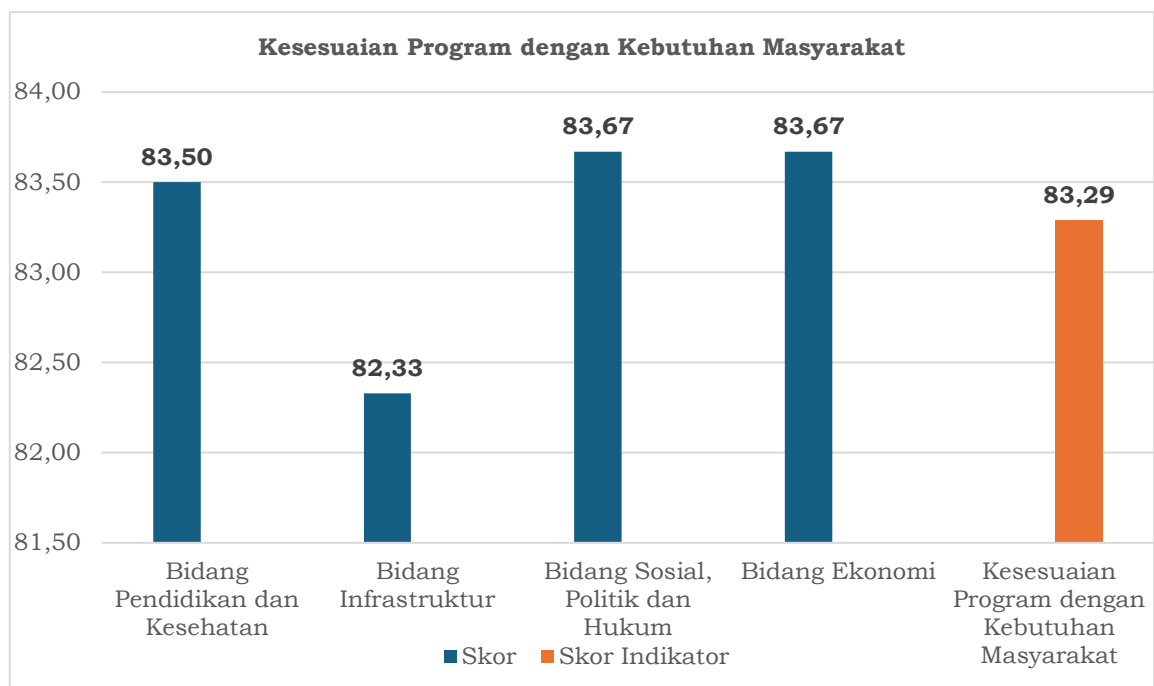
Indikator	No	Pertanyaan
Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat		daerah/masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Ekonomi?
Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Sosial, Politik dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Ekonomi?
Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Ekonomi?
Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?
Kinerja Aparat Pemerintah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Ekonomi?

Untuk prinsip akuntabilitas memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



Gambar 5. 27 Hasil Skor Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

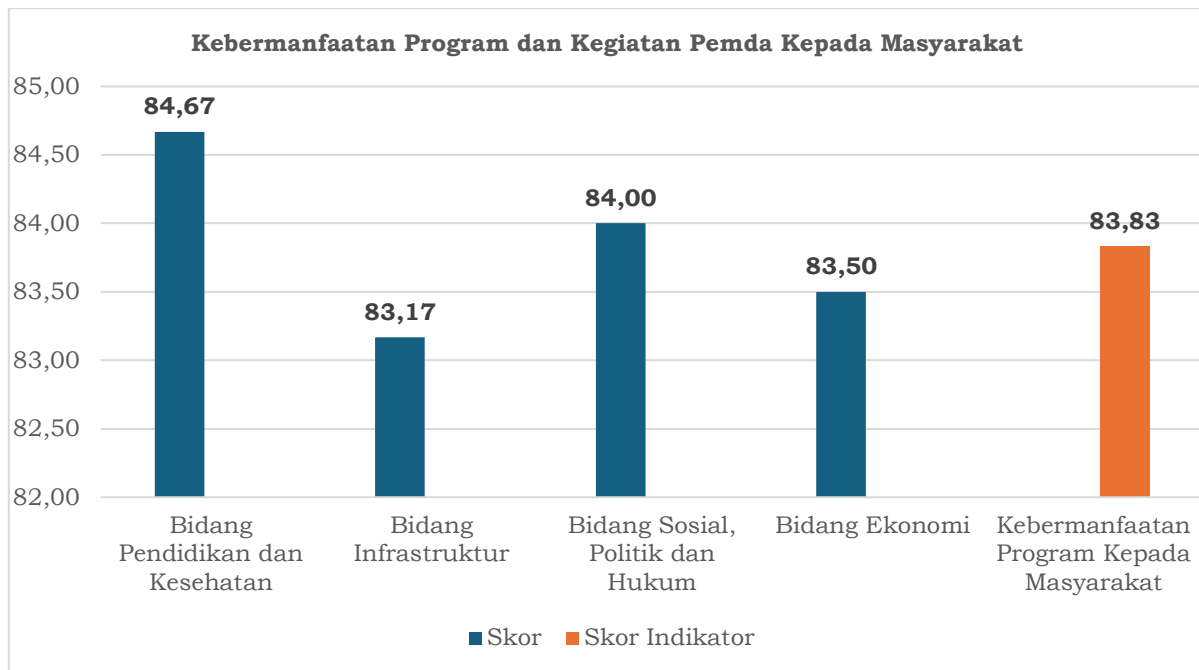
Hasil indikator pertama yaitu akuntabilitas pengelolaan anggaran secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,67 pada skala 100 atau (4,96 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 28 Hasil Skor Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat

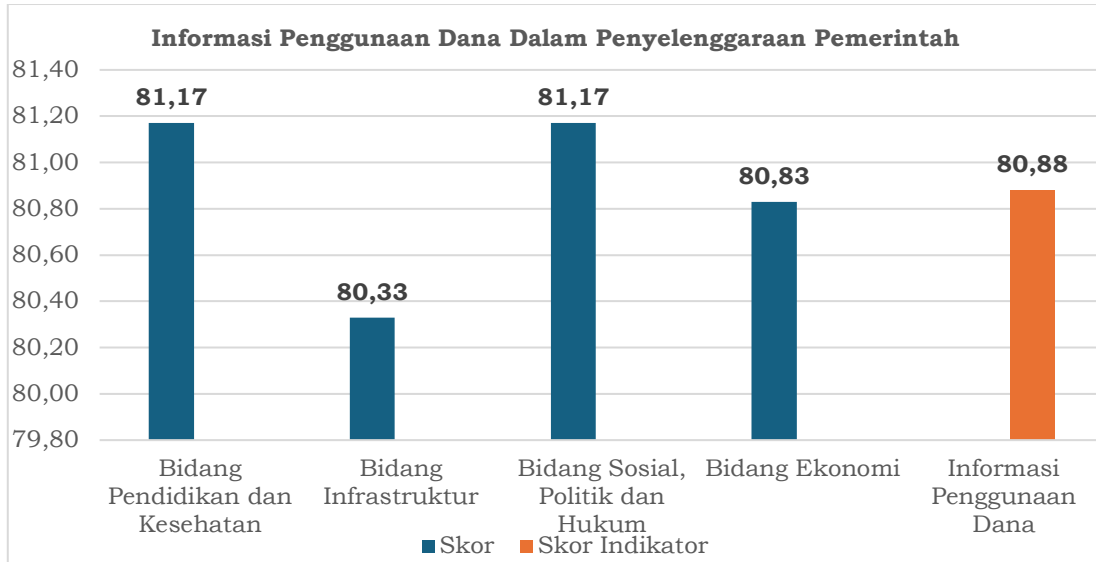


Hasil indikator kedua yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,29 pada skala 100 atau (5,00 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



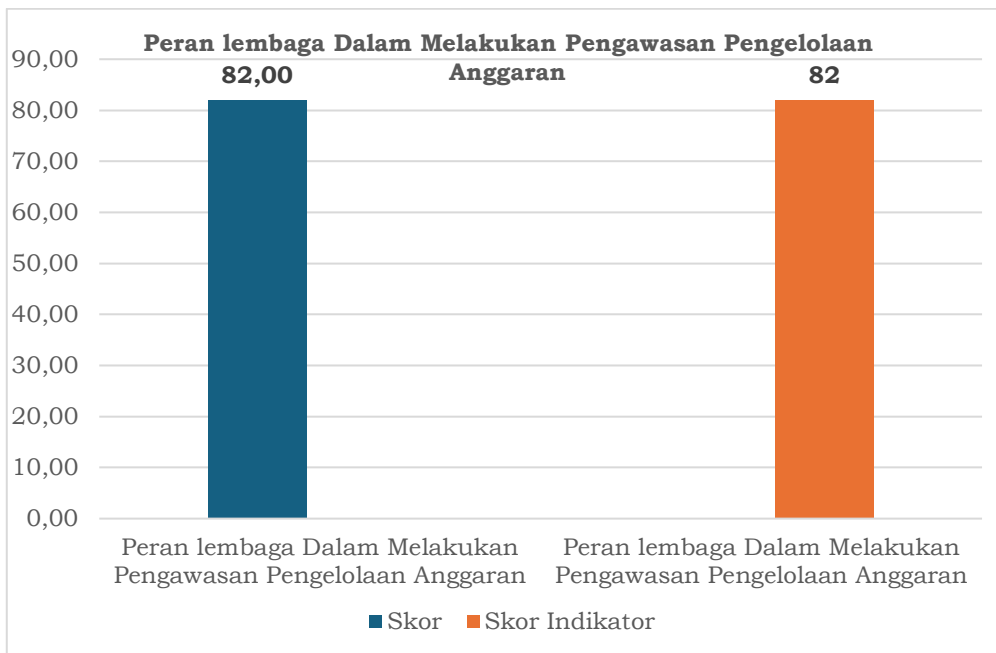
Gambar 5. 29 Hasil Skor Indikator Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat

Hasil indikator ketiga yaitu kebermanfaatan program dan kegiatan pemda kepada masyarakat secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,83 pada skala 100 atau (5,03 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kebermanfaatan program dan kegiatan pemda kepada masyarakat telah berjalan dengan “Sangat Baik”.

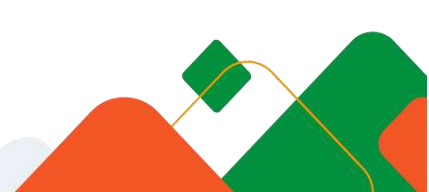


Gambar 5. 30 Hasil Skor Indikator Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

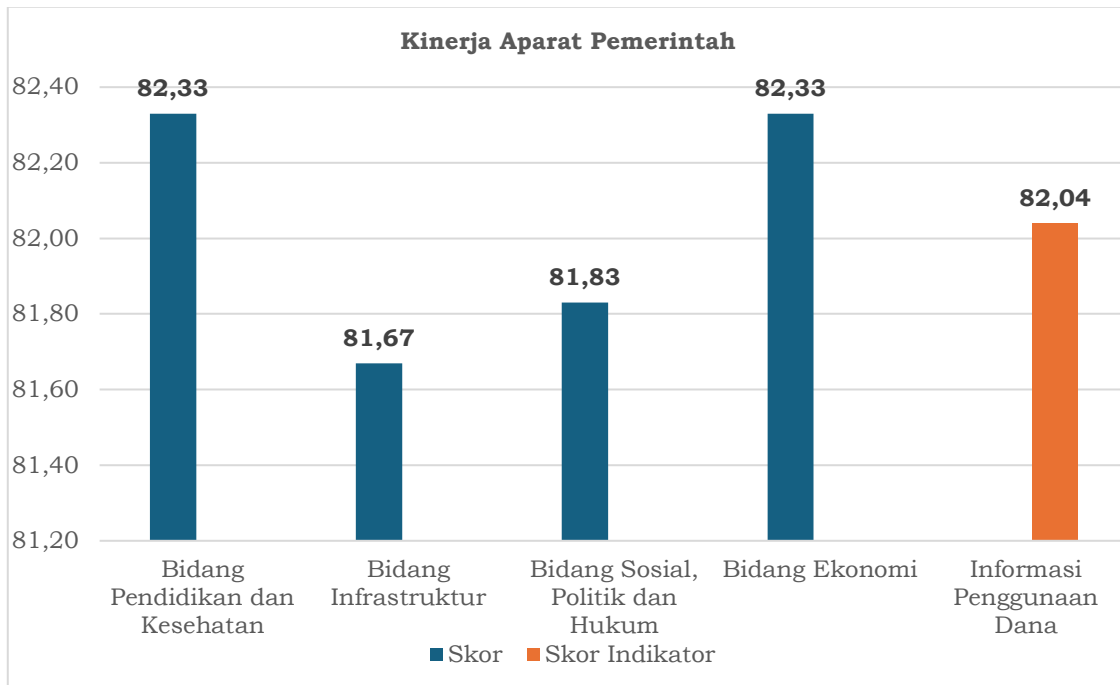
Hasil indikator keempat yaitu informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 80,88 pada skala 100 atau (4,85 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 31 Hasil Skor Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran

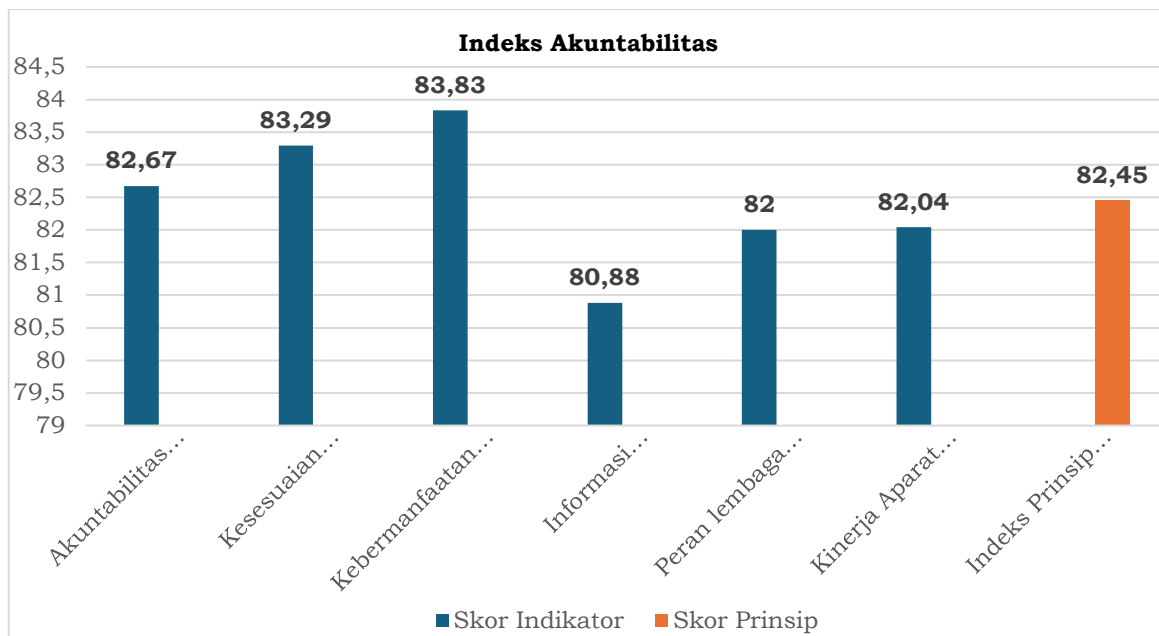


Hasil indikator kelima yaitu peran lembaga dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran secara rata-rata dari satu pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,00 pada skala 100 atau (4,92 pada skala 6) dimana satu pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa peran lembaga dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 32 Hasil Skor Indikator Kinerja Aparat Pemerintah


Hasil indikator keenam yaitu kinerja aparat pemerintah secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,04 pada skala 100 atau (4,92 pada skala 6) dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 75. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kinerja aparat pemerintah telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 33 Hasil Skor Prinsip Akuntabilitas

Hasil keseluruhan rata-rata keenam indikator membentuk nilai prinsip akuntabilitas dengan skor rata-rata yaitu 82,45 (5,00) dengan kategori “Sangat Baik”. Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang layak diapresiasi atas beberapa upaya yang telah dilakukan, seperti perbaikan jalan dan gorong-gorong di desa yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, fasilitas umum seperti lampu penerangan yang dapat digunakan di ruang publik juga menjadi langkah positif dalam meningkatkan infrastruktur di daerah. Pengadaan barang dan obat-obatan di tingkat kabupaten juga menunjukkan akuntabilitas yang baik, meskipun ada beberapa kendala terkait kecocokan kebutuhan di lapangan.

Namun, terdapat sejumlah kritik yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal perencanaan dan akuntabilitas anggaran. Nilai indikator yang paling rendah adalah “Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah” yang mendapatkan nilai 80,88. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas pemerintah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penggunaan dana. Salah satu contoh yang menjadi kritik di masyarakat dari aspek ini adalah perencanaan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dinilai kurang matang karena tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau instansi terkait. Di sisi lain, lembaga sosial yang menerima anggaran dari pemerintah masih merasa anggaran yang diberikan



tidak proporsional dan jauh dari mencukupi. Masalah lainnya adalah informasi mengenai penggunaan anggaran belum sepenuhnya diketahui masyarakat, dengan distribusi informasi yang cenderung terbatas pada segelintir pihak saja.

Sebagai solusi, pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap proses perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat dan lembaga terkait. Informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran harus disosialisasikan secara lebih luas melalui media cetak, media sosial, baliho, ataupun “WhatsApp” resmi dari pemerintah untuk menjangkau semua elemen masyarakat dan bisa saling mengawasi serta menjaga pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak. Pengawasan terhadap implementasi anggaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dan kebutuhan publik dapat terpenuhi secara lebih efektif. Untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program dan kebijakan memiliki indikator capaian yang terukur dan mudah dipahami oleh publik. Evaluasi berkala atas kinerja pemerintah serta publikasi hasil evaluasi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pola kerja yang lebih terbuka.

5.3.5 Daya Tanggap

Pada prinsip daya tanggap memiliki empat indikator, yaitu: (1) Ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda; (2) Kecepatan Pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan; (3) penyelesaian pengaduan masyarakat dari Pemda; dan (4) Penyediaan SDM, sarana, dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda. Pada indikator pertama terdiri dari 3 pertanyaan, indikator kedua sampai indikator keempat terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 15 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang

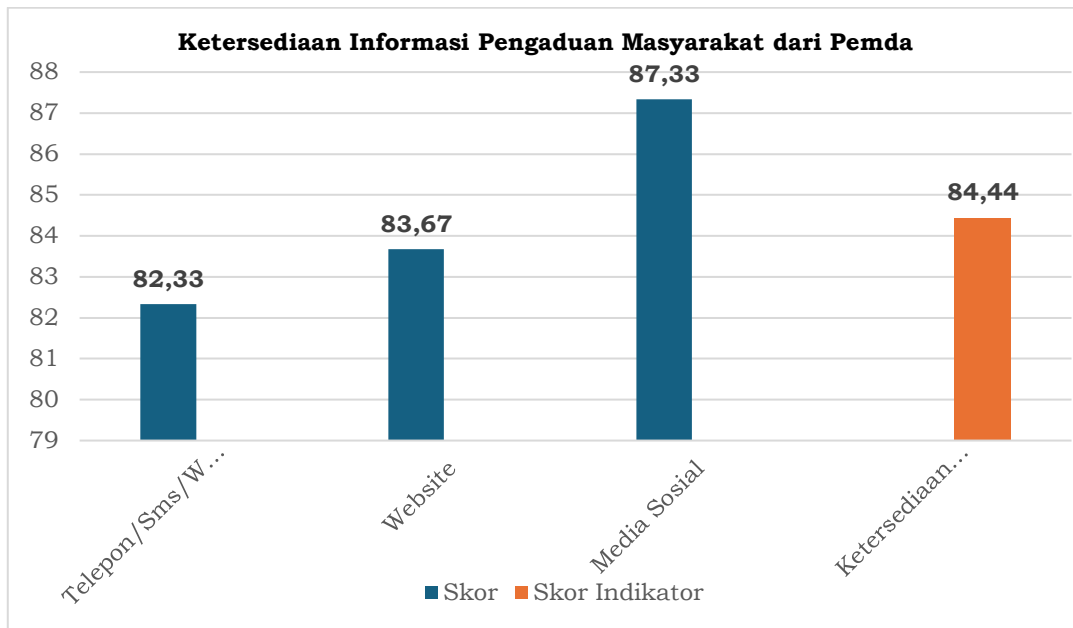
infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Daya Tanggap

Indikator	No	Pertanyaan
Ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui media Telepon/SMS/WhatsApp?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui media <i>Website</i> ?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui Media Sosial?
Kecepatan Pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Ekonomi?
Penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Ekonomi?
Penyediaan SDM, sarana dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Ekonomi?

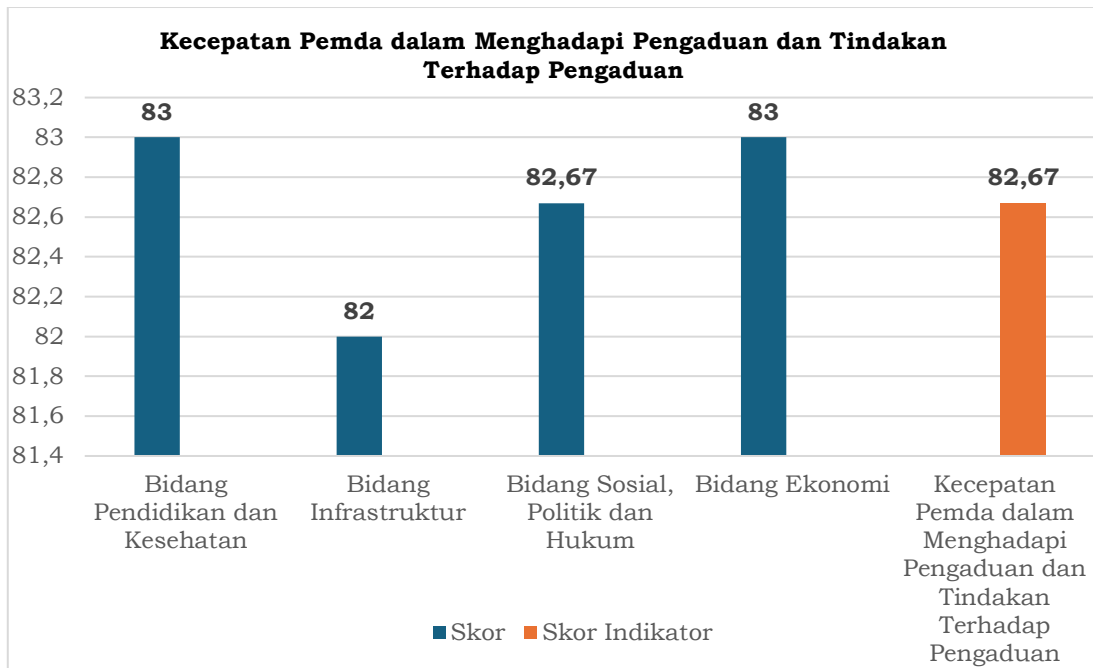


Untuk prinsip daya tanggap memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan pada sebagai berikut.



Gambar 5. 34 Hasil Skor Indikator Ketersediaan Informasi Pengaduan Masyarakat dari Pemda

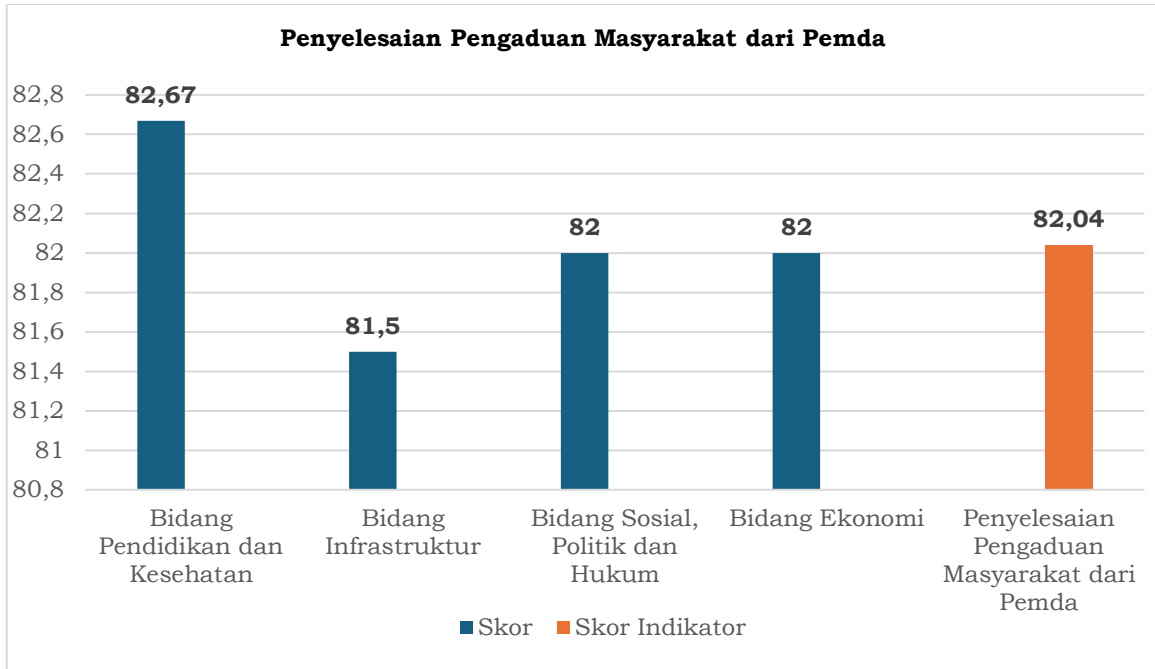
Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator pertama yaitu ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda mendapatkan skor rata-rata 84,44 (4,07) dari tiga pertanyaan, dimana ketiga pernyataan tersebut mendapatkan skor diatas 82. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai dalam hal ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda telah “Sangat Baik”.



Gambar 5. 35 Hasil Skor Indikator Kecepatan Pemda dalam Menghadapi Pengaduan dan Tindakan Terhadap Pengaduan

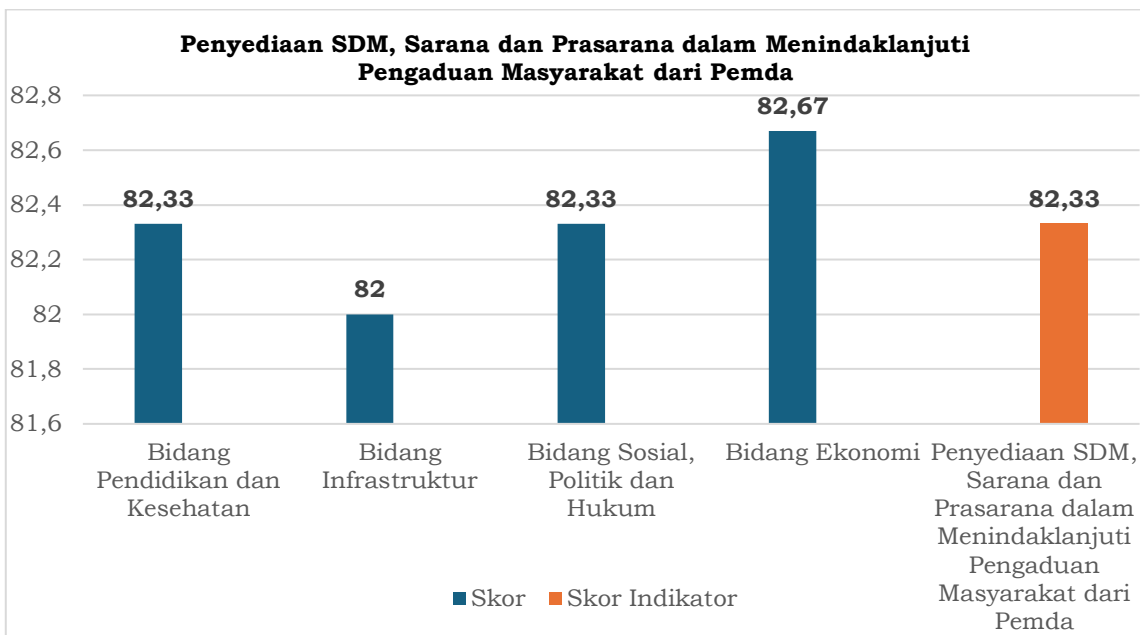
Hasil indikator kedua yaitu kecepatan pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan secara rata-rata dari empat pertanyaan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,67 (4,96), dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 82. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kecepatan pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.





Gambar 5. 36 Hasil Skor Indikator Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari Pemda

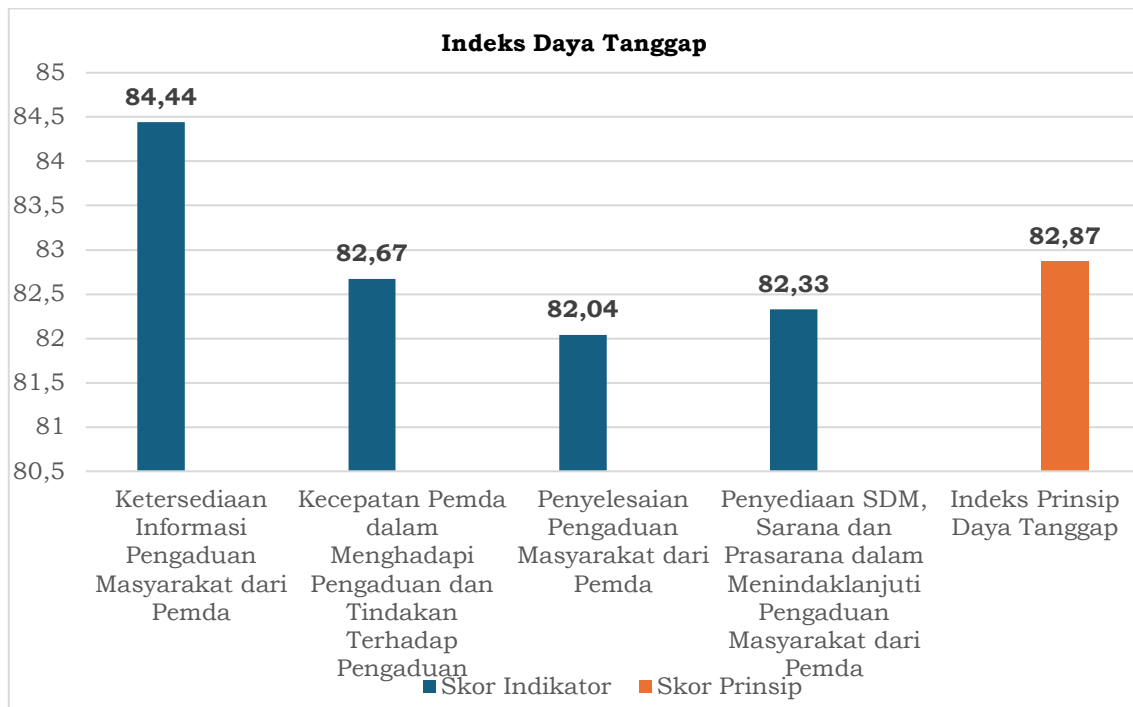
Hasil indikator ketiga yaitu penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemda secara rata-rata dari empat pernyataan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,04 (4,92), dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 81. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat jombang menilai bahwa penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemda telah “Sangat Baik”.



Gambar 5. 37 Hasil Skor Indikator Penyediaan SDM, Sarana, dan Prasarana dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dari Pemda



Hasil indikator keempat yaitu penyediaan SDM, sarana dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda memperoleh skor rata-rata 82,33 (4,94), dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 82. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa penyediaan SDM, sarana, dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 38 Hasil Skor Prinsip Daya Tanggap

Hasil keseluruhan rata-rata keempat indikator membentuk nilai prinsip daya tanggap dengan skor rata-rata yaitu 82,87 (4,97) dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa pemerintah Kabupaten Jombang memiliki daya tanggap yang baik terhadap pengaduan masyarakat. Pemerintah daerah telah menunjukkan respon positif terhadap kritik dan saran masyarakat. Respon yang tanggap terhadap masalah-masalah yang diajukan masyarakat, seperti pengaduan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, sudah dirasakan oleh beberapa kalangan. Adanya sistem pengaduan di beberapa instansi dan upaya untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan prinsip daya tanggap Pemerintah Kabupaten Jombang.



Dari hasil yang sudah baik tersebut, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki sebagai saran dan masukan ke depan. Indikator penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemerintah daerah dalam menangani masalah yang diajukan oleh warga menjadi skor paling rendah. Salah satu yang menjadi masalah di Kabupaten Jombang adalah panjangnya proses pengaduan terkait pengaduan, dimana waktu penyelesaian selama 42 jam. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kecepatan pemerintah terhadap penyelesaian masalah masih perlu ditingkatkan. Beberapa warga mengeluhkan bahwa respon terhadap pengaduan sering kali lambat atau bahkan tidak mendapat tanggapan yang memadai, khususnya dalam masalah layanan darurat. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pengaduan membuat sebagian masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana ketika menghadapi masalah. Respon pemerintah sering kali dianggap kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat, dengan perhatian yang terbatas pada kelompok tertentu atau menunggu masalah menjadi viral sebelum direspon.

Sebagai upaya meningkatkan prinsip daya tanggap pemerintah Kabupaten Jombang, pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem pengaduan yang lebih mudah diakses dan responsif. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan pembentukan tim tanggap darurat khusus yang siaga dalam merespons aduan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui pelatihan di bidang pelayanan publik dan komunikasi efektif. Digitalisasi pengaduan melalui media *online* dan aplikasi *mobile* juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses tanggapan serta memudahkan pemantauan status pengaduan. Sosialisasi mengenai saluran pengaduan dan prosedur pelaporan sebaiknya lebih masif, terutama ke wilayah-wilayah pelosok desa.

5.3.6 Kesetaraan

Pada prinsip kesetaraan memiliki empat indikator, yaitu: (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan; (2) Implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan; (3) Kualitas pemberian pelayanan publik dari Pemda; dan

(4) Peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, dan anggaran) yang memadai. Pada indikator pertama sampai keempat terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 16 pertanyaan yang mencakup 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

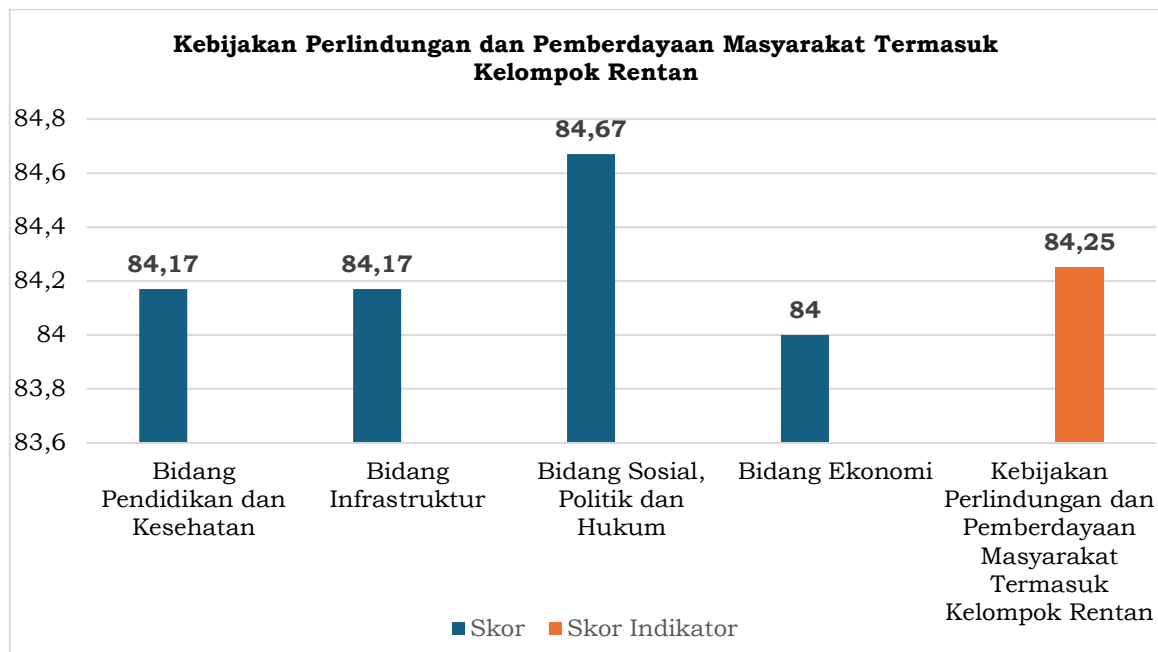
Tabel 5. 8 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Kesetaraan

Indikator	No	Pertanyaan
Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Ekonomi?
Implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Ekonomi?
Kualitas pemberian pelayanan publik dari Pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Infrastruktur?



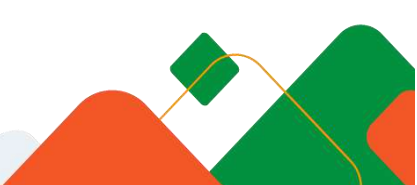
Indikator	No	Pertanyaan
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Ekonomi
Peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Ekonomi?

Untuk prinsip kesetaraan memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.

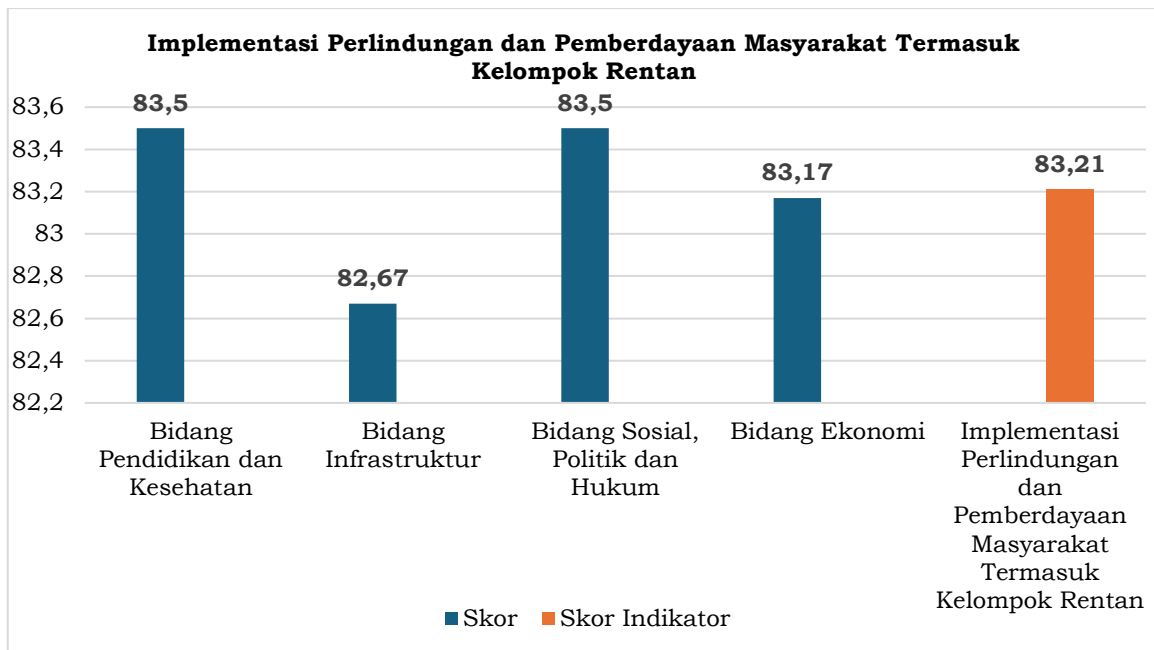


Gambar 5. 39 Hasil Skor Indikator Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan

Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator pertama yaitu kebijakan perlindungan dan pemberdayaan

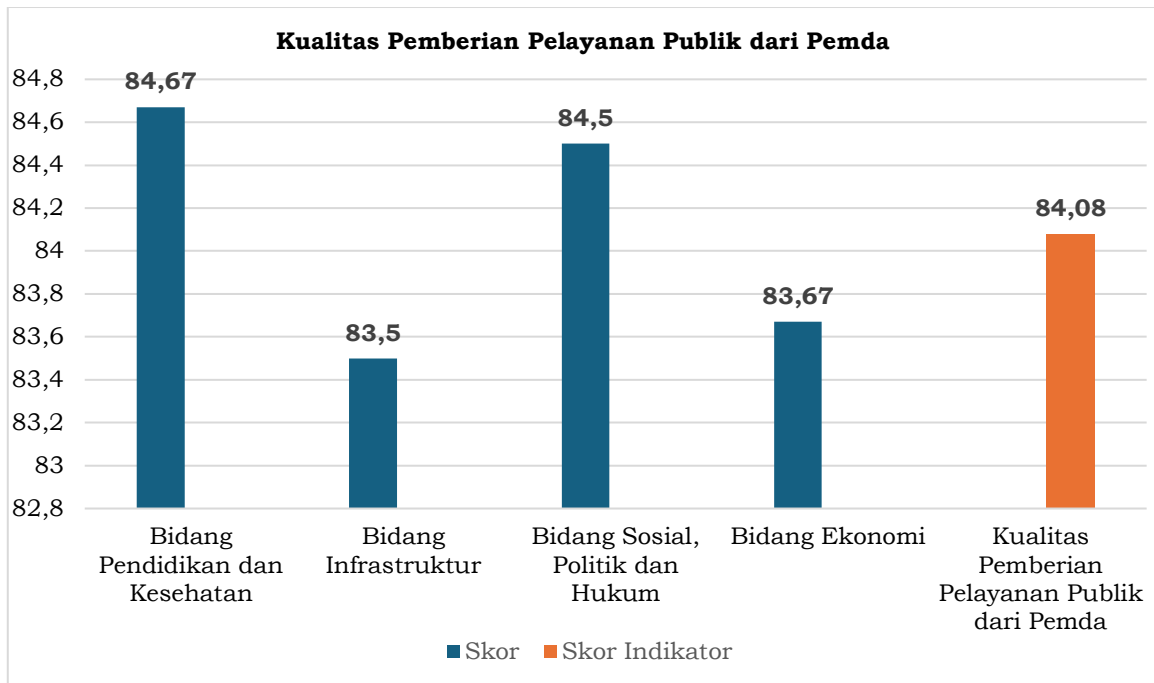


masyarakat termasuk kelompok rentan mendapatkan skor rata-rata 84,25 (5,06) dari empat pertanyaan, dimana keempat pertanyaan tersebut mendapatkan skor diatas 84. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan.



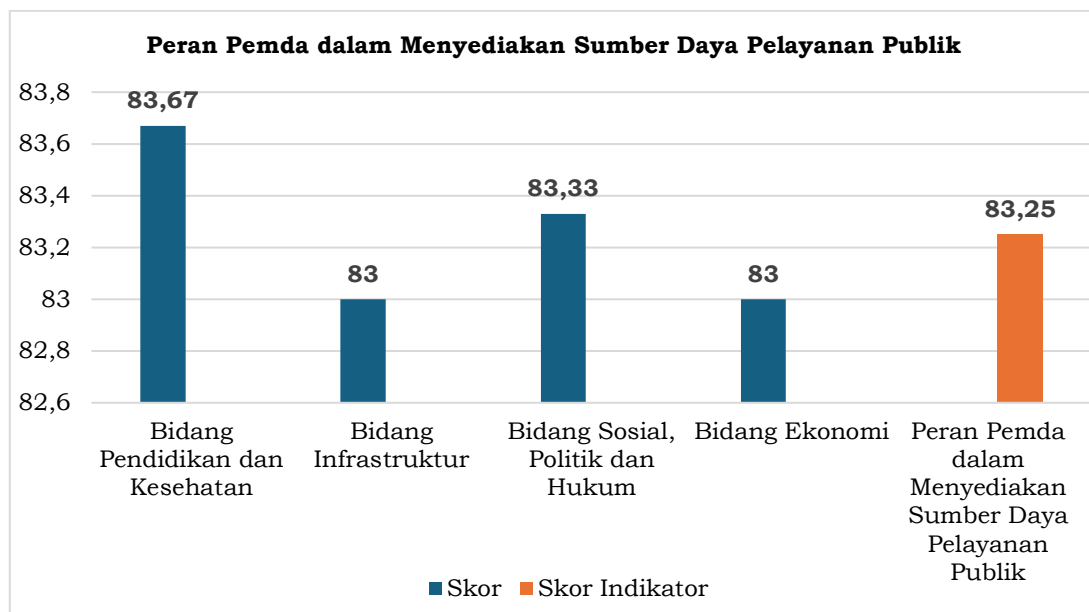
Gambar 5. 40 Hasil Skor Indikator Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan

Hasil indikator kedua yaitu implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan mendapatkan skor 83,21 (4,99) dari empat pertanyaan, dimana keempat pertanyaan tersebut mendapatkan skor diatas 83. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan.



Gambar 5. 41 Hasil Skor Indikator Kualitas Pemberian Pelayanan Publik dari Pemda

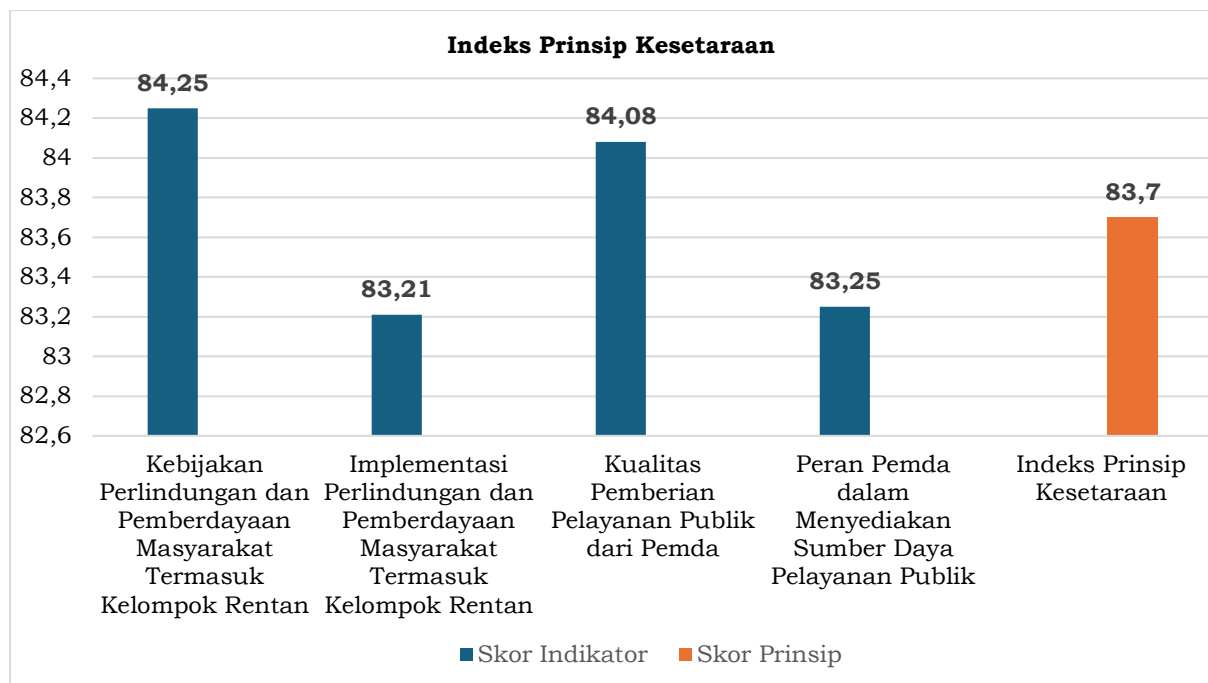
Hasil indikator ketiga yaitu kualitas pemberian pelayanan publik dari pemda mendapatkan skor 84,08 (5,05) dari empat pertanyaan, dimana keempat pernyataan tersebut mendapatkan skor diatas 83,50. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal kualitas pemberian pelayanan publik dari pemda.



Gambar 5. 42 Hasil Skor Indikator Peran Pemda dalam Menyediakan Sumber Daya Pelayanan Publik (SDM, Sarana, Prasarana, Anggaran) yang Memadai



Hasil indikator keempat yaitu peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik mendapatkan skor 83,25 (5,00) dari empat pertanyaan, dimana keempat pertanyaan tersebut mendapatkan skor diatas 83. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik.



Gambar 5. 43 Hasil Skor Prinsip Kesetaraan

Hasil keseluruhan rata-rata keempat indikator membentuk nilai prinsip Kesetaraan dengan skor rata-rata yaitu 83,70 (5,02) dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa prinsip kesetaraan telah berjalan dengan baik. Masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik. Kebijakan kesetaraan yang diterapkan dianggap sudah cukup baik oleh sebagian besar masyarakat, meskipun perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Program pemerintah yang ada telah memberikan dampak positif, dan diharapkan terus konsisten dalam melayani semua kelompok masyarakat dengan adil dan setara.

Dari hasil tersebut masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki sebagai saran dan masukan ke depan. Masih rendahnya skor dibawah nilai indeks kesetaraan berkaitan implementasi perlindungan dan



pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan kesetaraan belum dirasakan secara menyeluruh. Perlindungan ini sebenarnya sudah ada Peraturan Bupati No.20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam perbup tersebut termuat program SLRT "Bianglala Sejahtera" yang merupakan program penanganan fakir miskin, orang tidak mampu, perempuan, dan anak korban kekerasan yang terintegrasi. Beberapa masyarakat menyoroti ketimpangan pelayanan terhadap kelompok rentan, seperti kaum difabel, lansia, dan masyarakat ekonomi rendah, yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang layak dan merata. Selain itu, beberapa masyarakat menyoroti bahwa fasilitas untuk kelompok disabilitas masih minim dan belum terdistribusi dengan baik. Beberapa pelayanan publik juga dianggap cenderung berpihak pada kelompok tertentu atau "pilih kasih," yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam penerimaan bantuan dan akses fasilitas umum.

Saran sebagai peningkatkan aspek kesetaraan, diperlukan langkah-langkah seperti membangun forum diskusi masyarakat untuk memastikan kelompok rentan terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai wadah untuk mendukung kaum rentan agar merasa lebih diperhatikan, pengembangan kelompok usaha produktif berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelayanan publik. Pengoptimalan program SLRT "Bianglala Sejahtera" yang sudah ada agar lebih baik. Selain itu, penerapan kebijakan yang inklusif serta kampanye kesadaran akan kesetaraan gender dan hak-hak minoritas perlu terus digalakan. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan secara transparan melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

5.3.7 Efektivitas dan Efisiensi

Pada prinsip Efektivitas dan efisiensi memiliki empat indikator, yaitu: (1) Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD; (2) Kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah; (3) Kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder; (4) Kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu. Pada indikator pertama dan ketiga terdiri dari 4 pertanyaan, sedangkan indikator kedua dan keempat terdiri dari 1 pertanyaan, sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 10 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

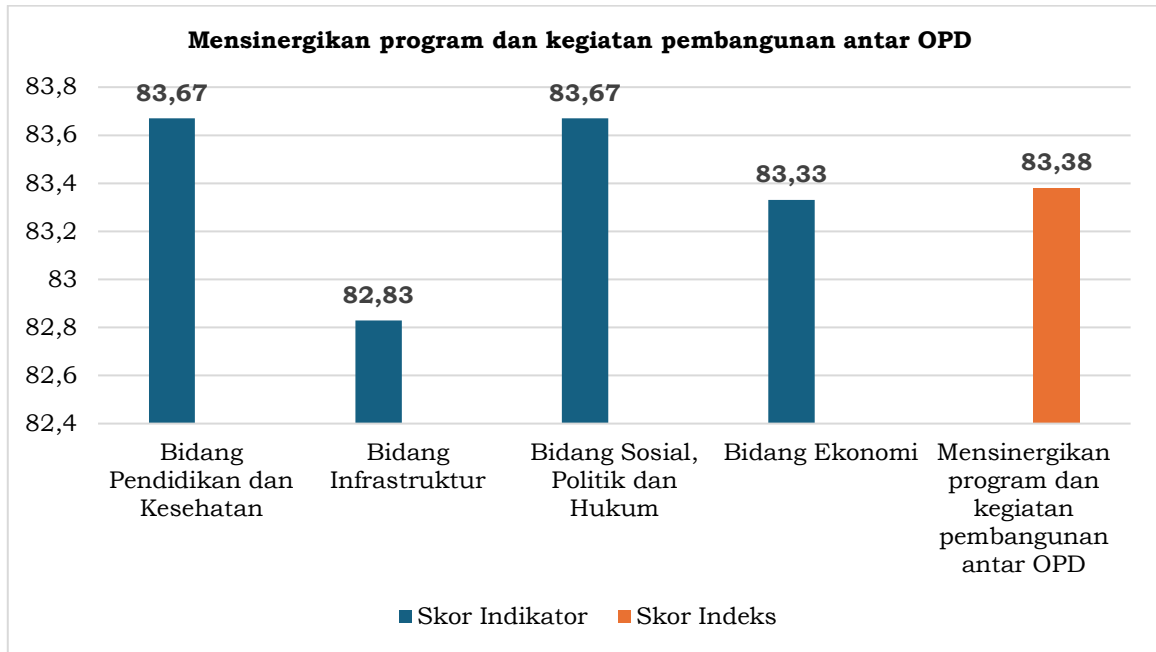
Tabel 5. 9 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Indikator	No	Pertanyaan
Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Ekonomi?
Kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah?
Kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Ekonomi?



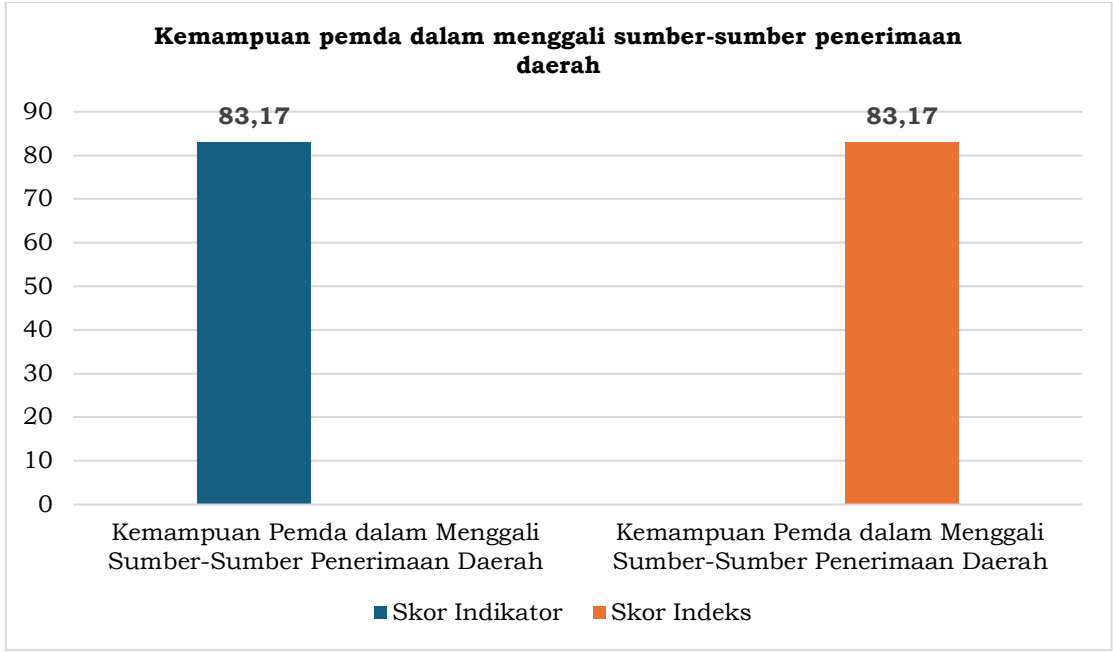
Indikator	No	Pertanyaan
Kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu?

Untuk prinsip efektivitas dan efisiensi memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



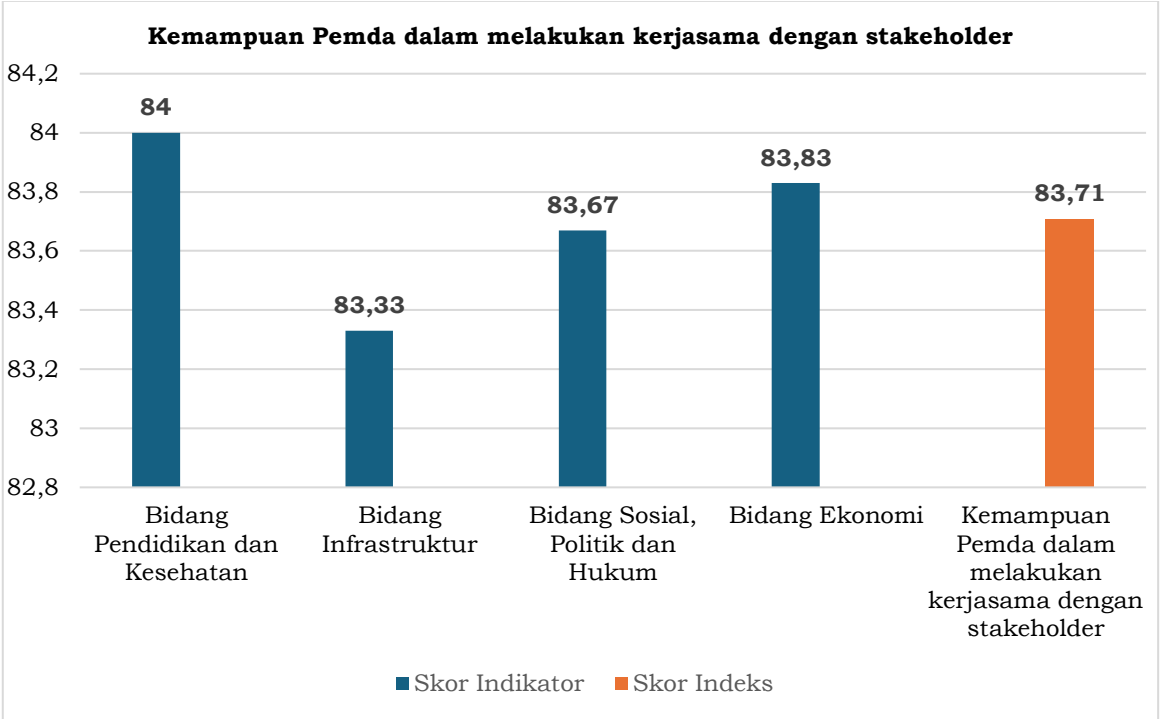
Gambar 5. 44 Hasil Skor Indikator Mensinergikan Program dan Kegiatan Pembangunan Antar OPD

Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator pertama yaitu mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD (organisasi perangkat daerah) mendapatkan skor rata-rata 83,38 (5,00) dari empat pertanyaan, dimana keempat pernyataan tersebut mendapatkan skor diatas 82. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD (organisasi perangkat daerah).

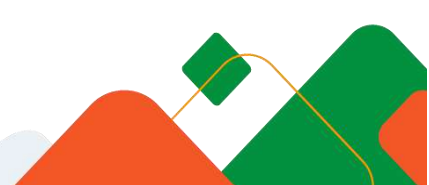


Gambar 5. 45 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Menggali Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Hasil indikator kedua yaitu kemampuan pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah mendapatkan skor 83,17 (4,99) dari satu pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal kemampuan pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

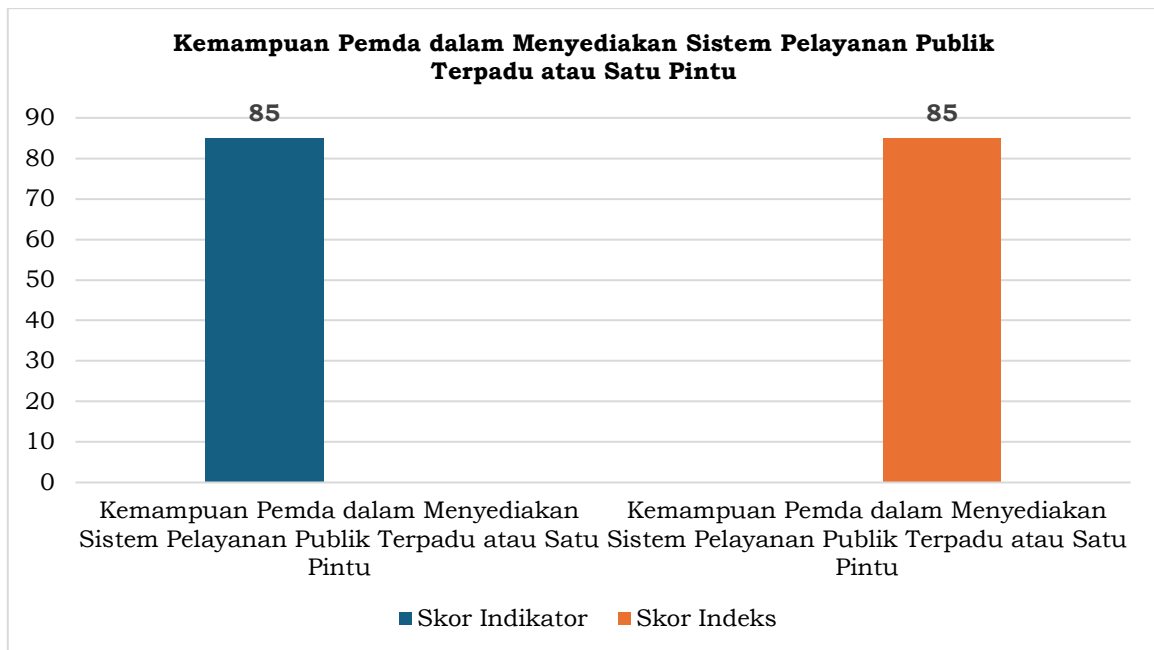


Gambar 5. 46 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Melakukan Kerja Sama dengan Stakeholder



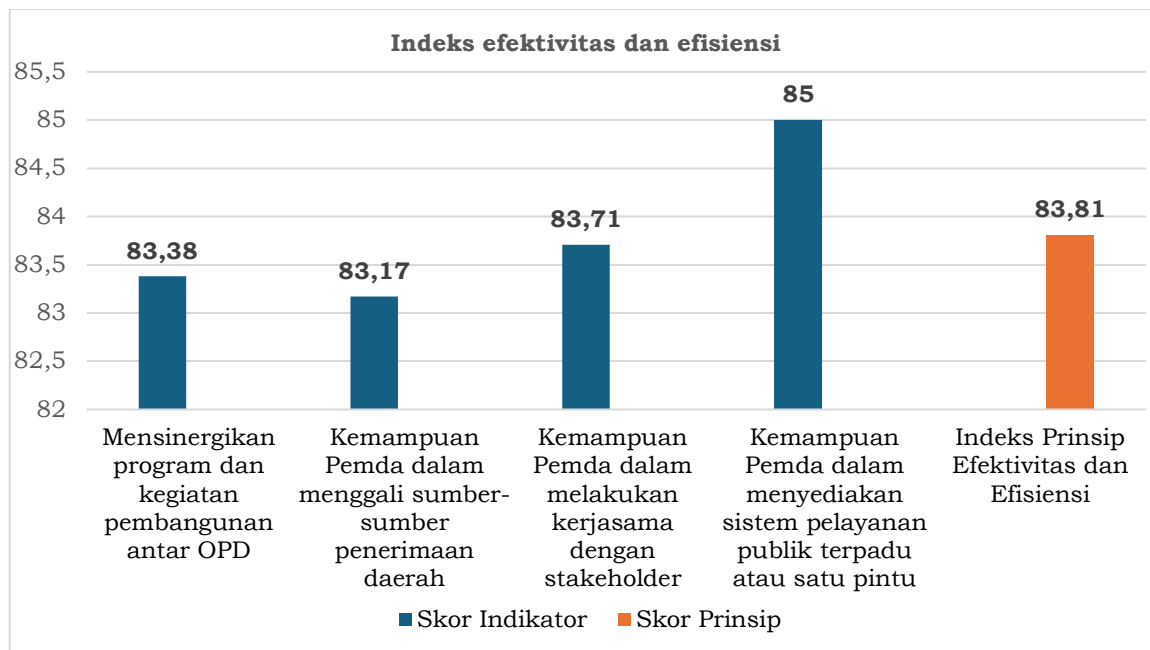


Hasil indikator ketiga yaitu kemampuan pemda dalam melakukan kerjasama dengan *stakeholder* secara rata-rata dari empat pertanyaan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 83,71 (5,02), dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 83. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kemampuan pemda dalam melakukan kerja sama dengan *stakeholder* telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 47 Hasil Skor Indikator Kemampuan Pemda dalam Menyediakan Sistem Pelayanan Publik Terpadu atau Satu Pintu

Hasil indikator keempat dalam kemampuan pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu mendapatkan skor 85,00 (5,10) dari satu pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal kemampuan pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu.



Gambar 5. 48 Hasil Skor Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi

Hasil keseluruhan rata-rata keempat indikator membentuk nilai prinsip efektivitas dan efisiensi dengan skor rata-rata yaitu 83,81 (5,03) dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik. Masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah dalam membangun sistem pelayanan satu pintu yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik, dianggap sudah cukup baik oleh sebagian besar masyarakat. Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) juga mendapat respon positif, yang dianggap sebagai langkah maju dalam penyediaan layanan terpadu yang lebih mudah dijangkau. Masyarakat berharap agar upaya ini terus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari hasil tersebut sudah baik namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki sebagai saran dan masukan kedepan. Skor indikator Kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah menjadi paling rendah. Pemerintah dianggap masih kurang upaya dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jombang. Indikator mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD (organisasi perangkat



daerah) juga masih rendah yang menunjukkan adanya kelemahan koordinasi yang mengakibatkan program sering berjalan sendiri-sendiri tanpa keselarasan. Hal ini tidak hanya mengurangi efisiensi pemanfaatan sumber daya, tetapi juga berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Meskipun pelayanan publik satu pintu telah diterapkan, masih terdapat masyarakat yang merasa proses pengurusan layanan masih berbelit-belit dan kurang efisien. Beberapa masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai ketidakefektifan sinergi antar perangkat daerah, serta adanya prosedur yang terlalu kompleks yang menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan jasa calo. Selain itu, terdapat kritik mengenai kurangnya sosialisasi terhadap sistem pelayanan publik satu pintu, yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan atau manfaat layanan tersebut.

Sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah pemerintah dapat mengelola aset seperti lahan kosong, bangunan, atau fasilitas publik melalui kemitraan dengan swasta atau investor untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan, Mengembangkan sumber penerimaan baru, seperti pajak berbasis lingkungan, retribusi digital, atau pengelolaan aset daerah. Meningkatkan kinerja indikator utama, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah, untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang lebih besar. Dalam sinergitas antar organisasi perangkat daerah, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan mengedepankan komunikasi intensif, sinkronisasi perencanaan, dan pengawasan lintas sektor untuk memastikan setiap program saling mendukung dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. pemerintah daerah disarankan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan dan memperbanyak sosialisasi mengenai layanan satu pintu ke seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pelosok. Peningkatan SDM dan pelatihan bagi pegawai perlu terus dilaksanakan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

5.3.8 Visi Strategis

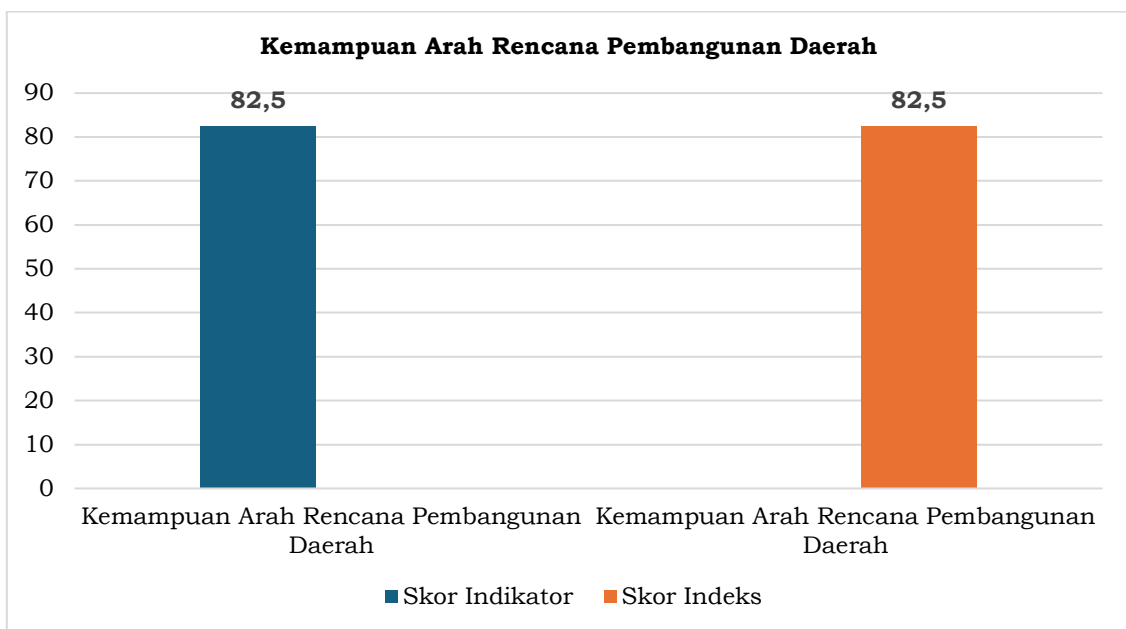
Pada prinsip visi strategis memiliki empat indikator, yaitu: (1) Kemampuan arah Rencana Pembangunan Daerah; (2) Kesesuaian kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan; (3) Langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan; dan (4) Program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan. Pada indikator pertama terdiri dari 1 pertanyaan, indikator kedua sampai keempat terdiri dari 4 pertanyaan sehingga secara keseluruhan pada dimensi ini terdapat 13 pertanyaan yang dimana dalam satu indikator terdapat 4 bidang pendidikan dan kesehatan, bidang infrastruktur, bidang sosial, politik dan hukum, dan bidang ekonomi. Pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Indikator dan Pertanyaan Prinsip Visi Strategis

Indikator	No	Pertanyaan
Kemampuan arah Rencana Pembangunan Daerah	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam merumuskan keempat tujuan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Jombang?
Kesesuaian Kebijakan Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?
Langkah Strategis Pemda Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?

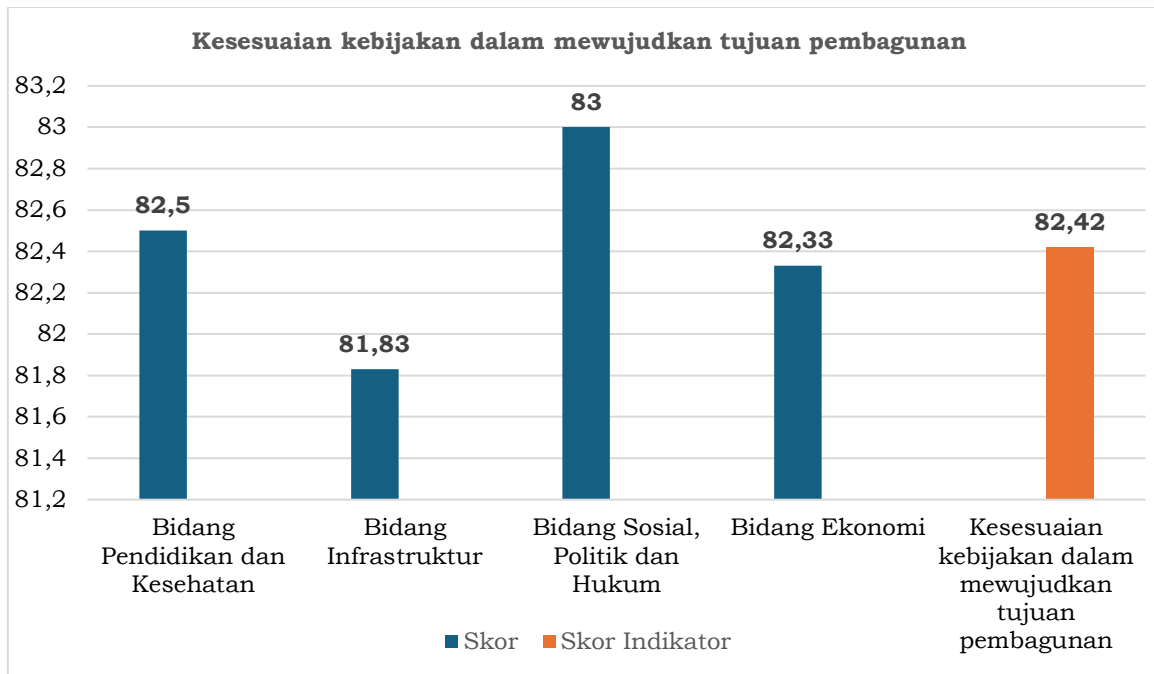
Indikator	No	Pertanyaan
Program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?

Untuk prinsip visi strategis memberi hasil skor masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.



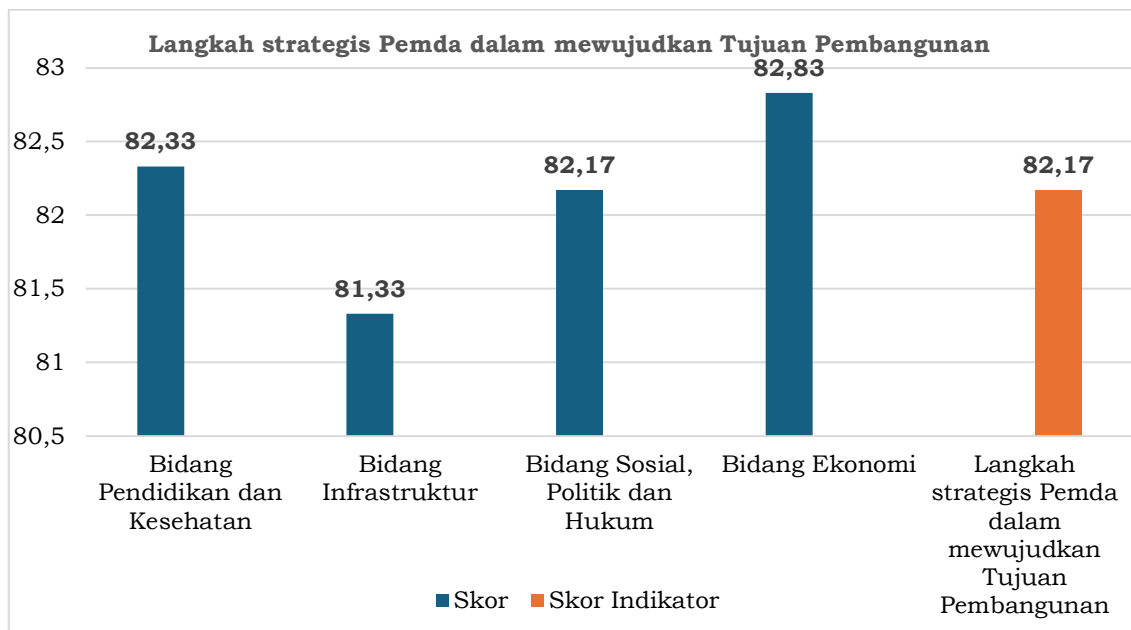
Gambar 5. 49 Hasil Skor Indikator Kemampuan Arah Rencana Pembangunan Daerah

Hasil indikator pertama dalam kemampuan arah rencana pembangunan daerah mendapatkan skor 82,50 (4,95) dari satu pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam hal kemampuan arah rencana pembangunan daerah.



Gambar 5. 50 Hasil Skor Indikator Kesesuaian Kebijakan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan

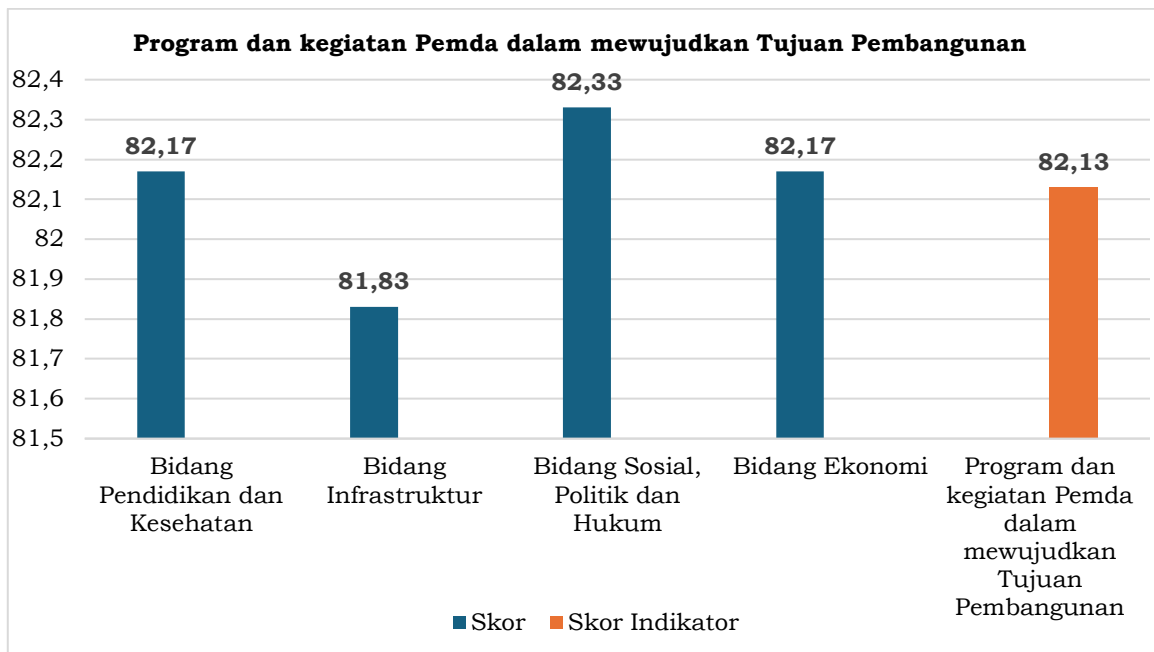
Hasil indikator kedua yaitu kesesuaian kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan secara rata-rata dari empat pertanyaan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,42 (4,95), dimana keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 82. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa kesesuaian kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 51 Hasil Skor Indikator Langkah Strategis Pemda dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan

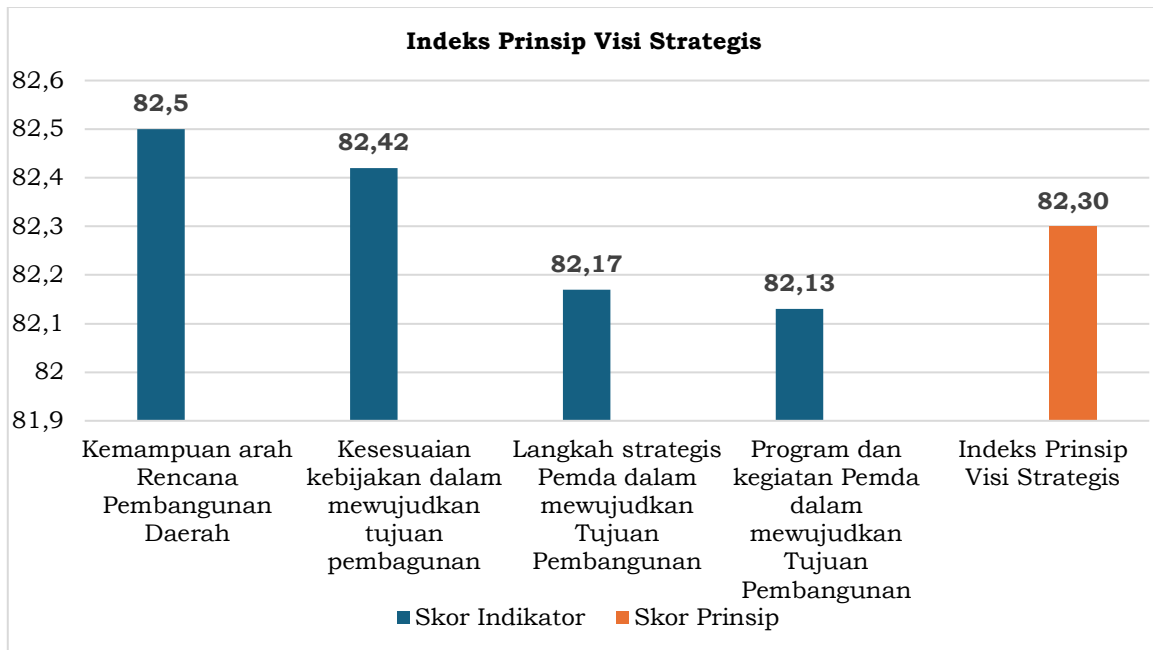


Hasil indikator ketiga yaitu langkah strategis pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan secara rata-rata dari empat pertanyaan yang disampaikan memperoleh skor rata-rata 82,17 (4,93), dari keempat pertanyaan tersebut memperoleh nilai diatas 81. Pertanyaan kedua yakni bidang infrastruktur menjadi paling rendah dengan rata-rata nilai 81,33. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai bahwa langkah strategis pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan telah berjalan dengan “Sangat Baik”.



Gambar 5. 52 Hasil Skor Indikator Program dan Kegiatan Pemda Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan

Berdasarkan pengolahan data tersebut, hasil indikator keempat dapat diketahui bahwa indikator program dan kegiatan pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan mendapatkan skor rata-rata 82,13 (4,93) dari empat pertanyaan, dimana keempat pertanyaan tersebut mendapatkan skor diatas 81. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jombang menilai Pemerintah Kabupaten Jombang “Sangat Baik” dalam program dan kegiatan pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan.



Gambar 5. 53 Hasil Skor Prinsip Visi Strategis

Hasil keseluruhan rata-rata keempat indikator membentuk nilai prinsip visi strategis dengan skor rata-rata yaitu 82,30 (4,94) dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa pemerintah Kabupaten Jombang telah “Sangat Baik” dalam hal pelaksanaan visi strategis. Upaya pemerintah dalam merumuskan visi strategis yang mengarah pada kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat diapresiasi oleh masyarakat. Beberapa menyatakan bahwa visi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan daerah, dan peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder* serta perangkat daerah terkait telah membawa dampak positif. Adanya komitmen untuk mewujudkan visi strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor juga mendapat penghargaan.

Dari hasil tersebut yang sudah baik masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki sebagai saran dan masukan kedepan. Skor indikator program dan kegiatan pemda dalam mewujudkan tujuan pembangunan menjadi paling rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menunjukkan kelemahan dalam strategi komunikasi dan sosialisasi. Kondisi sekarang tentunya pemerintah Kabupaten Jombang sudah melakukan publikasi melalui media massa atau sosial media, namun sebagian masyarakat masih ada yang belum menerima informasi terkait program dan

kegiatan dari pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Sebagian masyarakat merasa bahwa visi strategis pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Beberapa menyatakan bahwa visi seringkali tidak jelas atau terlalu umum, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat luas, khususnya di pelosok daerah. Masih ada anggapan bahwa visi dan tujuan tersebut sering kali hanya sebatas retorika tanpa implementasi dan langkah yang nyata. Selain itu, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil dan kelompok rentan masih dinilai kurang optimal.

Untuk mencapai visi strategis yang lebih inklusif dan berdampak, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan dan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang dapat memperluas dan mengoptimalkan jangkauan informasi melalui media lokal seperti radio, televisi, dan media sosial untuk memastikan masyarakat mengetahui program yang sedang dan akan dilaksanakan. Selain itu, visi strategis sebaiknya disertai dengan indikator pencapaian yang terukur dan konkret.

5.4 Skor Indeks Good Governance

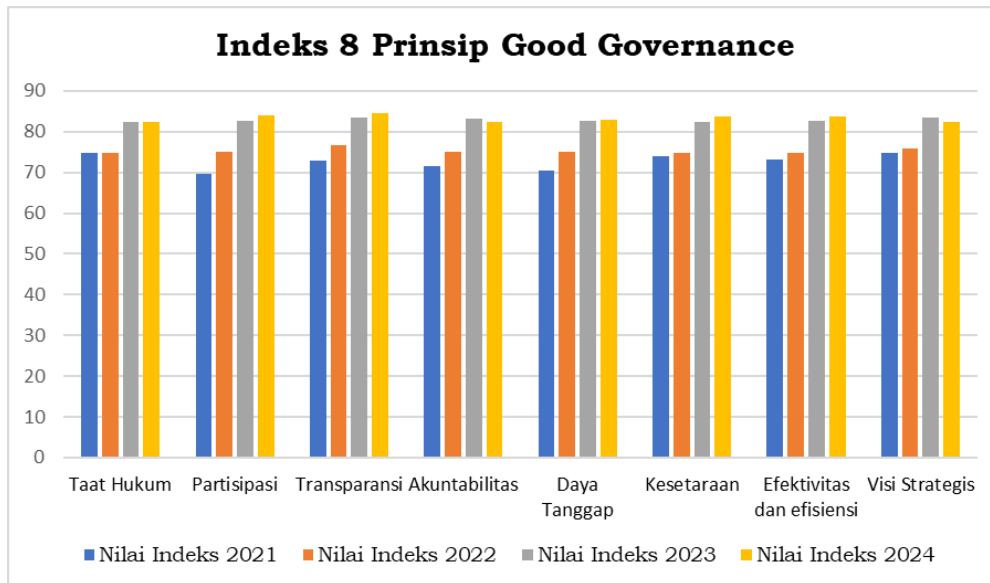
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa Indeks *Good Governance* memiliki delapan dimensi atau prinsip, dengan indeks masing-masing dimensi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 11 Skor Delapan Prinsip Indeks *Good Governance* di Kabupaten Jombang

No	Prinsip	Nilai Prinsip 2021	Nilai Prinsip 2022	Nilai Prinsip 2023	Nilai Prinsip 2024
1	Taat Hukum	74,91	74,80	82,44	82,43
2	Partisipasi	69,75	75,20	82,71	83,89
3	Transparansi	72,80	76,70	83,46	84,60
4	Akuntabilitas	71,48	75,10	83,07	82,45
5	Daya Tanggap	70,57	74,90	82,77	82,87
6	Kesetaraan	74,10	74,80	82,50	83,70




No	Prinsip	Nilai Prinsip 2021	Nilai Prinsip 2022	Nilai Prinsip 2023	Nilai Prinsip 2024
7	Efektivitas dan Efisiensi	73,20	74,80	82,74	83,81
8	Visi Strategis	74,88	75,80	83,41	82,30



Gambar 5. 54 Grafik Skor Delapan Prinsip Indeks Good Governance di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2024

Data Indeks *Good Governance* di Kabupaten Jombang dari 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan indeks dari 8 prinsip *Good Governance* selama empat tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Prinsip-prinsip yang diukur meliputi Taat Hukum, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Daya Tanggap, Kesetaraan, Efektivitas dan Efisiensi, serta Visi Strategis.

Taat Hukum menunjukkan tren kenaikan yang stabil setiap tahunnya. Nilai indeks pada 2021 dimulai di sekitar angka 70-an dan meningkat secara bertahap hingga mencapai hampir 80 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dalam sistem pemerintahan. Partisipasi juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan prinsip lainnya pada awal tahun 2021. Peningkatan signifikan pada 2024 mengindikasikan adanya upaya nyata untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Transparansi dan Akuntabilitas



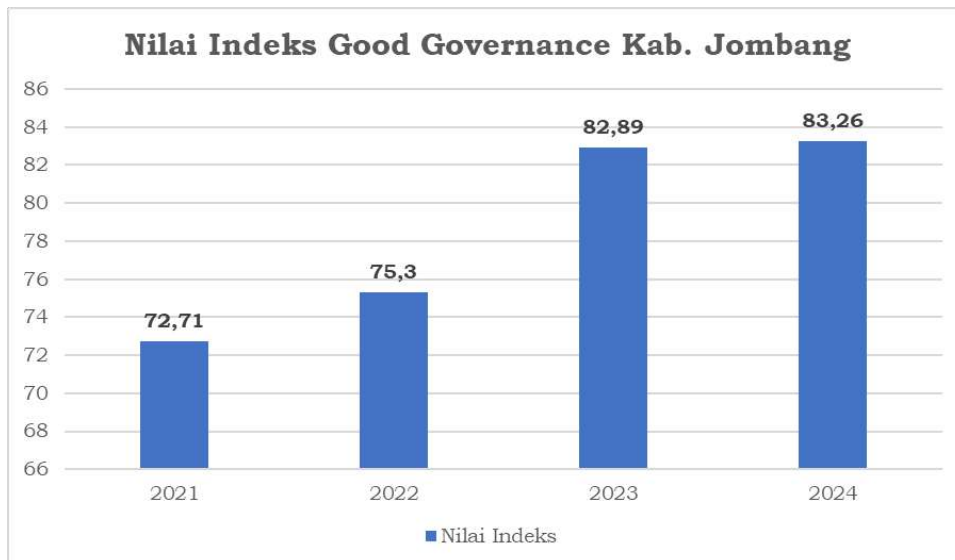
mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan terus menunjukkan pertumbuhan hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam pelaporan dan keterbukaan informasi publik.

Daya Tanggap menunjukkan pola peningkatan yang serupa, dengan nilai indeks yang mendekati prinsip Taat Hukum. Perubahan ini mengindikasikan peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kesetaraan memperlihatkan tren yang stabil namun berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan prinsip lain, mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan. Efektivitas dan Efisiensi mengalami kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya upaya optimalisasi proses pemerintahan. Visi Strategis memiliki indeks yang tinggi secara konsisten selama empat tahun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam merancang visi jangka panjang yang jelas dan relevan.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan adanya peningkatan signifikan dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari peningkatan kepatuhan hukum hingga penguatan visi strategis. Upaya yang konsisten ini menjadi sinyal positif untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Tabel 5. 12 Nilai Indeks Good Governance Kabupaten Jombang 2021-2024

No	Tahun	Nilai Indeks
1	2021	72,71
2	2022	75,30
3	2023	82,89
4	2024	83,26



Gambar 5. 55 Nilai Indeks Good Governance Kabupaten Jombang 2021-2024

Grafik diatas menunjukkan perkembangan Nilai Indeks Good Governance Kabupaten Jombang dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, nilai indeks menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, nilai indeks berada di sekitar angka 72, mencerminkan tahap awal penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2022 dengan nilai indeks mencapai sekitar 75, yang menandakan adanya upaya peningkatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai indeks yang melonjak hingga sekitar 83, menunjukkan adanya progres signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Tahun 2024 mempertahankan tren positif dengan nilai indeks tetap tinggi di angka yang sama, mencerminkan stabilitas dan konsistensi dalam implementasi tata kelola yang baik. Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jombang berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya secara bertahap, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbaikan sistem, kebijakan, dan implementasi program-program yang mendukung *Good Governance*. Hasil ini memberikan sinyal positif terhadap pembangunan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di masa depan.

Respons positif di 2023 merupakan hasil dari reformasi/perubahan metode yang diimplementasikan setelah penurunan pada 2022 yakni dengan cara mengubah proporsi responden internal yang di tahun 2022 (internal: eksternal = 50:50) menjadi proporsi (Internal: eksternal = 40:60). Pihak




internal yang dimaksud adalah dari ASN/OPD/Dinas pelayanan publik lainnya yang terkait, sedangkan pihak eksternal yang dimaksud adalah dari pihak *privat sector* dan *civil society*. Tetapi penurunan di tahun berikutnya menunjukkan bahwa mempertahankan kualitas *governance* memerlukan pendekatan yang lebih konsisten dan adaptif. Untuk mempertahankan indeks di level yang optimal, evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap setiap prinsip *governance* sangat diperlukan, sehingga pemerintah dapat terus menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan kondisi internal dan eksternal yang ada. Tren positif ini berlanjut di 2024 dengan sedikit kenaikan menjadi 83,26, menunjukkan bahwa peningkatan tersebut berhasil dipertahankan, meskipun tidak sebesar kenaikan pada 2023.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Jombang berhasil meningkatkan tata kelola pada 2023, upaya untuk menjaga konsistensi di 2024 masih menghadapi tantangan. Kenaikan tipis pada 2024 mencerminkan perlunya perbaikan lebih lanjut untuk mempertahankan capaian Indeks *Good Governance* secara stabil dan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya stabilitas kebijakan dan keberlanjutan dalam penerapan *good governance*.

5.5 Perhitungan Proyeksi Indeks *Good Governance*

Dengan digunakannya Indeks *Good Governance* sebagai ukuran keberhasilan dalam mewujudkan target dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dalam tujuan pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik” maka perlu dilakukan perhitungan proyeksi Indeks *Good Governance* pada tahun-tahun selanjutnya dimana hasil proyeksi tersebut dapat dipergunakan sebagai target pada tahun 2025 dan 2026.

Proyeksi Indeks *Good Governance* merupakan metode hitung prediksi nilai Indeks *Good Governance* di tahun-tahun selanjutnya berdasarkan kondisi saat ini diasumsikan sama dengan kondisi selanjutnya.



Kecenderungan dalam penentuan proyeksi perhitungan Indeks *Good Governance* dilihat dari faktor-faktor berikut:

1. Ketaatan Hukum, yang meliputi kualitas pelaksanaan penegakan hukum dan ketersediaan dasar hukum yang ada di daerah;
2. Partisipasi, yang meliputi intensitas kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan di daerah dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Transparansi, yang meliputi ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik dan ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik;
4. Akuntabilitas, yang meliputi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja;
5. Daya tanggap, yang meliputi ketersediaan dan kejelasan forum pengaduan dan kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan;
6. Kesetaraan, yang meliputi ketersediaan jaminan semua orang yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah dan kualitas pemberian pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah daerah;
7. Efektivitas dan efisiensi, yang meliputi efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
8. Visi strategis, yang meliputi kejelasan arah rencana pembangunan daerah dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi misi; dan
9. Pendapat, saran, dan masukan masyarakat dalam pelayanan dan pemerintah daerah.

Proyeksi yang digunakan menggunakan rumus proyeksi geometrik, dimana pertumbuhan Indeks *Good Governance* diasumsikan mengikuti Rata-rata IGG per tahun dari 2021. Rata-rata indeks didapatkan 2,15 % per tahun, maka dibulatkan angka 2% diproyeksi 6 tahun kedepan. Sehingga rumus proyeksi geometrik Indeks *Good Governance* adalah sebagai berikut:

$$ICG_n = ICG_0 \times (1 + r)^n$$

Keterangan:

IGG_n = IGG pada tahun n

IGG₀ = IGG pada tahun awal

1 = Angka konstanta

r = Angka peningkatan yang diproyeksikan (%) yaitu 2 %

n = Jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n

Berdasarkan rumus proyeksi tersebut didapatkan proyeksi Indeks *Good Governance* sampai dengan 6 (enam) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Hasil Proyeksi Indeks *Good Governance* 6 (enam) Tahun ke Depan

No	TAHUN KE - n	Indeks <i>Good Governance</i>
1	Tahun ke - 0 (2024)	83,26
2	Tahun ke - 1 (2025)	84,93
3	Tahun ke - 2 (2026)	86,62
4	Tahun ke - 3 (2027)	88,36
5	Tahun ke - 4 (2028)	90,12
6	Tahun ke - 5 (2029)	91,93
7	Tahun ke - 6 (2030)	93,76

Sumber: Hasil Penelitian IGG, 2024

Berdasarkan tabel diatas diharapkan pada tahun 2030 kedepan Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang bisa mencapai nilai 93,76 dengan mengikuti trend kenaikan pertahun 2%. Kenaikan nilai Indeks *Good Governance* ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Jombang kepada masyarakat semakin baik dan berbenah sehingga pembangunan daerah Kabupaten Jombang tercapai.



BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kegiatan survei Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang tahun 2024 masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan nilai 83,26. Nilai tersebut diperoleh secara kumulatif dari 8 prinsip pengukuran, yaitu: Taat Hukum 82,43; Partisipasi 83,89; Transparansi 84,60; Akuntabilitas 82,45; Daya Tanggap 82,87; Kesetaraan 83,70; Efektivitas dan efisiensi 83,81; dan Visi strategis 82,30.
2. Nilai Indeks *Good Governance* di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang naik setiap tahun dari 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 72,71 dan mengalami kenaikan pada 2022 menjadi 75,30. Pada 2023, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai nilai 82,89, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau reformasi besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan daerah dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 83,26.
3. Dari kajian didapatkan hasil penilaian dari masing-masing prinsip sebagai berikut:
 - Prinsip Taat Hukum menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya yang baik dalam menegakkan peraturan, terutama melalui sosialisasi, komunikasi, edukasi, serta rehabilitasi terhadap pelanggaran hukum. Skor rata-rata menunjukkan persepsi positif masyarakat mengenai pemenuhan aspek hukum.
 - Prinsip Partisipasi menunjukkan pemerintah dinilai berhasil dalam melibatkan masyarakat pada proses pengambilan keputusan publik, khususnya melalui kegiatan seperti Musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum ini mendapatkan respons positif, yang menunjukkan kepuasan terhadap keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan masyarakat.




- Prinsip transparansi masyarakat Kabupaten Jombang memberikan penilaian tinggi pada aspek keterbukaan informasi publik, seperti akses informasi melalui situs web dan media sosial pemerintah. Ini menunjukkan adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah.
 - Prinsip akuntabilitas menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang mendapat penilaian baik terkait penggunaan sumber daya yang akuntabel dan transparan.
 - Prinsip daya tanggap menunjukkan pemerintah dinilai responsif dalam menangani pengaduan masyarakat, khususnya terkait layanan untuk korban kekerasan. Masyarakat merasa bahwa pemerintah cukup cepat dalam merespons kritik dan saran, meskipun masih ada kebutuhan peningkatan dalam sosialisasi dan kecepatan merespons.
 - Prinsip kesetaraan menunjukkan pemerintah telah menyediakan layanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Persepsi masyarakat terhadap perlakuan yang adil dalam akses pelayanan publik menunjukkan bahwa pemerintah sudah berupaya menciptakan kesetaraan di Kabupaten Jombang.
 - Prinsip efektivitas dan efisiensi menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang dinilai efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan program-programnya.
 - Prinsip visi strategis menunjukkan meskipun hasil skor yang baik, prinsip ini memperoleh skor terendah di antara prinsip lainnya. Penilaian masyarakat melihat perlunya peningkatan dalam penyusunan dan sosialisasi visi jangka panjang yang lebih jelas.
4. Proyeksi dengan menggunakan pertumbuhan nilai Indeks *Good Governance* 2,15 % per tahun. Pada tahun 2030 nilai Indeks *Good Governance* Kabupaten Jombang bisa mencapai nilai 93,76.



6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian Indeks *Good Governance* (IGG) Kabupaten Jombang tahun 2024, berikut adalah saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik:

- 1) Visi Strategis (Menyelenggarakan dan Mengoptimalkan Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Desa/Kelurahan) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di Kabupaten Jombang) Pemerintah Kabupaten Jombang perlu memperluas dan mengoptimalkan jangkauan informasi melalui media lokal seperti radio, televisi, dan media sosial untuk memastikan masyarakat mengetahui program yang sedang dan akan dilaksanakan. Visi strategis disertai dengan indikator pencapaian yang terukur dan konkret.
- 2) Taat Hukum (Meningkatkan Transparansi dan Konsistensi Dalam Penegakan Hukum): Pemerintah disarankan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum tanpa memandang posisi atau status sosial pelaku. Dalam hal edukasi, Pemkab Jombang dapat membuat iklan layanan masyarakat dalam mensosialisasikan perda yang baru melalui media sosial, ataupun media cetak, serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjalankan aturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya dengan penegakan peraturan daerah serta merehabilitasi pelaku pelanggaran hukum dengan tegas dan dapat membuat efek jera. Kemudian memberikan apresiasi berupa reward bagi masyarakat yang telah melaporkan tindak pelanggaran hukum di Kabupaten Jombang. Sosialisasi perundang-undangan mengenai kebijakan perlu ditingkatkan melalui media sosial, grup “WhatsApp” RT/RW, atau program kunjungan langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengaduan masyarakat dengan membangun platform yang lebih responsif dan transparan, sehingga




masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan dan memantau tindak lanjutnya.

- 3) Akuntabilitas (Konsistensi dalam Penerapan Akuntabilitas): Melakukan evaluasi ulang terhadap proses perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat dan lembaga terkait. Informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran harus disosialisasikan secara lebih luas melalui media cetak, media sosial, baliho, ataupun “WhatsApp” resmi dari pemerintah untuk menjangkau semua elemen masyarakat dan bisa saling mengawasi serta menjaga pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak. Pengawasan terhadap implementasi anggaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dan kebutuhan publik dapat terpenuhi secara lebih efektif. Untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program dan kebijakan memiliki indikator capaian yang terukur dan mudah dipahami oleh publik. Evaluasi berkala atas kinerja pemerintah serta publikasi hasil evaluasi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pola kerja yang lebih terbuka.
- 4) Daya Tanggap (Pembentukan Tim Tanggap Darurat Khusus yang Siaga Dalam Merespons Aduan Masyarakat, Serta Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Pelatihan di Bidang Pelayanan Publik dan Komunikasi Efektif): Memperkuat sistem pengaduan yang lebih mudah diakses dan responsif dengan digitalisasi pengaduan melalui media *online* dan aplikasi *mobile* untuk mempercepat proses tanggapan serta memudahkan pemantauan status pengaduan. Sosialisasi mengenai saluran pengaduan dan prosedur pelaporan sebaiknya lebih masif, terutama ke wilayah-wilayah pelosok desa.
- 5) Efektivitas dan Efisiensi (Pengelola Aset Seperti Lahan Kosong, Bangunan, atau Fasilitas Publik Melalui Kemitraan dengan Swasta atau Investor untuk Menciptakan sumber Pendapatan Berkelanjutan):



Mengembangkan sumber penerimaan baru, seperti pajak berbasis lingkungan, retribusi digital, atau pengelolaan aset daerah. Peningkatkan kinerja indikator utama, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah, untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang lebih besar. Dalam sinergitas antar organisasi perangkat daerah, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan mengedepankan komunikasi intensif, sinkronisasi perencanaan, dan pengawasan lintas sektor untuk memastikan setiap program saling mendukung dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. penyederhanaan prosedur pelayanan dan memperbanyak sosialisasi mengenai layanan satu pintu. Peningkatan SDM dan pelatihan bagi pegawai.

- 6) Kesetaraan (Membangun Forum Diskusi Masyarakat Untuk Memastikan Kelompok Rentan Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Wadah Untuk Mendukung Kaum Rentan Agar Merasa Lebih Diperhatikan): Pengembangan kelompok usaha produktif berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelayanan publik. Pengoptimalan program SLRT "Biaglala Sejahtera" yang sudah ada agar lebih baik. Selain itu, penerapan kebijakan yang inklusif serta kampanye kesadaran akan kesetaraan gender dan hak-hak minoritas perlu terus digalakan.
- 7) Partisipasi (Memperbanyak Diskusi dan Penyerapan Aspirasi Secara Berkala Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat): Memperbanyak diskusi dan penyerapan aspirasi secara berkala, baik formal ataupun secara nonformal yakni melalui kegiatan antar RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Selain itu, membentuk forum aspirasi yang inklusif dan rutin diadakan dapat membantu pemerintah mendengar langsung kebutuhan masyarakat dari berbagai golongan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat



dan membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap kebijakan dan program-program yang dijalankan.


- 8) **Transparansi (Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Transparansi Dengan Menyajikan Data yang Lebih Komprehensif dan Mudah Dipahami):** Pemerintah disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan memanfaatkan lebih banyak platform digital, seperti media sosial dan *website* resmi, dengan menyajikan data yang lebih komprehensif dan mudah dipahami. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan dengan publikasi rutin yang menjelaskan detail alokasi dan realisasinya kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat memperluas cakupan sosialisasi melalui media fisik seperti videotron, banner, atau papan informasi di tempat strategis agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Langkah-langkah ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik.

Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan nilai IGG di tahun-tahun mendatang, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Azfirmawarman, D., Magriast, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(5), 117–125.
- Bappenas. (2007). *Indikator good public governance: Penerapan tata pemerintahan yang baik*. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Bappenas.
- Chang, L. (1994). A Psychometric Evaluation of 4-Point and 6-Point Likert-Type Scales in Relation to Reliability and Validity. *APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT*, 18(3), 205–215.
<http://www.copyright.com/>
- Chomeya, R. (2010). Quality of Psychology Test Between Likert Scale 5 and 6 Points. *Journal of Social Sciences*, 6(3), 399–403.
<https://www.researchgate.net/publication/49619892>
- Damayanti, Y., & Ratnasari, V. (2013). Pemodelan Penduduk Miskin di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR). *JURNAL SAINS DAN SENI POMITS*, 2(2), 329–334.
- Fadhillah, N. R., & Tauran. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SENTUL KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 1–11. <http://www.kompas.com>,
- Hafidz, A. (2024, Mei 4). *Pemkab Jombang Sabet WTP 11 Kali Berturut-turut Dari BPK, Begini Kata Pj Bupati Jombang*.
<https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/664613726/pemkab-jombang-sabet-wtp-11-kali-berturut-turut-dari-bpk-begini-kata-pj-bupati-jombang>.
- Hasibuan, D. D. (2017). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (STUDI KASUS: KPP PRATAMA MALANG SELATAN). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Kusuma, A. (2024, Februari 29). *Korban Kasus Kekerasan Di Jombang Masih Didominasi Anak-anak*.



<https://rri.co.id/index.php/daerah/575727/korban-kasus-kekerasan-di-jombang-masih-didominasi-anak-anak>.

Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.

Pramesti Cahyani, M., Suprpto, & Rachmadi, A. (2019). Evaluasi Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 4.1 Domain Plan and Organise dan Monitor and Evaluate pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(5), 5175–5182. <http://j-ptiik.ub.ac.id>

Rinaldi, M., Nainggolan, E., Rezeki, S., & Yani Panggabean, F. (2022). Analisis Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara pada Kondisi Pandemi Covid 19. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 143–151.

Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>

Wolfensohn, J. D. (1999). *Governance and Development*. Speech at the World Bank Annual Meetings.

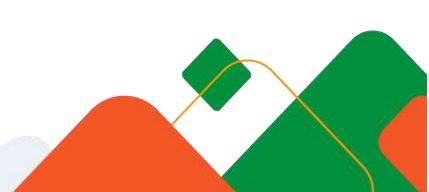
World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank Publications.

Yuliasuti, A., & Syarif, E. (2021). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 88–102. <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.107>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto survei enumerator dan briefing survei







Lampiran 2. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial Romantik



Jombang, 4 September 2024

Nomor : B-497/35175/HM.310/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial

Yth. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektorial berikut:
judul : Penyusunan Indeks Good Governance (IGG) Kabupaten Jombang Tahun 2024
Penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:
Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas : **V-24.3517.018**
Rekomendasi : Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jombang

Mohammad Farikhin



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JOMBANG**

Jalan Airlangga 46a, Jelakombo, Jombang, 61412
Telp. (0321) 861485, E-mail: bps3517@bps.go.id | Website: jombangkab.bps.go.id

Lampiran Surat

Nomor : B-497/35175/HM.310/2024

Tanggal : 4 September 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Penyusunan Indeks Good Governance (IGG) Kabupaten Jombang Tahun 2024
Penyelenggara	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.3517.018
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Survei harap dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah diberikan rekomendasi, jika ada perubahan diharapkan melaporkan ke BPS Kabupaten Jombang2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

Lampiran 4. List Pertanyaan setiap prinsip

Indikator	No	Pertanyaan
Taat Hukum		
Kecukupan Peraturan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecukupan peraturan untuk mengatur Bidang Ekonomi?
Reward and Punishment	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang dilaksanakan Pemda sebagai upaya penegakan hukum pada Bidang Ekonomi?
Kinerja Pemda dalam Sosialisasi Perundang-Undangan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui media cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Pertemuan Formal?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat melalui Pertemuan Kultural?
Kinerja Pemerintah Mencegah Terjadinya Masalah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah ketertiban umum?
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi, Edukasi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Media Cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Pertemuan Formal?



Indikator	No	Pertanyaan
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui Pertemuan Kultural?
Kinerja Pemda Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan tindakan persuasif terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan tindakan melalui pemberian surat peringatan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan Tindakan melalui proses pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja Pemda dalam melakukan Tindakan melalui eksekusi hasil keputusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hukum?
Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Terkait	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Sosial, Politik dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan terkait Bidang Ekonomi?
Kebijakan yang Berpihak Pada Kelompok Rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan?
	2	Kelompok Anak
	3	Kelompok Disabilitas
	4	Kelompok Minoritas
Partisipasi		
Indikator	No	Pertanyaan
Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?
Ketersediaan Peraturan Untuk Mengakomodir Keterlibatan Berbagai Kelompok Dalam Merumuskan Peraturan Daerah/Perbup	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok Agama dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Usia dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Jenis Kelamin dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Golongan dalam merumuskan Peraturan Daerah/Perbup?



Indikator	No	Pertanyaan
Mengakomodir Keterlibatan Kelompok Dalam Perencanaan Program Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan kelompok Agama dalam Perencanaan Program Pembangunan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Usia dalam Perencanaan Program Pembangunan?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Jenis Kelamin dalam Perencanaan Program Pembangunan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas peraturan untuk mengakomodir keterlibatan Kelompok Golongan dalam Perencanaan Program Pembangunan?
Pemanfaatan Forum Konsultasi Dalam Penyusunan Kebijakan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangkab dalam penyusunan kebijakan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangcam dalam penyusunan kebijakan?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Musrenbangdes dalam penyusunan kebijakan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas pemanfaatan forum konsultasi Konsultasi Formal/Informal dalam penyusunan kebijakan?
Keberadaan Media Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas keberadaan media massa lokal sebagai penyalur aspirasi masyarakat?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas keberadaan media massa nasional sebagai penyalur aspirasi masyarakat?
Keterlibatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media dan Forum	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Media Cetak dan Elektronik?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Media Sosial?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui <i>Call Center</i> ?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan media dan forum untuk memonitor kinerja Pemda melalui Posko pengaduan di wilayah masing-masing?
Kinerja Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Mekanisme Keterlibatan Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Media Cetak?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Media Elektronik?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Sosialisasi Formal?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme keterlibatan



Indikator	No	Pertanyaan
		masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Sosialisasi Kultural?
Transparansi		
Indikator	No	Pertanyaan
Ketersediaan Peraturan yang Menjamin hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada level Peraturan Nasional?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada level Peraturan Daerah/Peraturan Bupati?
Ketersediaan Informasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas <i>Website</i> ?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas Media Sosial (FB, Instagram, TikTok)?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas <i>Call Center</i> ?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di akses masyarakat melalui fasilitas Posko pengaduan di wilayah masing-masing?
Ketersediaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media <i>Website/Videotron</i> ?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media Radio?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui Media Sosial?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas ketersediaan iklan layanan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui media Pusat Layanan informasi?
Informasi Pelayanan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Catatan Kependudukan (KTP, KK dan Akta)?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Bantuan Sosial?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Perizinan?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi pelayanan Layanan Pengaduan Masyarakat?
Akuntabilitas		
Indikator	No	Pertanyaan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Infrastruktur?



Indikator	No	Pertanyaan
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait dengan kesesuaian proporsi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat di Bidang Ekonomi?
Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kesesuaian program dan kegiatan Pemda dengan kebutuhan daerah/masyarakat di Bidang Ekonomi?
Kebermanfaatan Program dan Kegiatan Pemda Kepada Masyarakat	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Sosial, Politik dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas manfaat program dan kegiatan Pemda yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bidang Ekonomi?
Informasi Penggunaan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas informasi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Ekonomi?
Peran lembaga Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran lembaga dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah?
Kinerja Aparat Pemerintah	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?



Indikator	No	Pertanyaan
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas tingkat kinerja aparat pemerintah dalam Bidang Ekonomi?
Daya Tanggap		
Indikator	No	Pertanyaan
Ketersediaan informasi pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui media Telepon/SMS/WhatsApp?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui media Website?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait ketersediaan informasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui Media Sosial?
Kecepatan Pemda dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kecepatan Pemda dalam merespon pengaduan pada Bidang Ekonomi?
Penyelesaian pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran Pemda dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam Bidang Ekonomi?
Penyediaan SDM, sarana dan prasarana dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kemampuan Pemda untuk menyediakan SDM, sarana dan prasarana, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Bidang Ekonomi?
Kesetaraan		
Indikator	No	Pertanyaan



Indikator	No	Pertanyaan
Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Ekonomi?
Implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait implementasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan (miskin, perempuan, disabilitas, kelompok minoritas lainnya) pada Bidang Ekonomi?
Kualitas pemberian pelayanan publik dari Pemda	1	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan atas kualitas pelayanan publik pada Bidang Ekonomi?
Peran pemda dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai	1	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya



Indikator	No	Pertanyaan
		pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terkait peran pemerintah dalam menyediakan sumber daya pelayanan publik (SDM, sarana, prasarana, anggaran) yang memadai pada Bidang Ekonomi?

Efektivitas dan efisiensi

Indikator	No	Pertanyaan
Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam mensinergikan program dan kegiatan pembangunan antar OPD Bidang Ekonomi?
Kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah?
Kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk efisiensi pembangunan pada Bidang Ekonomi?
Kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam menyediakan sistem pelayanan publik terpadu atau satu pintu?

Visi Strategis

Indikator	No	Pertanyaan
-----------	----	------------



Indikator	No	Pertanyaan
Kemampuan arah Rencana Pembangunan Daerah	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kemampuan Pemda dalam merumuskan keempat tujuan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Jombang?
Kesesuaian kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap kesesuaian kebijakan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?
Langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap langkah strategis Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?
Program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan	1	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Pendidikan dan Kesehatan?
	2	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Infrastruktur?
	3	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum?
	4	Berapa nilai yang Anda berikan terhadap program dan kegiatan Pemda dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi?

